



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Alamat : Jl. Letjend Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Telp & Fax : 021-4254257

Website : www.pt-Jakarta.go.id

KATA PENGANTAR




Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga kami para Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri se-wilayah DKI Jakarta telah dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Laporan Tahunan telah kami upayakan tersusun sebaik dan sesempurna mungkin sesuai Tugas, Fungsi dan kebijakan-kebijakan yang menjadi kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab kami selama satu tahun dengan mengacu pada realita, masalah-masalah yang dihadapi kami tetapberupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi capaian kinerja dan dasar rencana kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya kami selaku pimpinan mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi dan partisipasi aktif baik pikiran, tenaga dan materi segenap Hakim dan Apartur Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri se-wilayah DKI Jakarta yang telah mampu memberikan yang terbaik bagi para pencari keadilan.

Jakarta, 6 Februari 2023

Ketua,



Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum
Nip. 19560405 198203 1 005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. A. Pengelolaan Perkara Di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Se- DKI Jakarta	
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	5
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	7
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	9
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	10
B. Penyelesaian Perkara	11
- Jumlah Sisa Perkara yang diputus	11
- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu	12
- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi	13
- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi	14
- Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi	14
C. Layanan Hukum	14
- Posbakum	14
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	14
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	14
BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA	15
Komposisi SDM berdasarkan kepegangatan / golongan / pendidikan	15
- Mutasi	17
- Promosi	17
- Pensiun	19
- Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	20



BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan	28
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	32
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	39

BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK **41**

- Akreditasi Penjaminan Mutu	42
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	48
- Inovasi Pelayanan Publik	49
- Penilaian Wilayah Bebas Korupsi	52

BAB VI. PENGAWASAN **52**

A. Internal	52
B. Evaluasi	53

BAB VII PENUTUP.....56

A. Kesimpulan	56
B. Saran	56



BAB I. PENDAHULUAN

Sebagai kawal depan (Voorpost) di wilayah hukumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mempunyai tugas menangani perkara, harus mampu memberikan pelayanan prima (Excellent Service) bagi pencari keadilan.

/

Tugas pokok Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah diamanatkan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang No.2 tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengambil langkah-langkah kebijakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Percepatan penyelesaian perkara pada tingkat banding sejak perkara diterima Majelis Hakim sampai diminutasi;
2. Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan untuk membahas kendala- kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara dan kendala di bidang non teknis;
3. Melaksanakan Standar Pelayanan sesuai dengan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan;
4. Melakukan pengawasan tugas teknis dan non teknis melalui Pelaksanaan Pengawasan Rutin maupun melalui SIPP/CTS versi 4.01.
5. Mengadakan koordinasi antara Pengadilan Tinggi dengan Pengadilan Negeri se-DKI Jakarta;
6. Mendorong dipenuhinya sarana dan prasarana serta kebutuhan lainnya dalam menunjang tugas pokok dan pelayanan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
7. Mewujudkan dan menjaga keterbukaan informasi melalui pemanfaatan sistem informasi dan membuat inovasi untuk mempermudah para pencari mendapatkan layanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
8. Melaksanakan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan agar sejalan dengan aturan-aturan dan dasar hukum terbaru.

Selama tahun 2022 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terus memperbaiki sistem manajemen baik dalam bidang administrasi maupun pelayanan yang diberikan. Sebagai bukti nyata pelaksanaan perbaikan administrasi dan layanan pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meluncurkan inovasi dalam pelayanan terpadu satu pintu.

Seluruh upaya yang dilakukan merupakan upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga mendorong Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung



VISI :

*“TERWUJUDNYA
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
YANG AGUNG”*

MISI :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis yang diterapkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2020-2024, tidak terlepas dari apa yang digariskan dalam tugas pokok serta visi dan misi Pengadilan Tinggi.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran aktif dari Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta dukungan DIPA Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

**REVIU KE-IV MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

INSTANSI : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Agung
 MISI :
 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkadilil Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

NO	TUJUAN		SASARAN	TARGET					STRATEGI						
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (DINILAI/DIRANGKAP)	TARGET	Anggaran		
1.	Menyediakan pengalaman masyarakat terhadap manfaat sistem pengadilan online, pelayanan online, persidangan online, persidangan elektronik dan pengadilan digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tinggi Pelayanan online persidangan elektronik, persidangan online, persidangan elektronik dan pengadilan digital	100%	1. Tersedia di hari proses persidangan online, persidangan elektronik dan pengadilan digital	1. Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi 4. Paksi	100%	100%	-	-	-	Program dukungan manajemen	Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi	Layanan peradilan elektronik Layanan litigasi elektronik	10 10	Rp. 201.207.540.000 Rp. 670.800.000
					1. Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi 4. Paksi	100%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi	Layanan peradilan elektronik Layanan litigasi elektronik	10 10	Rp. 201.207.540.000 Rp. 470.800.000
					1. Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi 4. Paksi	100%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi	Layanan peradilan elektronik Layanan litigasi elektronik	10 10	Rp. 201.207.540.000 Rp. 670.800.000
				1. Tersedia di hari proses persidangan online, persidangan elektronik dan pengadilan digital	1. Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi 4. Paksi	100%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi	Layanan peradilan elektronik Layanan litigasi elektronik	10 10	Rp. 201.207.540.000 Rp. 670.800.000
				1. Tersedia di hari proses persidangan online, persidangan elektronik dan pengadilan digital	1. Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi 4. Paksi	100%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi	Layanan peradilan elektronik Layanan litigasi elektronik	10 10	Rp. 201.207.540.000 Rp. 670.800.000
				1. Tersedia di hari proses persidangan online, persidangan elektronik dan pengadilan digital	1. Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi 4. Paksi	100%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi	Layanan peradilan elektronik Layanan litigasi elektronik	10 10	Rp. 201.207.540.000 Rp. 670.800.000
				1. Tersedia di hari proses persidangan online, persidangan elektronik dan pengadilan digital	1. Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi 4. Paksi	100%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi	Layanan peradilan elektronik Layanan litigasi elektronik	10 10	Rp. 201.207.540.000 Rp. 670.800.000
				1. Tersedia di hari proses persidangan online, persidangan elektronik dan pengadilan digital	1. Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi 4. Paksi	100%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi	Layanan peradilan elektronik Layanan litigasi elektronik	10 10	Rp. 201.207.540.000 Rp. 670.800.000
				1. Tersedia di hari proses persidangan online, persidangan elektronik dan pengadilan digital	1. Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi 4. Paksi	100%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Peningkatan akses keadilan yang lebih mudah diakses 1. Paksi 2. Paksi 3. Paksi	Layanan peradilan elektronik Layanan litigasi elektronik	10 10	Rp. 201.207.540.000 Rp. 670.800.000

01 Desember 2022
 Ketua,
 Dr. SCPTARMADE, S.H., M.Hum
 NIP. 19560405 198201 1 005

Rencana strategis tersebut merupakan langkah-langkah yang mendasar yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terdiri dari:

- a. Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Satuan Kerja adalah:



1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
 2. Mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi;
 3. Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik melalui website Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
 5. Pengadaan sarana dan prasarana peradilan untuk percepatan penyelesaian perkara dan minutasasi perkara.
- b. Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI adalah:
1. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan seluruh jajaran Pengadilan Negeri se-DKI Jakarta;
 2. Melakukan pengawasan reguler maupun insidental;
 3. Melakukan pembinaan melalui berbagai program bimbingan teknis dan panel diskusi;
 4. Melakukan pertemuan-pertemuan rutin maupun insidental dalam bentuk rapat kerja daerah dan rapat koordinasi;
 5. Melaksanakan pengawasan melekat secara efektif & berkesinambungan;
 6. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain.



BAB II

PENDAHULUAN PENGELOLAAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI SE-DKI JAKARTA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Sebagai porvoost (kawal depan) Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa mengadili perkara (upaya hukum) yang bersumber dari Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya.

Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam melaksanakan kewenangan menerima, memeriksa mengadili perkara (upaya hukum) Perdata, Pidana, Pidana Anak dan Perkara Tipikor dengan ratio penyelesaian sebesar: **97, 60%**

Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se – DKI Jakarta selama tahun 2022 dijabarkan dalam paparan sebagai berikut:

1) Keadaan Perkara Tingkat Pertama

a. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah	Putus	Sisa
1.	GUGATAN	392	793	1185	817	368
2.	PERMOHONAN	29	615	644	578	66
3.	KEPAILITAN	17	54	71	58	13
4.	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	149	387	536	404	132
6.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	51	122	173	122	51
7.	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	151	438	589	469	120
8.	PIDANA UMUM	196	775	971	821	150
9.	PIDANA SINGKAT	0	0	0	0	0
10.	PIDANA LALU LINTAS (TILANG)	0	160.507	160.507	160.507	0
11.	PIDANA RINGAN	0	326	326	326	0
12.	PIDANA KHUSUS TIPIKOR	50	90	140	107	33
13.	PIDANA PRA PERADILAN	3	19	22	18	4

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



b. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah	Putus	Sisa
1.	GUGATAN	533	1.199	1.732	1.189	543
2.	PERMOHONAN	123	1.572	1.695	1.506	189
3.	PIDANA BIASA	333	1.236	1.569	1.232	337
4.	PIDANA SINGKAT	0	3	3	3	3
5.	PIDANA LALU LINTAS (TILANG)	0	110.825	110.825	110.825	0
6.	PIDANA RINGAN	0	0	0	0	0
7.	PIDANA PRA PERADILAN	2	18	20	20	0
8.	PIDANA ANAK	3	39	42	40	2

c. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah	Putus	Sisa
1.	GUGATAN	1.131	1.187	2.318	1.579	739
2.	PERMOHONAN	118	1.046	1.164	1.103	61
3.	PIDANA BIASA	233	972	1.205	1.049	156
4.	PIDANA SINGKAT	-	-	-	-	-
5.	PIDANA LALU LINTAS (TILANG)	-	149.228	149.228	149.228	0
6.	PIDANA RINGAN	-	665	665	665	0
7.	PIDANA PRA PERADILAN	13	119	132	122	10
8.	PIDANA ANAK	2	23	25	24	1

d. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah	Putus	Sisa
1.	GUGATAN	379	875	1.254	872	382
2.	PERMOHONAN	59	764	823	772	51
3.	PIDANA BIASA	231	1.271	1.502	1.271	231
4.	PIDANA SINGKAT	0	0	0	0	0
5.	PIDANA LALU LINTAS (TILANG)	0	66.720	66.720	66.720	0
6.	PIDANA RINGAN	0	703	703	703	0
7.	PIDANA PRA PERADILAN	1	12	13	12	1
8.	PIDANA ANAK	0	39	39	39	0
9.	PIDANA KHUSUS PERIKANAN	0	0	0	0	0

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



e. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah	Putus	Sisa
1.	GUGATAN	341	779	1.120	779	322
2.	PERMOHONAN	74	1.029	1.103	968	95
3.	PIDANA BIASA	403	967	1.370	1.004	366
4.	PIDANA SINGKAT	0	0	0	0	0
5.	PIDANA (TILANG)	0	44.895	44.895	44.895	0
6.	PIDANA RINGAN	0	0	0	0	0
7.	PIDANA PRA PERADILAN	3	10	13	10	3
8.	PIDANA ANAK	0	12	12	12	0

2.) Keadaan Perkara Tingkat Banding

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah	Putus	Sisa Akhir
1.	PERDATA	84	966	1.050	854	196
2.	PIDANA	45	311	356	333	23
3.	PIDANA ANAK	0	10	10	10	0
4.	TIPIKOR	2	58	60	49	11

● Perkara Perdata

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Cabut	Putus	Sisa Akhir Bulan
1.	JANUARI	84	67		32	119
2.	FEBRUARI	119	70	1	51	137
3.	MARET	137	107	1	71	172
4.	APRIL	172	67	1	83	155
5.	MEI	155	91	2	63	181
6.	JUNI	181	67		97	151
7.	JULI	151	51	2	76	124
8.	AGUSTUS	124	74	1	73	124
9.	SEPTEMBER	124	60	1	76	107
10.	OKTOBER	107	70		50	127
11.	NOVEMBER	127	101		66	162
12.	DESEMBER	162	141		107	196

● Perkara Pidana

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Cabut	Putus	Sisa Akhir Bulan
1.	JANUARI	45	29	-	36	38
2.	FEBRUARI	38	22	-	32	28
3.	MARET	28	23	-	22	29
4.	APRIL	29	33	-	33	29
5.	MEI	29	14	-	22	21
6.	JUNI	21	43	-	20	40
7.	JULI	44	15	-	34	25

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



8.	AGUSTUS	25	23	-	25	23
9.	SEPTEMBER	23	21	2	20	24
10.	OKTOBER	24	36	-	22	38
11.	NOVEMBER	38	30	-	32	36
12.	DESEMBER	36	22	1	35	23

- **Perkara Pidana Anak**

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Cabut	Putus	Sisa Akhir Bulan
1.	JANUARI	0	0	0	0	0
2.	FEBRUARI	0	0	0	0	0
3.	MARET	0	0	0	0	0
4.	APRIL	0	0	0	0	0
5.	MEI	0	0	0	0	0
6.	JUNI	0	0	0	0	0
7.	JULI	0	2	1	1	0
8.	AGUSTUS	0	2	0	1	1
9.	SEPTEMBER	1	2	0	3	0
10.	OKTOBER	0	0	0	0	0
11.	NOVEMBER	0	4	0	3	1
12.	DESEMBER	1	0	0	1	0

- **Perkara Tipikor**

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Cabut	Putus	Sisa Akhir Bulan
1.	JANUARI	2	0	0	2	0
2.	FEBRUARI	0	6	0	1	5
3.	MARET	5	1	0	2	4
4.	APRIL	4	7	0	4	7
5.	MEI	7	5	0	6	6
6.	JUNI	6	9	0	6	9
7.	JULI	9	4	0	3	10
8.	AGUSTUS	10	2	0	8	4
9.	SEPTEMBER	4	1	0	2	3
10.	OKTOBER	3	5	0	4	4
11.	NOVEMBER	4	10	0	1	13
12.	DESEMBER	13	8	0	10	11

3) Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

- Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus pada Tingkat Kasasi sampai dengan Bulan Desember 2022 sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



No	Perkara	Jumlah
1.	PERDATA	174
2.	PERDATA PERMOHONAN	5
3.	PIDANA UMUM	69
4.	PIDANA ANAK	6
5.	KEPAILITAN	118
6.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	63
7.	PIDANA KHUSUS TIPIKOR	49
8.	PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)	8

- Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus pada Tingkat Kasasi sampai dengan Bulan Desember 2022 sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah
1.	PERDATA	80
2.	PIDANA	55

- Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus pada Tingkat Kasasi sampai dengan Bulan Desember 2022 sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah
1.	PERDATA	113
2.	PIDANA BIASA	96
3.	PIDANA ANAK	2

- Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus pada Tingkat Kasasi sampai dengan Bulan Desember 2022 sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah
1.	PERDATA	84
2.	PIDANA BIASA	39
3.	PIDANA ANAK	0
4.	PIDANA PERIKANAN	0

- Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus pada Tingkat Kasasi sampai dengan Bulan Desember 2022 sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah
1.	PERDATA	134
2.	PIDANA BIASA	39
3.	PIDANA ANAK	0

4) Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

- Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus pada Tingkat Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan Bulan Desember 2022 sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



No	Perkara	Jumlah
1.	PERDATA	75
2.	PIDANA UMUM	12
3.	PIDANA ANAK	0
4.	KEPAILITAN	27
5.	HAKI	20
6.	PIDANA KHUSUS TIPIKOR	46

- Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus pada Tingkat Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan Bulan Desember 2022 sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah
1.	PERDATA	44
2.	PIDANA	12

- Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus pada Tingkat Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan Bulan Desember 2022 sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah
1.	PERDATA	41
2.	PIDANA BIASA	38
3.	PIDANA ANAK	0

- Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus pada Tingkat Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan Bulan Desember 2021 sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah
1.	PERDATA	17
2.	PIDANA BIASA	20
3.	PIDANA ANAK	0
4.	PIDANA PERIKANAN	0

- Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus pada Tingkat Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan Bulan Desember 2022 sebagai berikut :

No	Perkara	Jumlah
1.	PERDATA	49
2.	PIDANA BIASA	12
3.	PIDANA ANAK	0



B. PENYELESAIAN PERKARA

1) Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara yang diputus merupakan sisa perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2021 dan kemudian diputus / diselesaikan di tahun 2022.

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Yang diputus pada Tahun 2022	%
1.	PERDATA GUGATAN	84	84	100%
2.	PIDANA BIASA	45	45	100%
3.	PIDANA KORUPSI	2	2	100%
4.	PIDANA ANAK	0	0	-

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

1.	PERDATA GUGATAN	392	399	93,6%
2.	PERDATA PERMOHONAN	29	29	100%
3.	PIDANA BIASA	196	196	100%
4.	PIDANA SINGKAT	0	0	-
5.	PIDANA LANTAS (TILANG)	0	0	-
6.	PIDANA RINGAN	0	0	-
7.	PIDANA PRA PERADILAN	3	3	100%
8.	PIDANA ANAK	0	0	-
9.	KEPAILITAN	17	17	100%
10.	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	149	142	95,3%
11.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	51	51	100%
12.	PIDANA KHUSUS TIPIKOR	50	49	98%
13.	PHI	151	151	100%

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

1.	PERDATA GUGATAN	533	507	95,12%
2.	PERDATA PERMOHONAN	123	123	100%
3.	PIDANA BIASA	333	333	100%
4.	PIDANA ANAK	3	3	100%

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1.	PERDATA GUGATAN	1.131	1.030	91,07%
2.	PERDATA PERMOHONAN	118	118	100%
3.	PIDANA	233	233	100%
4.	PIDANA ANAK	2	2	100%

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

1.	PERDATA GUGATAN	379	354	93%
2.	PERDATA PERMOHONAN	59	59	100%
3.	PIDANA BIASA	231	1271	84,62%
4.	PIDANA ANAK	0	39	100%
5.	PERIKANAN	0	0	0

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

1.	PERDATA GUGATAN	337	312	92,58%
2.	PERDATA PERMOHONAN	74	74	100%
3.	PIDANA BIASA	272	272	100%
4.	PIDANA ANAK	2	2	100%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



2) Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara yang diputus dan disajikan pada table dibawah ini adalah data perkara yang masuk, diputus dan diselesaikan di tahun 2022.

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

No	Jenis Perkara	Perkara masuk	Perkara diputus tepat waktu	%
1.	PERDATA GUGATAN	966	831	86.2%
2.	PIDANA BIASA	311	333	107%
3.	PIDANA KORUPSI	58	49	84.4%
4.	PIDANA ANAK	10	10	100%

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

1.	PERDATA GUGATAN	793	450	56.7%
2.	PERDATA PERMOHONAN	615	549	94.9%
3.	PIDANA BIASA	775	624	80.5%
4.	PIDANA SINGKAT	0	0	-
5.	PIDANA LANTAS (TILANG)	160.507	160.507	100%
6.	PIDANA RINGAN	326	326	100%
7.	PIDANA PRA PERADILAN	19	15	78.9%
8.	PIDANA ANAK	13	13	100%
9.	KEPAILITAN	54	41	75.9%
10.	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	387	262	67.7^
11.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	122	71	58.2%
12.	PIDANA KHUSUS TIPIKOR	90	58	64.4%
13.	PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL(PHI)	438	318	72.6%

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

1.	PERDATA GUGATAN	1.708	938	54,9%
2.	GUGATAN SEDERHANA	24	19	79,1%
3.	PERDATA PERMOHONAN	1695	1506	88,8%
4.	PIDANA BIASA	1569	1232	78,5%
5.	PIDANA ANAK	42	40	95,2%
6.	PIDANA CEPAT	3	3	100%
7.	PIDANA SINGKAT	-	-	0
8.	PIDANA LALU LINTAS	110.825	110.825	100%

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1.	PERDATA GUGATAN	1.187	352	29.65%
2.	PERDATA PERMOHONAN	1.046	984	94.07%
3.	PIDANA ANAK	23	22	95.65%
4.	PIDANA BIASA	972	782	80.45%
5.	PIDANA SINGKAT	-	-	-
6.	PIDANA LALU LINTAS (TILANG)	149.228	149.228	100%
7.	PIDANA RINGAN	665	665	100%
8.	PIDANA PRA PERADILAN	119	109	91.60%

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

1.	PERDATA GUGATAN	875	434	50%
2.	PERDATA PERMOHONAN	764	711	93%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



3.	PIDANA ANAK	39	39	100%
4.	PIDANA BIASA	1.271	1.260	99,13%
5.	PIDANA SINGKAT	0	0	0
6.	PIDANA TILANG	66.720	66.720	100%
7.	PIDANA RINGAN	703	703	100%
8.	PRA PERADILAN	12	11	91,67%
9.	PERIKANAN	0	0	0
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR				
1.	PERDATA GUGATAN	739	416	56.29%
2.	PERDATA PERMOHONAN	1.029	950	92.32%
3.	PIDANA ANAK	12	12	100%
4.	PIDANA BIASA	967	728	75.28%
5.	PIDANA SINGKAT	-	-	-
6.	PIDANA TILANG	107.219	107.219	100%
7.	PIDANA RINGAN	676	676	100%
8.	PRA PERADILAN	9	6	66.6%

3) Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK)

N o	Jenis Perkara	Putus PN	Tidak Banding	Putus PT	Tidak Kasasi	Putus MA	Tidak PK
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT							
1.	PERDATA GUGATAN	817	569	248	130	118	73
2.	PERDATA PERMOHONAN	644	-	-	641	3	3
3.	PIDANA BIASA	625	571	56	560	51	622
4.	PIDANA SINGKAT	0	0	0	0	0	0
5.	PIDANA LANTAS (TILANG)	160.507	160.507	0	160.507	0	160.507
6.	PIDANA RINGAN	326	326	0	326	0	326
7.	PIDANA PRA PERADILAN	15	15	0	15	0	15
8.	PIDANA ANAK	13	8	5	8	1	13
9.	KEPAILITAN	58	-	-	51	7	6
10.	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	404	-	-	376	21	18
11.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	122	-	-	69	28	25
12.	PIDANA KHUSUS TIPIKOR	107	31	48	73	5	90
13.	PHI	469	-	-	231	218	-
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT							
1.	PERDATA	1.170	957	137	57	122	78
2.	PIDANA ANAK	39	37	1	0	0	0
3.	PIDANA BIASA	1.236	1.178	49	49	32	20
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN							
1.	PERDATA GUGATAN	1.579	1216	195	102	143	102

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



2.	PIDANA ANAK	24	18	4	2	0	0
3.	PIDANA BIASA	972	866	104	51	53	15
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA							
1.	PERDATA	872	632	183	176	60	60
2.	PIDANA ANAK	39	0	0	0	0	0
3.	PIDANA BIASA	1.271	1.213	55	16	38	18
4.	PERIKANAN	0	0	0	0	0	0
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR							
1.	PERDATA	739	599	129	71	116	108
2.	PIDANA ANAK	0	0	0	0	0	0
3.	PIDANA BIASA	967	941	53	49	20	11

4) Jumlah Perkara Yang Berhasil Di mediasi

No	Satuan Kerja	Perkara Mediasi	Berhasil Mediasi	Gagal Mediasi
1.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	454	23	413
2.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	565	23	542
3.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	964	53	817
4.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	435	22	384
5.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	375	20	355

5) Jumlah Perkara Anak Yang Belum Berhasil Melalui Diversi

No	Satuan Kerja	Perkara Anak	Melalui Diversi	Gagal Diversi
1.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	13	0	13
2.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	39	0	39
3.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	14	0	14
4.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	39	39	39
5.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	12	4	0

C. LAYANAN HUKUM

Layanan hukum yang terdiri dari Posbakum, Sidang Keliling/pelayanan terpadu, dan perkara prodeo dilaksanakan pada Pengadilan Negeri se – wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan akan dijabarkan dalam lampiran lampiran layanan hukum wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SE – DKI JAKARTA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia yang berfokus pada pengelolaan dan pengarahan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan mengacu pada Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| a) penyusunan dan penetapan kebutuhan | h) penilaian kinerja |
| b) pengadaan | i) penggajian dan tunjangan |
| c) pangkat dan jabatan | j) penghargaan |
| d) pengembangan karier | k) disiplin |
| e) pola karir | l) pemberhentian |
| f) promosi | m) pensiun dan tabungan hari tua |
| g) mutasi | n) perlindungan |

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melaksanakan pengelolaan untuk menghasilkan apartur yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. ASN yang dikelola di terdiri dari Hakim, PNS, dan PPNPN.

pengelolaan apartur diarahkan untuk selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas apartur dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

1. KOMPOSISI SUMBERDAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/ PENDIDIKAN

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Memiliki Jumlah 146 Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :

No.	Jabatan	Jumlah SDM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim Tinggi	33
4	Hakim Ad-Hoc	4
5	Hakim Yustisial	12
6	Panitera	1

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



7	Panitera Muda Perdata	1
8	Panitera Muda Pidana	1
9	Panitera Muda Khusus TIPIKOR	1
10	Panitera Muda Hukum	1
11	Panitera Pengganti	38
12	Sekretaris	1
13	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	1
14	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	1
15	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	1
16	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	1
17	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	1
18	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI Informasi	1
19	Pejabat Fungsional	2
20	Pelaksana	15
21	PPNPN	33



a) Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Jenis Pangkat	Golongan	Jumlah	Persentase
IV/E	Pembina Utama	46	40,35 %
IV/D	Pembina Utama Madya	0	0 %
IV/C	Pembina Utama Muda	2	1,75 %
IV/B	Pembina Tk. I	3	10,02 %
IV/A	Pembina	39	34,21 %
III/D	Penata Tk. I	5	4,38 %

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



III/C	Penata	7	6,14 %
III/B	Penata Muda Tk. I	0	0 %
III/A	Penata	6	5,26 %
II/D	Pengatur Tk. I	2	1,75 %
II/C	Pengatur	4	3,50 %
NON PANGKAT	-	3	2,65%

b) Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
Strata III	7	6.14 %
Strata II	80	70,17 %
Starta I	19	16,6 %
Diploma III	4	3,50 %
SMA	2	1,75 %

c) Mutasi Hakim / Pegawai (*Masuk*)

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	EWIT SOETRIADI, S.H., M.H	Hakim Tinggi PT Bandung	Hakim Tinggi DKI Jakarta
2	R. IIM NUROHIM, S.H	Hakim Tinggi PT Jambi	Hakim Tinggi DKI Jakarta
3	H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H	Panmud Perdata MA-RI	Hakim Tinggi DKI Jakarta
4	TAVIP DWIYATMIKO, S.H.,- M.H	Panitera PT Surabaya	Panitera PT DKI Jakarta
5	EDDY WIYONO, S.H., M.H	Panitera PN	Panmud Tipikor PT DKI Jakarta
6	ANNA ANDANAWARIH, SH., M.HUM.	Hakim Tinggi PT Yogyakarta	Hakim Yustisial PT DKI Jakarta
7	SUYATNO, S.H., M.H	Panmud Perdata PN Jakarta Selatan	Panitera Pengganti PT DKI Jakarta
8	GITA YUNIA MARSYA, S.E	Pegawai PN Sungai Liat	Pegawai PT DKI Jakarta
9	TEGUH HARIANTO, S.H., M.HUM	Hakim Tinggi PT Palembang	Hakim Tinggi DKI Jakarta
10	SUTARTO, S.H., M.HUM	Hakim Tinggi PT Denpasar	Hakim Tinggi DKI Jakarta
11	TOROWA DAELI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Bandung	Hakim Yustisial PT DKI Jakarta
12	BUDI HAPSARI, S.H., M.H	Hakim Tinggi PT Banten	Hakim Tinggi DKI Jakarta

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



13	HARIS MUNANDAR, S.H., M.H	Hakim Tinggi PT Medan	Hakim Tinggi DKI Jakarta
14	SUGENG RIYONO, S.H., M.HUM	Hakim Tinggi PT Yogyakarta	Hakim Tinggi DKI Jakarta
15	AFRIENDA, S.H., M.H	Panmud Perdata PN Bekasi	Panitera Pengganti PT DKI Jakarta
16	MAHDI, S.H., M.H	Panitera PN Garut	Panitera Pengganti PT DKI Jakarta
17	DJOKO SANTOSO, S.H., M.H	Panitera PN Pandeglang	Panitera Pengganti PT DKI Jakarta
18	SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Banten	Hakim Tinggi DKI Jakarta
19	HANDRI ANIK EFFENDI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Jambi	Hakim Yustisial PT DKI Jakarta
20	SUMPENO, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Denpasar	Hakim Tinggi DKI Jakarta
21	DR. MARSUDIN NAINGGOLAN, S.H., M.H.	Balitbang DIKlat Kumdil MA-RI	Hakim Tinggi DKI Jakarta
22	H. ERLIN HERMANTO, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Bandung	Hakim Yustisial PT DKI Jakarta
23	CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Bandung	Hakim Tinggi DKI Jakarta
24	SUDIYANTO, S.H., M.H.	Sekretaris PT Medan	Sekretaris PT DKI Jakarta
25	ST. IKO SUDJATMIKO, SH	Hakim PN	Hakim Yustisial PT DKI Jakarta

d) Mutasi Hakim / Pegawai (*Keluar*)

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	HARYONO, SH., MH	Hakim Tinggi DKI	Hakim Tinggi PT Surabaya
2	BUKAERI, SH., MM	Panitera PT DKI	Panitera PT Surabaya
3	Drs. NASRULLOH, M.Si	Sekretaris PT DKI	Sekretaris PTA Jakarta
4	Dr. DWI REZKI ASTARINI, SH.,MH	Hakim Yustisial	Staf

e) Promosi Hakim / Pegawai

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, SH.,MH	Hakim Tinggi DKI	Wakil Ketua PT Padang
2	AROZIDUHU WARUWU, SH., MH	Hakim Tinggi DKI	Wakil Ketua PT Jayapura
3	Dr. ARTHA THERESIA, SH., MH	Hakim Tinggi DKI	Wakil Ketua PT Babel
4	Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH., MH	Hakim Tinggi DKI	Wakil Ketua PT AMbon
5	H. AHMAD ARDIANDA PATRIA,SH.,MH	Hakim Tinggi DKI	Wakil Ketua PT Padang

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



6	ST. IKO SUDJATMIKO, SH., MH	Hakim Yustisial DKI	WKPN Tasikmalaya
7	DEDE MUTTAKIN, S.H.,M.Hum	PP PT DKI	Panmud Perdata PT Banten

f) Pensiun Hakim / Pegawai

No	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1	SAURASI SILALAH, SH., MH	Hakim Tinggi	01 – 03 - 2022
2	Dr. NARDIMAN, SH., MH	Hakim Tinggi	01 – 04 – 2022
3	MUHAMMAD YUSUF, SH.M.Hum	Hakim Tinggi	01 – 11 – 2022
4	Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH	Hakim Tinggi	01 – 10 - 2022
5	TIUR NIMAR SIREGAR, SH., MH	Panitera Pengganti	01 – 02 – 2022
6	H. SUPARNO, SH., MH	Panitera Pengganti	01 – 05 – 2022
7	WALUYO, SH., MH	Panitera Pengganti	01 – 07 – 2022
8	WIDIAWATI WAHAS, SH., MH	Panitera Pengganti	01 – 07 – 2022
9	BAMBANG RUSMIYANTO	Ajudan	01 - 07 - 2022
10	Dra. Hj. EMMI ANEKA, SH., MH	Panitera Pengganti	01 - 10 - 2022
11	H. TRISNO BARDI, SH., MH	Panitera Muda Pidana	01 – 11 – 2022
12	WARGIATI, SH., MH	Panitera Pengganti	01 – 11 – 2022

g) Data Diklat Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

NO	NAMA SDM	JABATAN	DIKLAT YANG DIKUTI TAHUN 2022	
			NO	JENIS DIKLAT
1	DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.HUM	KETUA	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
2	DR. HERU PRAMONO, SH., M.HUM	WAKIL KETUA	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
			3	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara
3	H Jalaluddin, S.H., M.HUM.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
4	Sutarto, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi		
5	Indah Sulistyowati, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
6	DR. H. Yahya Syam, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
			3	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara
7	Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
8	Budi Hapsari, S.H., M.H.	Hakim Tinggi		
9	H Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
			3	Pelatihan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Gelombang I
10	Tony Pribadi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
11	Teguh Harianto, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi		
12	Yonisman, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
13	Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi		
14	H. Edwarman, S.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
15	Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.HUM.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



16	Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
17	Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
18	Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
19	Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
20	Dr. Sumpeno, S.H., M.H.	Hakim Tinggi		
21	Sirande Palayukan, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
			3	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara
22	Nelson Pasaribu, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
23	Erwan Munawar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
24	Berlin Damanik, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
25	Hi. A. Sanwari Ha, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
26	Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.	Hakim Tinggi		
27	Iersyaf, S.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



28	Haris Munandar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi		
29	Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
30	Siti Farida Mt, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
31	H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.	Hakim Tinggi		
32	H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
33	H. Mulyanto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
34	Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi		
35	Anna Andanawarih, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi Yustisial,		
36	Abdul Fattah, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
37	H. Tavip Dwiymiko, S.H., M.H.	Panitera Tingkat Banding Tipe A, Panitera		
38	Sudiyanto, S.H., M.H.	Sekretaris Tingkat Banding Tipe A, Sekretaris	1	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
			2	Penyusunan Rka-Kl Pagu Indikatif Dipa 03 Ta 2023 Pada Lingkungan Peradilan Umum
39	Lorentius Raja Sophan Girsang, S.H., M.H.	Panitera Muda Banding Tipe	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



		A, Panitera Muda Pidana	2	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
40	Itjah Minantika, S.E., S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
			3	Penyusunan Rka-K1 Pagu Indikatif Dipa 03 Ta 2023 Pada Lingkungan Peradilan Umum
			4	Pelatihan Mainstreaming Disability Untuk Pengadilan
			5	Pelatihan Ecses Treshold Level For Nasional Leadership Training Tahun 2022 Kelas C
41	Jul Rizal, S.H., M.H.	Panitera Muda Banding Tipe A, Panitera Muda Perdata	1	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
			2	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
			3	Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Pengadilan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Ta 2022
42	Watty Wiarti, S.H., M.H.	Panitera Muda Banding Tipe A, Panitera Muda Hukum	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
			3	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara
			4	Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Pengadilan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Ta 2022

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



43	Eddy Wiyono, S.H., M.H.	Panitera Muda Banding Tipe A, Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi		
44	Sabrina Napitupulu, S.E.	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
			3	E-Learning Dan Microlearning Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anggaran Dan Perbendaharaan
45	Fahimah Basyir, S.H., M.H.	Hakim Yustisial,		
46	Hj. Rita Komala, S.H.	Hakim Yustisial,	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
47	Handri Anik Effendi, S.H., M.H.	Hakim Yustisial,		
48	H. Feri Ferdiaman, S.H., M.H.	Hakim Yustisial,		
49	R. Iim Nurohim, S.H.	Hakim Yustisial,		
50	H. Agusti, S.H., M.Hum.	Hakim Yustisial,	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
51	Erlin Hermanto, SH.,MH	Hakim Yustisial,		
52	Herslily Mokoginta, S.H.	Hakim Yustisial,		
53	Torowa Daeli, S.H., M.H.	Hakim Yustisial,		
54	DR. H Suprpto, S.H., M.Hum.	Hakim Yustisial,	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
55	Hotma Maya Marbun, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor,	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
56	St. Iko Sudjatmiko, S.H.	Hakim Yustisial,		
57	DR. Sugeng Tarsono S, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



58	Imelda Merlina Sani, S.H., M.H.	Hakim Yustisial,	1	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
59	Lisnur Fauziah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
60	Roma Siallagan, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
61	Israel Situmeang, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
62	Srie Aty Mawikere, S.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
63	Yulman, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
64	Ratna Suminar, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
65	Afrienda, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
66	Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
67	Betty Hartati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
68	Dra. Endang Primanah Nurpujiati, Bc.Ip., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
69	Suyatno, S.H., M.H.	Panitera Pengganti		
70	Mohammad Najib, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
71	Sabda Siregar, S.H, M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



72	Noerhayati, S.H, M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
			2	Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Pengadilan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ta 2022
73	Budi Santoso, S.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
74	Mahmudah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
75	Haiva, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
76	H. Sumir, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
77	Mahdi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
78	Jamson Siringo Ringo, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
79	Nanik Winarsih, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
80	Siti Khaeriyah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
81	Wangi Amal Prakasa, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
82	A. Syamsiar, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
83	Inna Iskantriana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



84	Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
85	Fajar Sonny Sukmono, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
86	Sumardiyanta, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
87	Dewi Rahayu, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
88	Nurussabiha, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
89	Tri Sulistiono, S.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
90	Djoko Santoso, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
91	Effendi Panataran Tampubolon, S.H.M.H	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
92	Budiarto, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
93	Muhammad Arman Ar, S.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
94	Adang Suhendar, S.H.	Panitera Pengganti	1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia
95	Alex Kurnia, S.H.	Panitera Pengganti		
96	Anthon R Saragih, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor,	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



97	Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M.	Hakim Ad Hoc Tipikor,	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
98	Gatut Sulisty, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor,		
99	Amir Nurllah, S.H.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga	1	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
100	Dwinanto, S.E., S.H.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	1	E-Learning Dan Microlearning Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anggaran Dan Perbendaharaan
			2	Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Pengadilan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Ta 2022
101	Indah Pratiwie, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Rencana Program Dan Anggaran Pengadilan Tinggi Dki Jakarta
			3	Penyusunan Rka-K1 Pagu Indikatif Dipa 03 Ta 2023 Pada Lingkungan Peradilan Umum
			4	PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWASAN (PKP) ANGKATAN 1 S.D. 3
			5	Pelatihan Mainstreaming Disability Untuk Pengadilan
			6	Pelatihan Online Manajemen Barang Milik Negara Angkatan Iii Dari Tempat Tugas Tahun 2022
			7	Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan Mempersiapkan Generasi Emas

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



				Mahkamah Agung 2045 Kelas B
102	Destian Bimantoro, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi	1	Pembinaan Bidang Teknis Dan Adm Yudisial Ma
			2	Bimbingan Teknis Rencana Program Dan Anggaran Pengadilan Tinggi Dki Jakarta
			3	PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWASAN (PKP) ANGKATAN 1 S.D. 3
103	Agustina, S.Sos.	Bendahara Tingkat Banding/Eselo n I, Panitera Muda Perdata	1	Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Pengadilan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Ta 2022
104	Danti Pratiwi, S.E.	Pranata Keuangan APBN Penyelia,	1	Pembinaan Kualitas Capaian Output Dan Ketepatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pada Satker Mitra Kppn Jakarta Vi
105	Andral, S.H.	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Perdata		
106	Elmina Pratiwi, S.H., M.H.	Analisis Hukum, Panitera Muda Pidana		
107	Sari Melinda, S.E., M.H.	Penyusun Laporan Keuangan, Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	1	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
			2	Bimbingan Teknis Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Uappa-W Semester I Tahun 2022
108	Mirna Diniarti, A.Md.	Analisis Kepengawasan Pelaksana Lanjutan,	1	Bimbingan Teknis Rencana Program Dan Anggaran Pengadilan Tinggi Dki Jakarta
			2	Bimbingan Teknis Pengajaran Tunjangan Khusus Kinerja Satker Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Dan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



				Pengadilan Tinggi Agama Dki Jakarta
			3	Pelatihan Online Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Angkatan 2 Tahun 2022
			4	Webinar Coaching - Mentoring Sebagai Metode Pengembangan Asn Dan Bintek Skp 2022
109	Tofas Herusanto, ,S.H.	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana		
110	Meidina Silmi Putri, S.H	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana	1	Bimbingan Teknis Rencana Program Dan Anggaran Pengadilan Tinggi Dki Jakarta
			2	Pembelajaran Klasikal Latsar Cpns Mari Gol Iii Angkatan Ii Tahun 2022
111	Gita Yunia Marsya, S.E.	Analisis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi		
112	Agus Salim	Analisis Protokol, Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga		
113	Dwiningtyas Anggraeni, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan, Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	1	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
			2	Latsar Cpns Distance Learning
			3	E-Learning Dan Microlearning Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anggaran Dan Perbendaharaan
			4	Pembinaan Kualitas Capaian Output Dan Ketepatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



				Pada Satker Mitra Kppn Jakarta Vi
114	Nur Sidik	Pengadministrasi Hukum, Panitera Muda Perdata		
115	Teguh Iman Sunaryo	Pengadministrasi Registrasi Perkara, Panitera Muda Perdata		
116	Muhammad Wildan Fakhrezi, A.Md.Pjk.	Pengelola Perkara, Panitera Muda Pidana	1	Bimbingan Teknis Rencana Program Dan Anggaran Pengadilan Tinggi Dki Jakarta
			2	Pembelajaran Klasikal Latsar Cpns Mari Gol Ii Angkatan Vi Tahun 2022
117	Rendyatama Hendra Kurniawan, A.Md.	Pemelihara Sarana Dan Prasarana, Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga	1	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
			2	Pelatihan Online Manajemen Barang Milik Negara Angkatan Ii Dari Tempat Tugas Tahun 2022
118	Suci Wulan Asri, A.Md.Ak.	Pengelola Barang Milik Negara, Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga	1	Bimbingan Teknis Bagi Calon Asesor Apm Pt
			2	Pelatihan Online Manajemen Barang Milik Negara Angkatan Ii Dari Tempat Tugas Tahun 2022
119	Bintang Meidy Elisabeth Silitonga, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara, Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	1	Pembelajaran Klasikal Latsar Cpns Mari Gol Ii Angkatan I Tahun 2022



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Pengadilan Tinggi Jakarta Tahun Anggaran 2022 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.097467 Badan Urusan Administrasi Sebagai berikut:

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai mendapat Anggaran sebesar **Rp. 40.945.288.000,- (Empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)**. Realisasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Gaji Pokok PNS	8.407.419.000	8.358.898.740	48.520.260	99.42%
2	Pembulatan gaji PNS	89.000	87.503	1.497	98.32%
3	Tunjangan Suami/Istri PNS	660.668.000	659.177.314	1.490.686	99.77%
4	Tunjangan Anak PNS	89.029.000	88.727.740	301.260	99.66%
5	Tunjangan Struktural PNS	107.770.000	107.770.000	0	100%
6	Tunjangan Fungsional PNS	24.261.690.000	24.261.690.000	0	100%
7	Tunjangan PPh PNS	4.658.452.000	4.639.686.694	18.765.306	99.60%
8	Tunjangan Beras PNS	291.500.000	291.345.660	154.340	99.95%
9	Uang Makan PNS	1.104.386.000	1.069.542.000	34.844.000	96.84%
10	Tunjangan Umum PNS	36.585.000	36.585.000	0	100,%
11	Tunjangan Hakim Ad Hoc	1.327.700.000	1.327.700.000	0	100%
	JUMLAH	40.945.288.000	40.840.850.651	104.437.349	99,42%

- a) Untuk Belanja Non Operasional Perkantoran mendapat anggaran sebesar **Rp107.342.000,- (seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)**. Realisasi Anggaran Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Bimbingan Teknik Bidang Rencana Program dan Anggaran	107.342.000	106.966.210	375.790	99.65%
	JUMLAH	107.342.000	106.966.210	375.790	99.65%

- b) Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran mendapat anggaran sebesar **Rp 7.123.798.000,- (Tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)**. Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Keperluan Perkantoran	2.003.357.000	1.862.227.850	141.129.150	92,96%
2	Koran, Air Galon, Sampah, Barang Opr, Lainnya / Kep. Sehari Perkantoran Lainnya, Jamuan Tamu	59.449.000	59.445.469	3.531	99,99%
3	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi/ATK	188.750.000	188.741.300	8.700	100%
4	Langganan Internet, Hosting Domain, Lisensi Vidi C	185.000.000	184.984.892	15.108	99,99%
5	Pengiriman Surat Dinas	3.400.000	3.399.500	500	99,99%
6	Langganan Listrik	828.048.000	788.455.610	39.592.390	95,22%
7	Langganan Telpon	42.500.000	40.622.548	1.877.452	95,58%
8	Sewa mesin Foto Copy se-Wilayah Hukum PT. DKI Jakarta , sewa Rumah Dinas Hakim Karir, H.Yustisial, H. Adhoc Tipikor	1.079.077.000	1.077.997.878	1.079.122	99,90%
9	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	653.812.000	653.803.002	8.998	100%
10	Pemeliharaan Rumah Dinas	27.500.000	27.494.500	5.500	99,98%
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	868.013.000	867.899.347	113.653	99,99%
12	Honor Operasional Satuan Kerja	73.560.000	70.960.000	2.600.000	96,47%
13	Pakaian Dinas Peg, Satpam, Supir dan Pramubakti	71.750.000	71.750.000	0	100%
14	Pelantikan dan Sumpah Jabatan/ Bahan, Konsumsi	7.007.000	6.999.000	8.000	99,89%
15	Rohaniwan	400.000.	0	400.000	0,00%
16	Konsumsi Rapat Bulanan	14.200.000	14.118.900	81.100	99,43%
17	Kosultasi ke Pusat	6.000.000	0	6.000.000	100%
18	Perj. Dinas Dalam Kota	6.000.000	0	6.000.000	0,00%
19	Paket Meeting Luar Kota/ Transport, Penginapan, Uang Harian	0	0	0	0,00%
20	Perj.Dinas Dalam Kota/ KPPN, KPKNL, Kanwil	6.000.000	0	6.000.000	100%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



21	Belanja Penanganan Covid-19/ disinfektan, Masker, H. Sanitizer, Thermogun, Rapit Tes	41.265.000	41.201.547	63.453	99,85%
22	Per. Dinas Biasa/ U.Harian, Transport, Penginapan (KPT, WKPT)	33.000.000	28.220.376	4.779.624	85,52%
23	Perj.Dinas Dalam Kota/ Pengawasan Reguler	26.250.000	26.250.000	26.250.000	100%
24	Perj. Dinas Dalam Kota/ BKN	1.500.000	1.500.000	0	100%
25	Belanja Sewa Hakim	903.960.000	903.960.000	0	100%
JUMLAH		7.123.798.000	6.932.031.719	191.766.281	97,31%

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana mendapat anggaran sebesar Rp 720.000.000- (Tujuh ratus dua puluh juta rupiah). Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Peralatan dan mesin / PC Kepaniteraan	253.000.000	253.000.000	0	100%
2	Belanja Fiilling Cabinet, Kursi Kerja Panitera, MultiMedia Proyektor	467.000.000	466.249.000	751.000	99,84%
JUMLAH		720.000.000	719.249.000	751.000	99,90%

Dari Program-program tersebut berikut rekap Realisasi Nomor DIPA : DIPA 005.01.2.097467/2021 Badan Urusan Administrasi :

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	40.945.288.000	40.840.850.651	104.437.349	99,42%
2	Belanja Barang Non Operasional Perkantoran	107.342.000	106.966.210	375.790	99.65%
3	Belanja Barang Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	7.123.798.000.	6.932.031.719	191.766.281	97,31%
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Untuk Belanja Modal	720.000.000	719.249.000	751.000	99,90%
JUMLAH		48.896.428.000	48.599.097.580	297.330.420	99,39%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



III. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Nomor DIPA 005.03.2.099062 Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Definitif sebesar Rp 620.350.000,- (Enam ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Pembinaan Pemeriksaan Yustisial/ Perj.Dinas Dalam Kota	15.000.000	15.000.000	0	100%
2	Sosialisasi PNBP/ Honor Narasumber	14.400.000	14.380.000	0	99,86%
3	Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis bagi Panitera di wilayah PT. DKI Jkt Sertifikat, Doksi, ATK	95.950.000	95.950.000	0	100%
4	Pengiriman Pos Pusat/ Surat Dinas (Salinan Putusan)	23.250.000	23.248.175	1.825	99,99%
5	Perj.Dinas Dalam Kota/ Pengiriman berkas ke Pengadilan Pengaju	32.550.000	32.550.000	0	100%
6	Perj. Biasa/ Pengiriman Perpanjangan Penahanan ke Mako Brimob Cikeas dan Rutan Gunung Sindur	52.000.000	52.000.000	0	100%
7	ATK Pidana Umum	253.040.000	253.036.300	3.700	100%
8	Penjilidan dan Fotocopy Pidana Umum	3.250.000	3.244.000	6.000	99,82%
9	Penggandaan dan Penjilidan berkas Pidana umum	950.000	948.000	2.000	99,79%
10	Pengiriman Pos Pusat/ Surat Penahanan kepada pengadilan pengaju	10.000	0	10.000	0%
11	Perj. Dinas Dalam Kota/ Pengiriman Surat Penahanan ke Pengadilan pengaju	40.050.000	40.050.000	0	0%
12	Pengiriman Pos Pusat/ Surat Dinas (Salinan Putusan) Tipikor	7.000.000	6.999.050	950	99,99%
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000	0	10.000	0%
14	Penjilidan dan Fotocopy Tipikor	600.000	600.000	0	100%
15	ATK Perkara Tipikor	76.190.000	76.186.500	3.500	100%
16	Penggandaan dan Penjilidan berkas Tipikor	50.000	0	50.000	0,00%
17	Pos Pusat/pengiriman surat penahanan Perkara Tipikor	50.000	0	50.000	100%
18	Perjalanan dinas dalam Kota/ pengiriman surat ke Rutan	6.000.000	6.000.000	0	100%
JUMLAH		620.350.00	620.291.025	58.975	99,99%



IV. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	DIPA 005.01.2.097467 BUA	48.896.428.000	48.599.097.580	99,39%
2	DIPA 005.03.2.099062 BADILUM	620.350.00	620.291.025	99,99%

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana Dan Prasarana Gedung

Gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terletak di jalan Letnan Jendral Suprpto Cempaka putih Tengah Jakarta Pusat dengan luas tanah 3.845 m². Status tanah Hak Pakai dengan pemegang hak atas nama Direktorat Jendral Peradilan Umum: 227/27//HP/P/1980 yang di atasnya dibangun gedung kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seluas 4.679,5 m² terdiri dari 2 (dua) bangunan yaitu gedung depan terdiri dari 2 (dua) lantai dan gedung belakang terdiri dari 6 (enam) lantai.

1.1. Bangunan gedung depan (gedung lama) terdiri dari 2 (dua) lantai:

1.1.1. Lantai 1 terdiri dari:

- Ruang Kerja Sub Bag TU dan RT;
- Ruang Kerja Sub Bag Keuangan dan Pelaporan;
- Ruang Perpustakaan;
- Ruang Kerja Panitera Pengganti;
- Ruang Kerja Hakim Yustisial;
- Ruang Kerja Kepaniteraan Hukum;
- Ruang Arsip Perkara;
- Ruang Sidang;
- Ruang Resepsionis (Ruang Piket);
- Ruang Pengaduan;
- Ruang PTSP;
- Ruang Tunggu Tamu Terbuka;
- Gudang;
- Toilet Pria, Wanita dan Toilet Difabel Samping Ruang Sidang serta Toilet Difable Depan Ruang PTSP.

1.1.2. Lantai 2 terdiri dari :

- Ruang Kerja Panitera;
- Ruang Kerja Staff Panitera;
- Ruang Kerja Sekretaris;
- Ruang Kerja Kepala Bagian Umum dan Keuangan;
- Ruang Kerja Sub Bag Kepegawaian dan T.I;
- Ruang Kerja Sub Bag Perencanaan dan anggaran;
- Ruang Kerja Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;



- Ruang Arsip Perencanaan dan Kepegawaian;
- Ruang Kerja Hakim Ad-Hoc Tipikor;
- Ruang Dharmayukti Karini;
- Ruang Kerja Kepaniteraan Pidana;
- Ruang Kerja Kepaniteraan Perdata;
- Ruang Kerja Kepaniteraan Tipikor dan Arsip Tipikor;
- Ruang Arsip Umum dan Keuangan;
- Ruang Arsip Kepaniteraan Pidana;
- Ruang Arsip Kepaniteraan Perdata;
- Ruang Teknologi Informasi (TI);
- Toilet Pria dan Wanita;
- Gudang.

1.2. Bangunan Gedung Belakang 6 (enam) lantai:

1.2.1. Lantai 1 terdiri dari:

- Ruang Genset;
- Ruang Control Panel;
- Ruang Pusat Instalasi listrik Internal;
- Ruang Pusat Instalasi listrik eksternal;
- Ruang Instalasi air;
- Tempat Parkir;
- Toilet Pria dan Wanita.

1.2.2. Lantai 2 terdiri dari:

- Ruang Kerja Ketua Pengadilan Tinggi;
- Ruang Kerja Wakil Ketua Pengadilan Tinggi;
- Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi;
- Ruang Rapat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi;
- Ruang Dokumen Kontrol;
- Ruang Ajudan;
- Ruang Tunggu;
- Ruang Pantry;
- Toilet Pria dan Wanita.

1.2.3. Lantai 3 terdiri dari:

- Ruang Kerja Hakim Tinggi sebanyak 12 ruang;
- Ruang Tunggu;
- Toilet Pria dan Wanita.

1.2.4. Lantai 4 terdiri dari:

- Ruang Kerja Hakim Tinggi;
- Ruang Kerja Hakim Ad-Hoc Tipikor;
- Ruang Kerja Panitera Pengganti;
- Ruang tunggu;
- Toilet Pria dan Wanita.



1.2.5. Lantai 5 terdiri dari :

- Bangunan bagian Barat digunakan sebagai Mushola dan tempat Wudhu.
- Bangunan bagian Timur digunakan sebagai Ruang kerja Panitera Pengganti beserta lemari *locker* dan;
- Ruang untuk Olahraga (Fitness) dilengkapi oleh peralatan olahraga;
- Kamar ganti;
- Toilet Pria dan wanita.

1.2.6. Lantai 6 Ruang Serba Guna yang dilengkapi oleh sarana pendukung yaitu:

- Panggung;
- Ruang kontrol untuk sound system;
- Gudang;
- Ruang Ganti;
- Toilet VIP;
- Toilet Pria dan wanita.

2. Pemeliharaan/Perawatan sarana dan Prasarana

2.1. Pemeliharaan/Perawatan sarana prasarana dilakukan sebagai berikut :

2.1.1. Perawatan/Pemeliharaan Gedung Kantor dilaksanakan satu tahun sekali

Dan / atau sesuai dengan kebutuhan.

2.1.2. Pemeliharaan/Perawatan Taman dilaksanakan setiap hari.

2.1.3. Pemeliharaan/Perawatan rumah dinas dilaksanakan satu tahun sekali dan/atau

Sesuai kebutuhan.

2.2. Pemeliharaan/Perawatan Sarana Prasarana Penunjang

Pelaksanaan Tupoksi.

Sedangkan Pemeliharaan/Perawatan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan Tupoksi dilaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana prasarana penunjang sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	JADWAL
1.	Pemeliharaan/perawatan kendaraan roda 4 (empat)	9 unit	Setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
2.	Pemeliharaan/perawatan kendaraan roda 2 (dua)	4 unit	Setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
3.	Pemeliharaan/perawatan Personal Komputer (PC)	77 unit	Setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
4.	Pemeliharaan/perawatan Laptop	57 unit	Setiap 6 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
5.	Pemeliharaan/Perawatan AC Split	42 unit	Setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
6.	Pemeliharaan/perawatan AC Sentral	14 unit	Setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
7.	Pemeliharaan/perawatan AC Cassete	9 unit	Setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



8.	Pemeliharaan/perawatan AC Standing	2 unit	Setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
9.	Pemeliharaan/perawat Genzet	1 unit	Setiap bulan dan sesuai dengan kebutuhan
10.	Pemeliharaan/perawatan Lift	2 unit	Dilaksanakan 2 kali setiap bulan dan sesuai kebutuhan
11.	Pemeliharaan/perawatan pompa air	5 unit	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
12.	Pemeliharaan/perawatan Sound Sistem	2 unit	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
13.	Pemeliharaan/perawatan PABX dan Telephone	2 unit	Dilaksanakan setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
14.	Pemeliharaan/perawatan HT	3 unit	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
15.	Pemeliharaan/perawatan foto camera	1 unit	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
16.	Pemeliharaan/Perawatan CCTV	37 unit	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
17.	Pemeliharaan/Perawatan Mesin Absensi/Hand Key	2 unit	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
18.	Pemeliharaan/perawatan Instalasi Listrik	2 paket	Sesuai dengan kebutuhan
19.	Pemeliharaan/perawatan Jaringan Internet	2 paket	Sesuai dengan kebutuhan
20.	Pemeliharaan/perawatan Instalasi Telepon	2 paket	Sesuai dengan kebutuhan
21.	Pemeliharaan/perawat Proyektor/Infocus	2 unit	Sesuai dengan kebutuhan
22.	Pemeliharaan/perawatan Dispenser	21 unit	Sesuai dengan kebutuhan
23.	Pemeliharaan/perawatan Mesin Pengisap Debu	1 unit	Sesuai dengan kebutuhan

2.3 Renovasi/Rehabilitasi

Dalam rangka meningkatkan kinerja telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

2.3.1. Renovasi/Rehabilitasi

Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melakukan pengaspalan jalan pada area kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang dibantu oleh suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat.

3. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

3.1 Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Tinggi Jakarta berupa:

3.1.1. Lift gedung yang terdiri dari 2 (dua) unit dengan kapasitas 15 orang atau 1.000 kg.

•1.2. Daya Listrik :



- Daya listrik Gedung Depan : 82 KWH;
- Daya listrik Gedung Belakang : 250 KWH.
- 1.3. Genset berkapasitas : 220 KWH.
- 1.4. Sarana Fasilitas Air meliputi :
 - Pompa Penguras Ground Tank : 1 unit;
 - Pompa Transfer Air Bersih : 2 unit;
 - Booster (filter air) : 2 unit;
 - Pompa Air : 2 unit;
 - Ground Tank/Penampung air dilantai dasar Gedung belakang dengan Kapasitas : 160 m³;
- 3.2 Fasilitas Gedung untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran yaitu Hydrant yang didukung oleh :
 - Coky Pam : 1 unit
 - Elektrik Pam : 1 unit
 - Nosle : 7 unit
 - Fire Alarm : 6 unit
 - Alat Pemadam Ringan (APAR) : 27 unit
 - Exhaust Fan : 4 unit
 - Tangga darurat : 1 paket
- 3.3 Alat Komunikasi meliputi :
 - Telepon dan Internet : 2 unit
(Telkom & Powertel)
 - Modem Internet : 2 unit
 - PABX : 2 unit
 - Ekstension Phone : 42 unit
 - Handy Talky : 7 unit
 - CCTV : 37 unit
- 3.4 Pendingin Ruangan terdiri dari :
 - AC Split : 42 unit
 - AC Cassete : 14 unit
 - AC Central : 9 unit
 - AC Standing : 2 unit
- 3.5 Mushola

Fasilitas tempat ibadah seluas 182,25 m² yang dilengkapi dengan tempat wudhu dan kamar mandi terletak di Lantai 5 Gedung Belakang.
- 3.6 Sarana Olahraga.

Fasilitas tempat olahraga/fitness seluas 182,5 m² yang dilengkapi dengan lemari *locker* dan kamar ganti, berada dilantai 5 Gedung Belakang.
- 3.7. Ruang Serbaguna.

Ruang serbaguna terletak di lantai 6 yang dilengkapi dengan:

 1. Panggung;



2. Podium;
3. Sound System;
4. Kamar Ganti;
5. Kursi;
6. Meja;
7. Ruang Kontrol Audio;
8. Gudang;
9. Toilet Pria;
10. Toilet Wanita.

4. Pengadaan

Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melakukan pengadaan yaitu:

4.1. Daftar Pengadaan Barang:

NO	Nama Barang	Volume
1.	P.C	18 Unit
2.	AC Split	16 Unit
3.	AC Standing	2 Unit
4.	Paket CCTV:	
	- Camera CCTV	5 Unit
	- DVR	3 Unit
	- Kabel Coaxial	1 Lot
	- Kabel Data	1 Lot
5.	- Monitor	2 Unit
	Printer	2 Unit
6.	Meubelair :	
	Lemari Besi (Locker 1 Pintu)	24 Unit
	Meja Kerja Kayu (Meja Lipat)	20 Unit
	Kursi Pimpinan	14 Unit
	Tiang Bendera	2 Unit
	Meja Kerja Kayu (Meja Pelantikan)	1 Unit
	Sice	2 Unit
	Meja Kerja Kayu (Meja Sidang)	6 Unit

5. Pengelolaan Administrasi Umum

5.1. Pengelolaan Tata Persuratan

Selama tahun 2022 (dari bulan Januari s/d Desember) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 5.1.1 Surat masuk : 11.906 Surat;
Surat keluar : 7.903 Surat;

5.1.2 Pengiriman berkas perkara banding yang telah diputus Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri se DKI Jakarta sebagai berikut:

- Berkas Perkara Pidana : 360 Berkas;
- Berkas Perkara Tipikor : 48 Berkas;



6. Pengelolaan Teknologi Informasi

6.1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang terkait dengan Pengelolaan Teknologi Informasi meliputi:

- 1.1.1 Komputer
- 1.1.2 Server
- 1.1.3 Jaringan Internet
- 1.1.4 UPS

6.2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang terkait dengan Pengelolaan Teknologi Informasi meliputi:

- 6.2.1. Website Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (www.pt-jakarta.go.id)
- 6.2.2. Intranet Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (intranet.pt-jakarta.go.id)
- 6.2.3. Mail Pengadilan Tinggi Dki Jakarta (info.ptdkijakarta@mail.com)
- 6.2.4. Aplikasi Persuratan Elektronik (192.168.1.2/peradilan)
- 6.2.5. Jadwal Perawatan Barang Milik Negara (<http://jadwalbmn.pt-jakarta.go.id/jadwal.php>)

6.3. Aplikasi

Aplikasi yang terkait dengan instansi Mahkamah Agung maupun instansi di luar Mahkamah Agung, antara lain:

- 6.2.1 Direktori Putusan (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)
- 6.2.2 Data Komunikasi Nasional (Komdanas Mahkamah Agung RI)
- 6.2.3 Sistem Akuntansi Instansi
- 6.2.4 Perawatan Sistem Informasi Barang Milik Negara (BMN)
- 6.2.5 Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER)



BAB V

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Dalam upaya untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan:

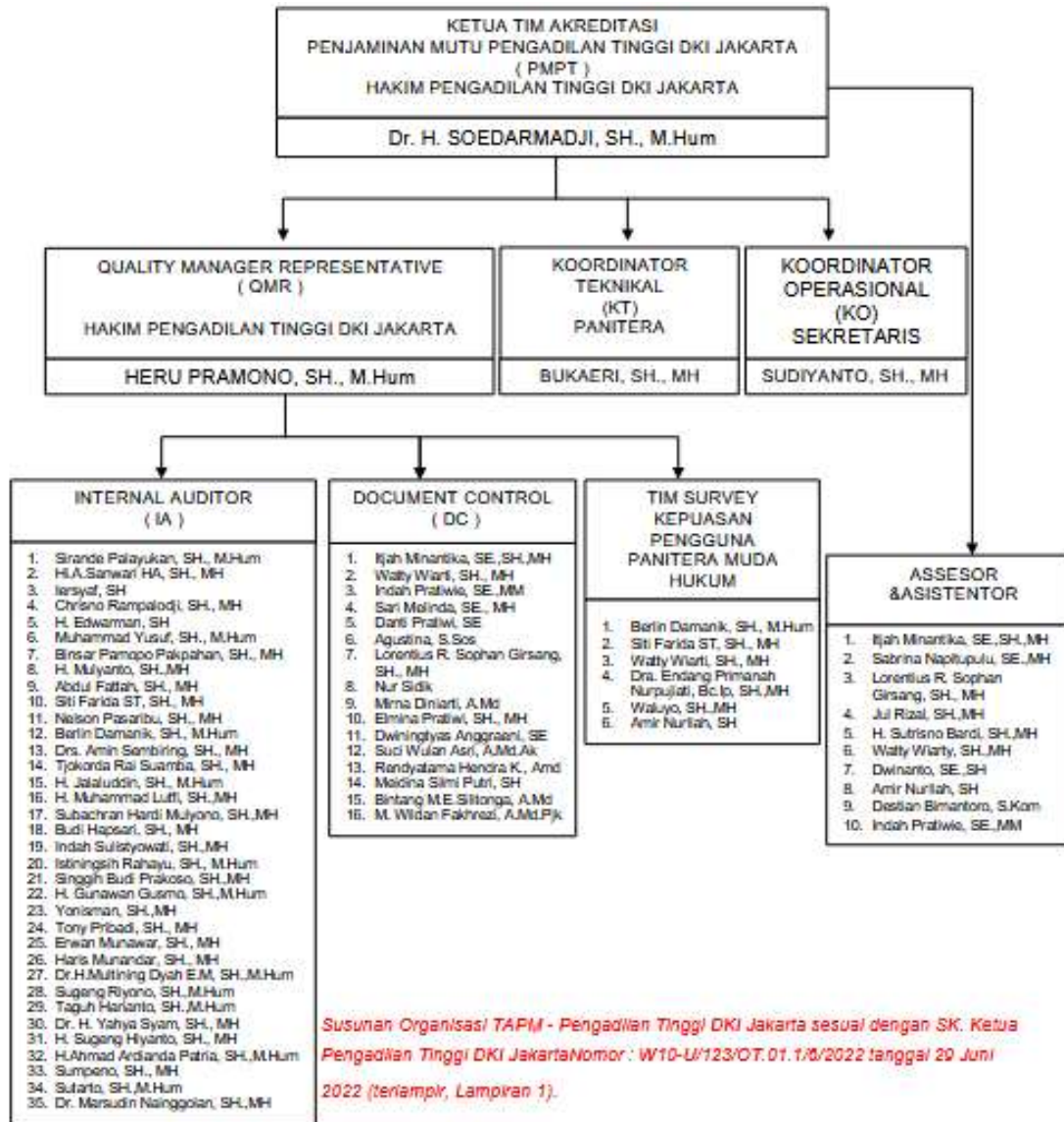
1. Standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
3. Pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa gambar, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam melaksanakan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) telah disusun Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: W10-U/123/OT.01.1/6/2022 Tanggal 29 Juni 2022.



Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melaporkan hasil pelaksanaan akreditasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Adapun ruang lingkup implementasi sistem manajemen mutu standar Akreditasi Penjaminan Mutu meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi unit di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meliputi:

1. Manajemen peradilan.
2. Administrasi perkara.



3. Administrasi persidangan.
4. Administrasi umum.
5. Pelayanan publik.
6. Pengelolaan kas/keuangan.
7. Pengadaan barang dan jasa.
8. Pengawasan.
9. Penanganan pengaduan.

Dalam proses evaluasi pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu dilakukan melalui kegiatan Audit Internal/ Assesment Internal yang dilakukan berdasarkan Kriteria Indonesia court performance excellent meliputi:

Kriteria 1, *Leadersip*, yaitu komitmen manajemen, kebijakan mutu, wewenang dan komunikasi serta tinjauan manajemen.

Kriteria 2, *Strategic Palnning*, yaitu perencanaan sistem manajemen mutu, realisasi produk, analisa dan perbaikan.

Kriteria 3, *Customer Fokus*, yaitu proses terkait dengan pelanggan/pencari keadilan, komunikasi pelanggan, dan produk milik pelanggan. Nilai 200.

Kriteria 4, *Document System*, yaitu persyaratan dokumen, dan pengelolaan dokumen.

Kriteria 5, *Resourece Management*, yaitu sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur dan sumber daya lingkungan.

Kriteria 6, *Process Management* yaitu pengendalian proses.

Kriteria 7, *Performance Results*, yaitu pengawasn dan pengendalian, analisa data dan perbaikan.

Dalam proses evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan lembar Checklist Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan 156 instrumen pertanyaan.

1. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.

a. Pengendalian Dokumen

Dalam rangka pelaksana Akreditasi Penjaminan Mutu telah dilakukan pembaruan terhadap pengendalian dokumen Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu dan Prosedur Mutu yang meliputi Budaya Kerja, Motto, Struktur Penjaminan Mutu, Komitmen Bersama, Rincian Tugas Struktur Penjaminan mutu, Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pada Bulan 30 Juni 2022.



b. Pelaksanaan Audit Internal/ Asesment Internal Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan Audit Internal/ Asesment Internal pada bulan Juli 2022, sebagai berikut :

1. Audit Internal/ Asesment Internal Bulan Juli 2022:

Tanggal Pelaksanaan 5 Juli 2022 dengan Nilai Hasil Audit Internal/ Asesment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu sebesar 897, 50 dengan kategori nilai “A” Excellent.

1. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2022 terhadap pelaksanaan Audit Internal/ Asesmen Internal pada tanggal 5 Juli 2022. Dalam Rapat Tinjauan Manajemen membahas tindak lanjut temuan, umpan balik keluhan pengguna atas survey kepuasan masyarakat terhadap 3 (tiga) unsur terendah, pembahasan Hasil Asesmen Internal dan Eksternal, Kinerja Proses dan Kesesuaian Jasa Pelayanan, Tingkat Pencapaian Sasaran Mutu, Tindak lanjut dari hasil manajemen review sebelumnya, perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen mutu, rekomendasi untuk perbaikan.

1. Pelaksanaan Pendampingan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Se-DKI Jakarta

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan pendampingan Akreditasi Penjaminan Mutu terhadap Pengadilan Negeri Se-DKI Jakarta yang dilaksanakan pada:

No	Pengadilan Negeri	:	Jadwal Pelaksanaan
1	Jakarta Barat	:	19 s.d 20 Desember 2022
2	Jakarta Utara	:	12 Desember 2022
3	Jakarta Timur	:	13 Desember s.d 14 Desember 2022
4	Jakarta Pusat	:	7 s.d 8 Desember 2022
5	Jakarta Selatan	:	9 s.d 10 Desember 2022



1.HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM TERHADAP PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.

Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dilaksanakan tanggal 9 Desember 2022, dengan nilai akreditasi Tahun 2022 sebesar 790. Nilai akreditasi Tahun 2022 naik 27 poin dibandingkan dengan perolehan nilai akreditasi di Tahun 2021.

**SALINAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022
TANGGAL 9 DESEMBER 2022**

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE/ KELAS	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKAT
1 s/d 4	dst.				
5	Pengadilan Tinggi Jakarta	A	763	790	A
6 s/d 32	dst.				
33	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	IA K	710	733	A
34	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	IA K	700	701	A
35	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	IA K	707	709	A
36	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	IA K	700	695	B
37	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	IA K	700	701	A
38 s/d 98	dst.				

Sesuai dengan Keputusan tersebut



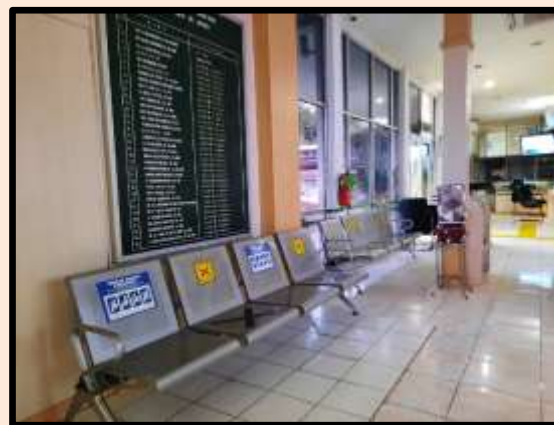
**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

ttd.

BAMBANG MYANTO



B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu

dilaksanakan perubahan sistem pelayanan yang dilakukan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai bentuk reformasi birokrasi dalam proses pelayanan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/ DJU/ SK/HM.02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/ DJU/ SK/HM.02.3/2/2018 Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam upaya pelayanan prima kepada pencari keadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambahkan layanan meja inzage, pojok E-Court, guiding block sebagai jalur menuju ruang sidang, dan fasilitas CCTV yang memonitoring pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

A. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam upaya meningkatkan Pelayanan prima terhadap Pencari Keadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berupaya melakukan inovasi terhadap pelayanan pengadilan :

1. Kebijakan Pembacaan Berkas Perkara Bersama di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : W10-U/ 157/OT.01.3/11/2021. Bahwa mekanisme pembacaan berkas perkara yang dilakukan secara bersama dan serentak secara elektronik dapat mempercepat prosedur penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.



2. Sistem Informasi Permohonan Elektronik Penyempahan Advokat, bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat layanan penyempahan Advokat.

(E-SIPPA)

SISTEM INFORMASI PERMOHONAN ELEKTRONIK PENYUMPAHAN ADVOKAT

Mempermudah dan Mempercepat Layanan
Penyempahan Advokat



3. Elektronik Permohonan Riset (E-Perset) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan permohonan izin riset bagi mahasiswa, Peneliti maupun Akademisi.

E-PERMOHONAN RISET (E-PERSET)



4. Elektronik Perpanjangan Penahanan, bertujuan mempercepat layanan permohonan perpanjangan penahanan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.



E - P E R N A H
ELEKTRONIK PERPANJANGAN PENAHANAN

MEMPERCEPAT LAYANAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN

KINI ADA **E-PERNAH** → PANGKAS WAKTU EFEKTIF MUDAH

5. Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, bertujuan untuk mempermudah proses pengusulan dan memangkas jarak dan waktu sehingga proses administrasi promosi dan mutasi dapat dilakukan secara efektif oleh Pengadilan Negeri Se-DKI Jakarta.

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

DIHADIRKAN UNTUK MENINGKATKAN / PERCEPATAN PROSES PELAKSANAAN PEMBERIAN LAYANAN PENGUSULAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DARI PENGADILAN NEGERI

Pengadilan Negeri Merupakan Sasaran Pengguna Layanan dari SIAP - BIJAK

SIAP – BIJAK Diharapkan akan Menjadi Solusi dan Mempermudah Proses Pengusulan serta Memangkas Jarak dan Waktu sehingga proses administrasi Promosi dan Mutasi Dapat Dilaksanakan Secara Efektif, Efisien dan Ekonomis

6. Sistem Monitoring Banding Elektronik



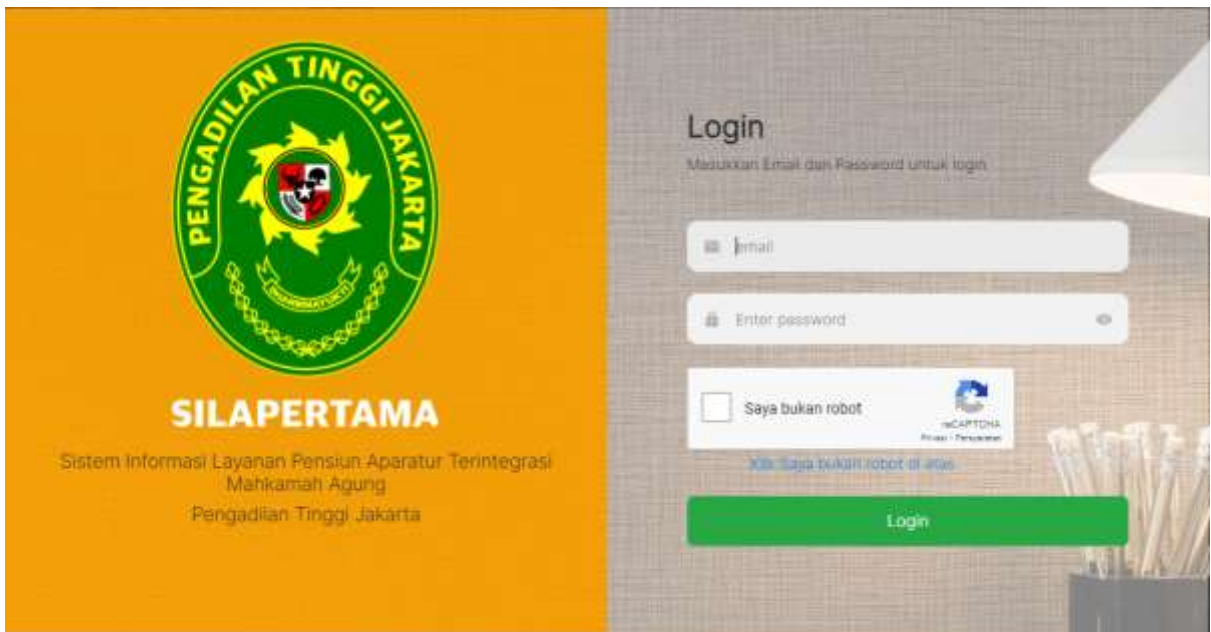
SIMONTOK
Sistem Monitoring Banding Elektronik

Nomor Induk Pegawai

g f e g 6

Masuk

7. Sistem Informasi Layanan Pensiun Aparatur Terintegrasi Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta



8. Sistem Informasi Masyarakat Rentan





BAB VI

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Tatacara dan aturan pengawasan internal oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 080/SK/KMA/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan. I yang dilakukan di lingkungan sendiri.

Jenis Penawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu itu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian, sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

Pengawasan melekat dilakukan oleh Hakim Tinggi yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan pengawasan ini dilakukan terhadap seluruh fungsi yang ada mulai dari Kepaniteraan, Kesekretariatan, Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu sampai dengang Pelaksanaan fungsi layanan yang ada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pelaksanaan pengawasan internal di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama pada tahun 2022 dilakukan setiap bulan sekali.

PENGAWASAN EKSTERNAL

Selain melaksanakan fungsi pengawasan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menerima pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di dalam organisasi Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2022, dengan nilai akreditasi Tahun 2022 sebesar 790. Nilai akreditasi Tahun 2022 naik 27 poin dibandingkan dengan perolehan nilai akreditasi di Tahun 2021.



B. EVALUASI

Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

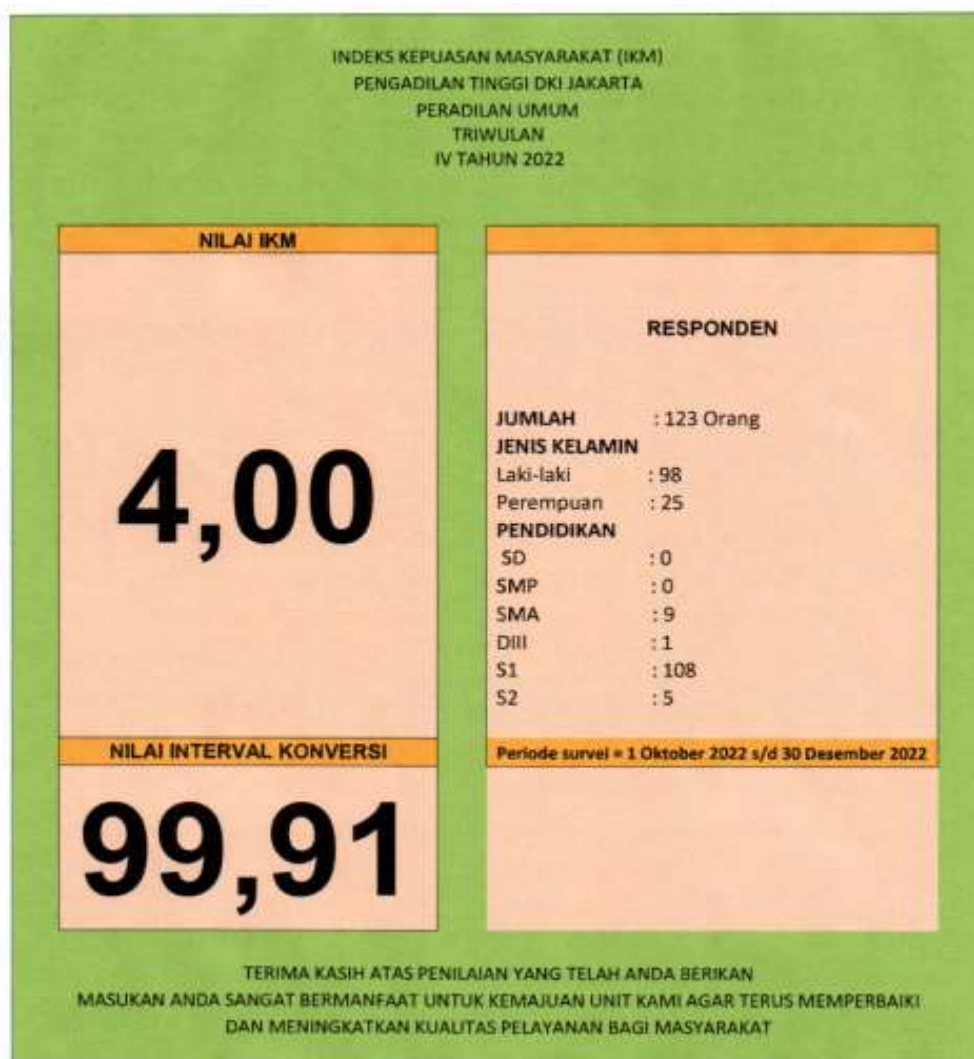
Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mendapat evaluasi / penilaian terhadap hasil kinerja yang dilaksanakan selama satu tahun yaitu:

1. Penilaian SAKIP yang diberikan pada tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI selaku Inspektorat Wilayah bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperoleh nilai sebesar **73,00 (BB) atau Sangat Baik**.
2. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Prestasi Anti Korupsi (IPAK)

Pengukuran IKM dan IPAK merupakan cara yang dilakukan untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan dan kegiatan anti korupsi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Unsur yang dinilai dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

No	Ruang Lingkup Unsur Pelayanan	Nilai Rata Rata
U1	Persyaratan	4,00
U2	Prosedur	3,99
U3	Waktu Pelayanan	3,99
U4	Biaya / Tarif	4,00
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,99
U6	Kompetensi Pelaksana	4,00
U7	Perilaku Pelaksana	4,00
U8	Sarana dan Pra Sarana	3,99
U9	Penanganan Pengaduan, saran dan masuka	4,00



Sedangkan unsur yang dinilai dalam Indeks Prestasi Anti Korupsi (IPAK) adalah:

No	Ruang Lingkup Unsur Pelayanan	Nilai Rata Rata
1	Manipulasi Peraturan	4,00
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
3	Menjual Pengaruh	3,99
4	Transparansi Biaya	4,00
5	Tansaksi Rahasia	3,99
6	Biaya Tambahan	4,00
7	Pemberian Hadiah	3,98
8	Tansparansi Pembayaran	4,00
9	Percaloan	3,99
10	Perbuatan Curang	4,00





BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beserta Pengadilan Negeri Se-DKI Jakarta sebagaimana telah diuraikan di atas tergambar bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta beserta Pengadilan Negeri Se-DKI Jakarta senantiasa berupaya menyelenggarakan court excellenct guna menegakkan hukum dan keadilan agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dengan membuat dan melaksanakan inovasi pelayanan.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Buku II Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sudah disesuaikan dengan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan.

Secara umum capaian penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sepanjang tahun 2022 sebesar:

- 1) Penyelesaian perkara Perdata sebesar 81,33%
- 2) Penyelesaian perkara Pidana sebesar 93,53%
- 3) Penyelesaian perkara Pidana Anak sebesar 100%
- 4) Penyelesaian perkara Tipikor sebesar 81,66%

Selain itu Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik dan tercermin dalam tingkat realisasi anggaran yang tinggi yaitu:

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	DIPA 005.01.2.097467 BUA	48.896.428.000	48.599.097.580	99,39%
2	DIPA 005.03.2.099062 BADILUM	620.350.00	620.291.025	99,99%

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di tahun 2022 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menemui hambatan-hambatan antara lain:

1. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia membuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus ikut menerapkan sistem kerja yang baru.
2. Sistem kerja WFH membuat pelaksanaan administrasi baik teknis maupun nonteknis menjadi kurang maksimal oleh karena itu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Internal untuk memastikan pelaksanaan administrasi tetap berjalan seperti seharusnya. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melaksanakan pengawasan Reguler ke Pengadilan Negeri sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2022.



3. Masih kurang dan makin berkurangnya SDM terutama dalam jabatan pelaksana di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyebabkan menurunnya kinerja terutama untuk pengadministrasian

B. SARAN

1. Sebagai tindakan lanjut dan antisipasi terhadap penyebaran virus Covid-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia membuat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus terus menerapkan sistem kerja Work From Home (WFH), Penyempornan Desinfektan secara rutin, melaksanakan rapid test masal, menyediakan sarana cuci tangan, thermogun, dan spot handsanitizer di beberapa titik.
2. Terkait kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan terus mengajukan permohonan penambahan tenaga pelaksana sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang telah disusun.



PENGADILAN TINGGI
DKI JAKARTA

LAMPIRAN 1 POSBAKUM

PENGADILAN NEGERI SE - WILAYAH HUKUM
DKI JAKARTA



POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A

Dasar Hukum adanya kerjasama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dengan Satuan Kerja Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah:

1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004, jo, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986, jo, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.PAN/11/2018, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Buku I dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5 Tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus menjalin kerjasama dengan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) ADIN INDONESIA.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2022 dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan DIPA Badan Peradilan Umum Nomor : DIPA – 005.03.2.099063/2022, mendapat Pagu Anggaran untuk Posbakum sebesar Rp.64.800.000,- dan Anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.64.800.000,- yang diperuntukkan untuk Pengacara Piket **dengan perincian sebagai berikut:**

NO	BULAN	PAGU	REALISASI
1.	JANUARI	5.400.000	5.400.000
2.	FEBRUARI	5.400.000	5.400.000
3.	MARET	5.400.000	5.400.000
4.	APRIL	5.400.000	5.400.000
5.	MEI	5.400.000	5.400.000

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



6.	JUNI	5.400.000	5.400.000
7.	JULI	5.400.000	5.400.000
8.	AGUSTUS	5.400.000	5.400.000
9.	SEPTEMBER	5.400.000	5.400.000
10.	OKTOBER	5.400.000	5.400.000
11.	NOVEMBER	5.400.000	5.400.000
12.	DESEMBER	5.400.000	5.400.0000
	JUMLAH	64.800.000	64.800.000

SIDANG KELILING

Sidang Keliling adalah Sidang Pengadilan yang dilaksanakan di Luar Gedung Pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke Kantor Pengadilan karena alasan Jarak, Transportasi dan Biaya.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Pada tahun 2022 **Tidak Ada Kegiatan Sidang Keliling.**

PERKARA PRODEO

Perkara Prodeo pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus berjumlah **7 Perkara Prodeo yang di proses**, dimana terdapat 5 Perkara Perdata Gugatan dan 2 Perkara Perdata Gugatan Sederhana.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah Proses Berperkara di Pengadilan Secara Cuma – Cuma dengan dibiayai Negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan Gugatan/ Permohonan berperkara secara Cuma – Cuma (Prodeo) adalah Masyarakat yang Tidak Mampu (Miskin) secara Ekonomi, **dengan melampirkan:** Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Banjar/ Nagari/ Gampong, yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.



**POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS 1A
KHUSUS**

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memperoleh alokasi anggaran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang didalamnya terdapat alokasi anggaran untuk penyediaan Pos Pelayanan Hukum atau POSBAKUM.

Sesuai dengan petikan Dipa Nomor: SP DIPA-005.03.2.099064/2022 Kami mendapatkan alokasi anggaran untuk layanan bantuan hukum perorangan sebesar Rp. 72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*) dan dari jumlah tersebut telah terealisasi seluruhnya yaitu sebesar Rp. 72.000.000,- (*tujuh puluh dua juta rupiah*). Berikut adalah Pagu dan realisasi Anggaran Posbakum:

PAGU	REALISASI	SISA	PERSENTASE
72.000.000	72.000.000	0	100%

❖ **Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mengadakan Sidang Keliling, hal ini karena letak Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh para pencari keadilan. Untuk memaksimalkan pelayanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, semua pelayanan di pusatkan pada meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Selain untuk memudahkan para pencari keadilan dalam mengurus administrasi juga untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak terpuji seperti suap, pungli dan gratifikasi.

❖ **Perkara Prodeo**

Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima Pagu anggaran sebesar Rp. 5.520.000,- (*lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*) dari Dirjen Badan Peradilan Umum untuk program Penyelesaian Perkara di Peradilan Umum melalui pembebasan biaya perkara untuk 6 (enam) perkara. Pendaftaran perkara prodeo sebanyak 4 (empat) perkara Gugatan dengan nomor perkara sebagai berikut:

NO	NOMOR PERKARA	PENDAFTARAN TANGGAL	KETERANGAN
1.	130/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt	22 Februari 2022	Minutasi
2.	129/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt	26 April 2022	Minutasi

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



3.	514/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt	14 Juni 2022	Minutasi
4.	784/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt	5 September 2022	Minutasi

Yang biaya perkara ditanggung dalam anggaran DIPA sebesar Rp 5.520.000,- (*lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*). Realisasinya sebagai berikut:

PAGU	REALISASI	SISA	PERSENTASE
5.520.000	2.100.000	3.420.000	38,04%



POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS

Dasar Hukum adanya kerjasama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Satker Posbakum yaitu: Undang-undang No. : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang No. : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. : Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan, Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berikut Posbakum yang bekerjasama dengan PN Jakarta Selatan:

1. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Jakarta Selatan
2. Lembaga Bantuan Hukum (PBH) Universitas Nasional
3. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UPN "Veteran" Jakarta
4. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat Indonesia
5. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Bhayangkara

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2022 dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Nomor DIPA 03 Kode Satker 400215 mendapat Pagu Anggaran dengan mata anggaran 852.280.000 untuk Posbakum sebesar Rp. 72.000.000 yang diperuntukan untuk Pengacara Piket.

2. SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Sidang Keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun



2022 tidak ada program sidang keliling.

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Tahun 2022 berjumlah 0 (Nol) perkara saja. Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara Cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Tahun 2022 dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Nomor DIPA 03 Kode Satker 400215 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tidak mendapat Pagu yang diperuntukan untuk pembebasan biaya perkara.



POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS 1A KHUSUS

1. Posbakum (Satker yang mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran)

Dalam Melaksanakan Implementasi Undang-undang kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 57 Jo Undang-undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus Tumpal Sagala, S.H., M.H. dan Ketua POSBAKUMADIN Mohammad Ali Syaifudin, SH pada tanggal 4 Januari 2022 telah melakukan MOU (*Memorandum Of Understanding*) dengan Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN sebagai salah satu LBH yang telah mendapat akreditasi A dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara merupakan advokat/sarjana hukum yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang berkerjasama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan posbakum Pengadilan.

Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

- a. Meringankan pembebasan biaya/beban biaya yang harus di tanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- b. Meningkatkan kesempatan kepada masyarakat tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Realisasi Anggaran Posbakum:

Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000	0	100%



Dipindai dengan CamScanner

2. Sidang Keliling / Pelayanan terpadu

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak melakukan kegiatan sidang keliling.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)

Perkara Prodeo (Layanan Pembebasan Biaya Perkara) merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Tahun 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengabulkan Permohonan Perkara Prodeo sejumlah 6 perkara yang di khususkan bagi masyarakat yang tidak mampu berdasarkan peraturan yang berlaku. 4 diantaranya merupakan perkara gugatan dan 2 perkara permohonan.

Berikut ini perkara yang diajukan secara prodeo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak
1	642/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr	28 Sep. 2022	Perceraian	Penggugat:
				Eti Muliani
				Tergugat:
				James Raymond Lawalata
2	641/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr	28 Sep. 2022	Perceraian	Penggugat:
				Sudarni
				Tergugat:
				Sudirman
3	446/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr	14 Jul. 2022	Perceraian	Penggugat:
				Roselina Sitorus
				Tergugat:
				Henry Mangarahon S
4	445/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr	14 Jul. 2022	Ganti Rugi	Penggugat:
				Uiej Siang Nio
				Tergugat:
				1. Pimpinan PT. Persero Kawasan Berikat Nusantara Marunda 2. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jakarta Utara 3. Walikota Jakarta Utara 4. Lurah Cilincing
5	326/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr	29 Jun. 2022	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	Pemohon: Haryati
6	222/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr	10 Mei. 2022	Permohonan Ganti Nama	Pemohon: Djimantara



POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS 1A KHUSUS

Pos bantuan hukum atau biasa dikatakan Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya berupa:

- a. Pemberian informasi konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokad lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus pada tahun 2022 dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.2.099065/2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Anggaran dengan mata anggaran 1049.003 untuk Posbakum sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) yang diperuntukan untuk Layanan Pengacara Piket dengan perhitungan 1 Orang x 3 Jam Layanan x 20 Hari x 12 Bulan. Sesuai dengan MoU antara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus dengan Posbakum, maka Posbakum yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIN seperti tersebut dibawah ini:

❖ **SIDANG KELILING**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2022 **tidak ada** program sidang keliling.

❖ **PERKARA PRODEO**

Pembebasan biaya perkara adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh seluruh badan peradilan di Indonesia karena merupakan program nasional, dan bentuk reformasi bidang hukum sebagaimana yang termuat dalam cetak biru Mahkamah Agung RI. Sebagai dukungan atas program tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus pada tahun 2022 dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.2.099065/2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 5.050.000,- (Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan sudah direalisasikan sebesar Rp 3.540.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 70,10% dengan mata anggaran 1049.003 untuk Prodeo.



1. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS I A KHUSUS TAHUN 2022

1. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Kepangkatan/Golongan dan Pendidikan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berjumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) Orang, terdiri dari:

No	Jabatan	Jumlah SDM
1	Ketua	1 orang
2	Wakil Ketua	1 orang
3	Hakim	34 orang
4	Hakim Ad Hoc TPKOR	8 orang
5	Hakim Ad Hoc PHI	7 orang
6	Panitera	1 orang
7	Panitera Muda Perdata	1 orang
8	Panitera Muda Pidana	1 orang
9	Panitera Muda Khusus Niaga	1 orang
10	Panitera Muda Khusus TPKOR	1 orang
11	Panitera Muda Khusus PHI	1 orang
12	Panitera Muda Hukum	1 orang
13	Panitera Pengganti	46 orang
14	Juru Sita	5 orang
15	Juru Sita Pengganti	29 orang
16	Sekretaris	1 orang
17	Kepala Bagian Umum	1 orang
18	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1 orang
19	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 orang
20	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	1 orang
21	Fungsional	1 orang
22	Pelaksana	7 orang
23	CPNS	7 orang
24	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	96 orang
25	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	11 orang

2. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN DAN GOLONGAN

Jenis Pangkat	Golongan	Jumlah	Persentase
IV/d	Pembina Utama Madya	24 orang	15,48%
IV/c	Pembina Utama Muda	8 orang	5,16%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



IV/b	Pembina Tk. I	3 orang	1,93%
IV/a	Pembina	26 orang	16,77%
III/d	Penata Tk. I	35 orang	22,58%
III/c	Penata	21 orang	13,54%
III/b	Penata Muda Tk. I	8 orang	5,16%
III/a	Penata Muda	9 orang	5,80%
II/d	Pengatur Tk. I	-	-
II/c	Pengatur	6 orang	3,87%
II/b	Pengatur Muda Tk. I	-	-
II/a	Pengatur Muda	-	-
Non Pangkat	-	15	9.60%

3. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
Strata III	2 orang	1,29%
Strata II	80 orang	51,61%
Strata I	61 orang	39,35%
Diploma III	9 orang	5,80%
SMA	3 orang	1,93%
SMP	-	-

B. MUTASI

1. MUTASI HAKIM / PEGAWAI (MASUK)

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Lilieek Prisbawono Adi, SH., MH.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Dr. Henny Trimira Handayani, SH.,MH.	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3.	Dominggus Silaban, SH.,MH.	Hakim	Hakim
4.	Endang Makmun,SH., MH.	Hakim	Hakim
5.	Heneng Pujadi, SH.,MH	Hakim	Hakim
6.	Dennie Arsan Fatrika, S.H.,M.H.	Hakim	Hakim
7.	Dwi Setyo Kuncoro, SH., MH.	Panitera	Panitera
8.	Helmy Fakhri Farhan, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti
9.	Sona Jafisa, SH.,MH	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti
10.	Hadi Hadratulloh, SH	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti
11.	Muhammad Ihsan, SH	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti
12.	Prastiwi Ari Yuniati, SH	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti
13.	Bobi Iskandar Dinata, S.H, M.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



14.	Frans Master Paulus, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti
-----	---------------------------------	--------------------	--------------------

2. MUTASI HAKIM / PEGAWAI (KELUAR)

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Muhammad Damis, SH.MH.	Ketua	Hakim Tinggi
2.	Surachmat, SH.,MH.	Wakil Ketua	Ketua
3.	Anindhita Dwi Saraswati, S.Kom	Pranata Komputer	Pranata Komputer
4.	Mustafa Djafar, S.H., M.H	Panitera	Panitera
5.	Fauzul Hamdi,SH., MH	Hakim	Hakim

C. PROMOSI

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus di tahun 2022 beberapa Pegawai dipromosikan, antara lain:

No	Nama	Jabatan	Usulan Jabatan	Keterangan
1.	Rosmina, SH.MH.	Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - DKI Jakarta	Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu - Bengkulu	
2.	Surachmat, SH.,MH.	Wakil Ketua IA Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	Ketua IA Khusus pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus - Sumatera Selatan	
3.	Muhammad Damis, SH.MH.	Ketua IA Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	
4.	Liliek Prisbawono Adi, SH., MH.	Wakil Ketua IA Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Klas IA Khusus - DKI Jakarta	Ketua IA Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	
5.	Fauzul Hamdi,SH., MH	Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - DKI Jakarta	Hakim Yustisial Klas IA pada Pengadilan Tinggi Medan - Sumatera Utara	
6.	Mustafa Djafar, S.H., M.H	Panitera PN I A Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	Panitera PN I A Khusus pada Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus - Sumatera Utara	
7.	Setia Rachma Suliaty, S.E., M.H	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan PN I A	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



		Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	Laksana PN I A Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	
8.	Irene Rahmi Erdian Adi Hapsari, SH	Jurusita Pengganti PN IA Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	Jurusita PN I A Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	
9.	Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H.	Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal	Panitera Pengganti PN I A Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	
10.	Sona Jafisa, SH.,MH	Panitera Pengganti PN I B pada Pengadilan Negeri Karawang Klas IB - Jawa Barat	Panitera Pengganti PN I A Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	
11.	Hadi Hadratulloh, SH	Panitera Pengganti PN I B pada Pengadilan Negeri Sumedang Klas IB - Jawa Barat	Panitera Pengganti PN I A Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	
12.	Evawani Syabrina,SH.,MH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan PN I A Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan PN I A Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	
13.	Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PN I A Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	Panitera Muda PN I B pada Pengadilan Negeri Cibadak Klas IB - Jawa Barat	
14.	Prastiwi Ari Yuniati, SH	Panitera Pengganti PN I A pada Pengadilan Negeri Sukoharjo Klas IA - Jawa Tengah	Panitera Pengganti PN I A Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	
15.	Bobi Iskandar Dinata, S.H, M.H.	Panitera Pengganti PN I A pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA - Bengkulu	Panitera Pengganti PN I A Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	
16.	Evelyn A.R, SH	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PN IA Khusus pada Pengadilan Negeri	Jurusita Pengganti PN IA Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



		Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta		
17.	Setia Boedi Santoso, SKOM	Pengelola Perkara PN IA Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus – DKI Jakarta	Jurusita Pengganti PN IA Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus - DKI Jakarta	

C. PENSIUN

Daftar Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang memasuki masa Purnabakti (Pensiun) di tahun 2022, yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	TMT
1.	Purwanto.SH.MH	Hakim	1 November 2022
2.	Mulyatiningsih,SH.,MH	Panitera Pengganti	29 April 2022
3.	Rosmina, SH.MH.	Hakim	25 Februari 2022
4.	Siti Agustiaty J.,SH	Panitera Pengganti	01 September 2022
5.	Kuat	Pengadministrasi Perkara	01 Oktober 2022

E. DATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Tahun 2022 yaitu:

NO	JENIS DIKLAT	SDM YANG MENGIKUTI DIKLAT	JABATAN
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. ● H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. ● Duta Baskara, S.H., M.H. ● Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. ● Dulhusin, Sh, Mh ● Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. ● Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. ● Bintang Al, Sh, Mh ● Heru Hanindyo, S.H., S.E., M.H., M.M., L.L.M. ● Yusuf Pranowo, S.H., M.H. ● Buyung Dwikora, S.H., M.H. ● Bambang Sucipto, S.H., M.H. ● Dariyanto, S.H., M.H. ● Muhamad Yusuf, S.H., M.H. ● Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. ● Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. ● Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H. ● H. Bakri, S.H., M.Hum. ● T. Oyong, S.H., M.H. ● Dominggus Silaban, S.H., M.H. 	<p style="text-align: center;">Focus Group Discussion (FGD) untuk seluruh Hakim Niaga guna membahas permasalahan perkara niaga (Kepailitan/PKPU DAN Hak Kekakyaan Intelektual)</p>	Hakim

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



	<ul style="list-style-type: none"> ● Heneng Pujadi, S.H., M.H. ● R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. 		
2	<ul style="list-style-type: none"> ● Kartika Sari Putri, SH ● Deni Welfin, SH ● Humaira Fauziah, A.Md ● Minerva Sahusilawane, A.Md ● Juanita Tiffany Putri, SH ● Yola Pathresya Munthe, A.Md ● Dhiya Yaumilfat, SH 	Pelatihan Dasar CPNS tahun 2022	CPNS
3	Heru Hanindyo, S.H., S.E., M.H., M.M., L.L.M.	Pelatihan bagi Petugas Penegak Hukum dan Patroli Perairan Terkait Pelatihan Combating Transnasional Organized Crime (CTOC) dan Care for Confiscated Wildlife (CCW)	Hakim
4	<ul style="list-style-type: none"> ● Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. ● Heneng Pujadi, S.H., M.H. ● R. Bernadette Samosir, S.H., M.H. 	Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Hakim
5	<ul style="list-style-type: none"> ● Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. ● H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. ● Dulhusin, SH, MH ● Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. ● Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. ● Bintang AL, SH, MH ● Heru Hanindyo, S.H., S.E., M.H., M.M., L.L.M. ● Yusuf Pranowo, S.H., M.H. ● Buyung Dwikora, S.H., M.H. ● Bambang Sucipto, S.H., M.H. ● Dariyanto, S.H., M.H. ● Muhamad Yusuf, S.H., M.H. 	Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) / Niaga	Hakim

2. PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS TAHUN 2022

1. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, memiliki Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



NO	FORMASI	JUMLAH
1	Ketua Pengadilan Negeri	1 Orang
2	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	1 Orang
3	Hakim	30 Orang
4	Panitera	1 Orang
5	Sekretaris	1 Orang
6	Panitera Muda Perdata	1 Orang
7	Panitera Muda Pidana	1 Orang
8	Panitera Muda Hukum	1 Orang
9	Panitera Pengganti	30 Orang
10	Kepala Bagian Umum	1 Orang
11	Kasub. Bag. Tata Usaha dan Keuangan	1 Orang
12	Kasub. Bag. Kepegawaian. Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang
13	Kasub. Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1 Orang
14	Jabatan Fungsional	3 Orang
15	Jurusita	7 Orang
16	Jurusita Pengganti	19 Orang
17	Pelaksana	10 Orang
JUMLAH		110 Orang

Sumber Daya Manusia untuk Teknis Yudisial sebanyak 93 pegawai yang terdiri dari : Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial sebanyak 17 pegawai yang terdiri dari : Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan Staf.

2. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN DAN GOLONGAN

JENIS PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASI
Juru Muda	Golongan I/a	0	0,00%
Juru Muda Tk. I	Golongan I/b	0	0,00%
Juru	Golongan I/c	2	1,82%
Juru Tk. I	Golongan I d	0	0,00%
Pengatur Muda	Golongan II/a	0	0,00%
Pengatur Muda Tk. I	Golongan II/b	0	0,00%
Pengatur	Golongan II/c	3	2,73%
Pengatur Tk. I	Golongan II/d	0	0,00%
Penata Muda	Golongan III/a	16	14,55%
Penata Muda Tk. I	Golongan III/b	5	4,55%
Penata	Golongan III/c	9	8,18%

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



Penata Tk. I	Golongan III/d	26	23,64%
Pembina	Golongan IV/a	15	13,64%
Pembina Tk. I	Golongan IV/b	2	1,82%
Pembina Utama Muda	Golongan IV/c	10	9,09%
Pembina Utama Madya	Golongan IV/d	22	20,00%
Pembina Utama	Golongan IV/e	0	0,00%
Total		110	

3. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN PENDIDIKAN

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
S3	2	2,2%
S2	51	56,1%
S1	44	48,4%
D3	3	3,3%
SMU	8	8,8%
SMP	2	2,2%

B. MUTASI

1. MUTASI HAKIM / PEGAWAI (MASUK)

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	A.Bondan, SH., MH	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat
2	Flowerry Yulidas, SH., MH	Ketua Pengadilan Negeri Sumedang	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
3	Dinahayati Syofyan, SH., MH	Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
4	Sugiyanto, SH., MH	Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi	Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat
5	Sutaji, SH., MH	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat
6	Nurlelawati, SH., MH	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Depok	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat
7	Martin Ginting, SH., MH	Hakim Pengadilan Negeri Surabaya	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
8	Burhanuddin, SH., MH	Panitera Pengadilan Negeri Makassar	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat
9	Gerda Arum Cahyani, SH	-	Calon Pegawai Negeri Sipil Analis Perkara Peradilan
10	Oky Wiratama, SH	-	Calon Pegawai Negeri Sipil Analis Perkara Peradilan
11	Zulhaydar Hamdan, SH	-	Calon Pegawai Negeri Sipil Analis Perkara Peradilan
12	Jeremy Aprilian, SH	-	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



13	Oktarina Permatasari, A.Md.A.B	-	Calon Pegawai Negeri Sipil Analis Perkara Peradilan
14	Berry Jevon Timbul Sihaloho, A.Md B	-	Calon Pegawai Negeri Sipil Analis Perkara Peradilan

2. MUTASI HAKIM / PEGAWAI (KELUAR)

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Setyanto Hermawan, SH., MH	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Ketua Pengadilan Negeri Medan
2	Sri Budi Utami, SH., MH	Panmud Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Panmud Hukum Jakarta Selatan
3	Jara Lumban Raja, SH., MH	Panmud Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang
4	Rahayu Widiastuti, SH., MH	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sukabumi
5	Yuyun Entry, SH., MH	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Subang
6	Wiji Astuti, SH., MH	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang
7	Mujiono, SH., MH	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi
8	Eko Aryanto, SH., MH	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
9	Sohe, SH., MH	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang

C. PROMOSI

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus di tahun 2022 beberapa Pegawai dipromosikan, antara lain:

NO	NAMA	JABATAN	TMT
1	Setyanto Hermawan, SH., MH	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat	4 Maret 2022
2	Jara Lumban Raja, SH., MH	Panitera Muda Hukum	18 Maret 2022
3	Rahayu Widiastuti, SH., MH	Panitera Pengganti	6 Juni 2022
4	Yuyun Entry, SH., MH	Panitera Pengganti	18 November 2022
5	Sohe, SH., MH	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat	5 Januari 2023
6	A. Bondan, SH., MH	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat	29 Desember 2022
7	Evans Shella Widari, SH., MH	Jurusita Pengganti	22 Februari 2022

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



8	Ade Rosadi, SH	Jurusita Pengganti	22 Februari 2022
9	Sasongko Ika Haryadi, SH	Jurusita	28 April 2022
10	Hari Setio Santoso, SH	Jurusita	29 November 2022

D. PENSIUN

Daftar Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus yang memasuki masa Purnabakti (Pensiun) di tahun 2022, yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	TMT PENSIUN
1	Rusmanto, SH	Panitera Pengganti	1 Maret 2022
2	Herry Cahyono, SH	Panitera Pengganti	1 Juni 2022
3	R.A.J. Emmy Sistijanti	Jurusita pengganti	1 Juni 2022
4	Andri Astono	Jurusita Pengganti	1 Juli 2022
5	Hamin Achmadi, SH., MH	Panitera	1 Agustus 2022

E. DATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Tahun 2022 yaitu:

NO	JENIS DIKLAT	SDM YANG MENGIKUTI DIKLAT	JABATAN
1	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Agus Ardiansyah, S. Sos.,MH NIP. 19760827 200112 1 002	Kepala Bagian Umum
2	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Komarudin, SE., M. Si NIP. 19801005 200805 1 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
3	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Mintartiningsih, SS NIP. 19800617 200604 2 035	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
4	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Mansyur, SH NIP. 19831124 200904 1 003	Jurusita
5	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Suhartati Maulina, SH NIP. 19830104 200904 2 006	Jurusita Pengganti
6	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Ari Yohana, SE NIP. 19790914 200904 1 004	Jurusita Pengganti
7	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Hari Setio Santoso, SH NIP. 19810627 200112 1 004	Jurusita Pengganti
8	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Shanti Haryanti, S. Kom NIP. 19820112 201101 2 007	Jurusita Pengganti
9	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Daud Leonardo, SH NIP. 19830303 200312 1 002	Jurusita Pengganti

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



10	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Friskawati S., SH NIP. 19830123 200904 2 008	Jurusita Pengganti
11	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Ade Rosadi, SH NIP. 19821005 200912 1 009	Jurusita Pengganti
12	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Amalia Rezki Palendra, S. Hub. Int NIP. 19960915 202012 2 004	Analisis Tata Laksana
13	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Gerda Arum Cahyani, SH NIP. 19911031 202203 2 005	CPNS – Analisis Perkara Peradilan
14	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Okky Wiratama, SH NIP. 19911029 202203 2 005	CPNS – Analisis Perkara Peradilan
15	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Oktarina Permatasari, A. Md., A.B NIP. 19961014 202203 2 007	CPNS – Pengelola Perkara
16	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Sasongko Ika Haryadi, SH NIP. 19840603 202212 1 003	Jurusita
17	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Maryono, SH NIP. 19771002 200604 1 003	Jurusita
18	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Zulhaydar Hamdan, SH NIP. 19910705 202203 1 004	CPNS - Analisis Perkara Peradilan
19	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Jeremy Aprilian, SH NIP. 19960407 202203 1 011	CPNS - Analisis Perkara Peradilan
20	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Berry Jevon Timbul Sihaloho, A. Md NIP. 19881015 202203 1 003	CPNS – Pengelola Perkara
21	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Abd. Kodir, SH NIP. 19691128 199303 1 002	Jurusita Pengganti
22	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Fitri Noviyanti, S. Sos NIP. 19781114 200912 2 002	Jurusita Pengganti
23	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Evans Shella Widari, SH., MH NIP. 19881018 201101 2 008	Jurusita Pengganti
24	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Uswatun Khasanah, SH NIP. 19850308 201212 2 001	Jurusita Pengganti
25	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Raka Pramudya Bakti, SH NIP. 19900602 201212 2 001	Jurusita Pengganti
26	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Rangga Jaya Saputra, SH NIP. 19870108 200912 1 004	Jurusita
27	Kegiatan Pemetaan dan Penilaian Potensi Kompetensi PNS (<i>Talent Pool</i>)	Tri Handayani, A. Md NIP. 19811030 200904 2 004	Jurusita Pengganti

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



28	TOT (Training of Trainer) Perlakuan RPL untuk Menampung Biaya Prosep Lingkup Satuan Kerja Mahkamah Agung pada LPJ Bendahara	Fitri Noviyanti, S. Sos NIP. 19781124 200912 2 002	Jurusita Pengganti
29	Latihan Dasar CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022	Gerda Arum Cahyani, SH NIP. 19911031 202203 2 005	CPNS – Analisis Perkara Peradilan
30	Latihan Dasar CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022	Oky Wiratama, SH NIP. 19911029 202203 2 005	CPNS – Analisis Perkara Peradilan
31	Latihan Dasar CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022	Jeremy Aprilian, SH NIP. 19960407 202203 1 011	CPNS - Analisis Perkara Peradilan
32	Latihan Dasar CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022	Zulhaydar Hamdan, SH NIP. 19910705 202203 1 004	CPNS - Analisis Perkara Peradilan
33	Latihan Dasar CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022	Berry Jevon Timbul Sihaloho, A. Md NIP. 19881015 202203 1 003	CPNS – Pengelola Perkara
34	Latihan Dasar CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2022	Oktarina Permatasari, A. Md., A.B NIP. 19961014 202203 2 007	CPNS – Pengelola Perkara

3. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS I A KHUSUS TAHUN 2022

1. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki jumlah Sumber Daya Manusia yang berjumlah 118 Pegawai, Pegawai yang belum terdaftar di aplikasi SIKEP sebanyak 0 orang (Tidak ada), pegawai yang Meninggal sebanyak 2 orang, sehingga jumlah yang ada saat ini berjumlah 118 orang.

No	Jabatan	Jumlah SDM
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	35
4.	Panitera	1
5.	Panitera Muda Perdata	1
6.	Panitera Muda Pidana	1
7.	Panitera Muda Hukum	1
8.	Panitera Pengganti	36
9.	Sekretaris	1
10.	Kepala Bagian Umum	1
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Keuangan	1

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan	1
13.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala	1
14.	Jurusita	7
15.	Jurusita Pengganti	15
16.	Pustakawan	1
17.	Pranata Komputer	1
18.	Arsiparis	1
19.	Pelaksana	11
JUMLAH		118

2. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN DAN GOLONGAN

Jenis Pangkat	Golongan	Jumlah	Persentase
4E	Pembina Utama	0	0
4D	Pembina Utama Madya	18	15.25
4C	Pembina Utama Muda	12	10.17
4B	Pembina TK.I	6	5.08
4A	Pembina	18	15.25
3D	Penata TK. I	30	25.42
3C	Penata	11	9.32
3B	Penata Muda TK. I	8	6.78
3A	Penata Muda	9	7.63
2D	Pengatur TK.I	2	1.69
2C	Pengatur	4	3.89
2B	Pengatur Muda TK.I	0	0
2A	Pengatur Muda	0	0
JUMLAH		118	100

3. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
Strata III (S3)	0	0
Strata II (S2)	65	55.08
Strata I (S1)	40	33.90
Diploma III (D3)	4	3.39
SMA	9	7.63
SMP	0	0
JUMLAH	118	100



B. MUTASI

1. MUTASI HAKIM / PEGAWAI (MASUK)

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H.,M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
2	Wahyu Iman Santoso, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Denpasar	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
3	Hendra Utama Sutardodo, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Medan	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
4	Samuel Ginting, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Ketapang	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
5	Raden Ari Muladi, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Lamongan	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
6	Agus Tjahjo Mahendra, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
7	Hendra Yuristiawan, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
8	Muhammad Ramdes, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
9	Singgih Wahono, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kudus	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
10	Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
11	Delta Tamtama, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
12	Afrizal Hady, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
13	Eddi Sangapta Sinuhaji, S.H.,M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Medan	Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
14	Sri Budi Utami, S.H.,M.H.	Panitera Muda Pidana Jakarta Barat	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
15	Effi Sugiati, S.H.,M.H.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bogor	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



2. MUTASI HAKIM / PEGAWAI (KELUAR)

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Mirwansyah, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat

C. PROMOSI

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus di tahun 2022 beberapa Pegawai dipromosikan, antara lain:

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	H. Bambang Myanto, S.H.,M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
2	Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3	Suharno, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya
4	Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh
5	Muhammad Arif Nuryanta, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
6	Nazar Effriandi, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon
7	Toto Ridarto, S.H.,M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
8	Marten Teny Pietersz, S.Sos.,S.H.,M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Panitera Pengadilan Tinggi Manado
9	Sutaji, S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat
10	H. Suyatno, S.H.,M.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
11	Husna Machmud, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Cikarang
12	Muratno, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Panitera Pidana Pengadilan Negeri Karawang
13	Dwi Ira Marwanti, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Panitera Perdata Pengadilan Negeri Cikarang

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



D. PENSIUN

Daftar Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memasuki masa Purnabakti (Pensiun) di tahun 2022, yaitu :

NO	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1	Mokhammad Fuad, S.H.	Jurusita	1 Maret 2022
2	Dewi Resmiati, S.H.	Panitera Pengganti	1 Mei 2022
3	Warsuti, S.H.	Panitera Pengganti	1 September 2022
4.	Irwan Gaos	Pranata barang dan jasa	1 Desember 2022

▪ Pegawai yang meninggal

NO	Nama	Jabatan	TMT Meninggal
1	Fatoni, S.H.	Panitera Pengganti	6 November 2022
2	Eli Yunani, S.H.	Panitera Pengganti	24 Desember 2022

▪ Data Diklat (SDM Teknis/Non-Teknis yang telah mengikuti Diklat)

NO	JENIS DIKLAT	SDM YANG MENGIKUTI DIKLAT	JABATAN
1	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia	1. Bertha Titik Setyowati, S.H.,M.H. 2. Abdul Shomad, S.H.,M.H. 3. Aprisno, S.H.,M.H. 4. Adelina Hutabarat, S.H.,M.H. 5. Bagus Setyawan Eko, S.H.,M.H. 6. Anthomi Kusairi, S.H.,M.H. 7. Erna Sulistyowati, S.H.,M.H. 8. Fatoni, S.H. 9. Eli Yunani, S.H. 10.Hardianto Wibowo, S.H.,M.H. 11.Dri Ira Marwanti, S.H.,M.H. 12.Eva Trisnawati, S.H.,M.H. 13.IiS Rohmawati, S.H.,M.H. 14.Hesti Febrianti, S.H. 15.Mami Sulatmi, S.H. 16.Komar, S.H. 17.Puji Asih, S.H.,M.H. 18.Muhammad Hoesna, S.H.,M.H. 19.Muratno, S.H.,M.H. 20.Matius Buntu Situru, S.H.,M.H. 21.Mirwansyah, S.H. 22.Melda Renny Tanti, S.H.,M.H. 23.Octa Andrianto, S.H.,M.H. 24.Nana, S.H. 25.Mory Sensy Siregar, S.H.	1. Panitera Pengganti 2. Panitera Pengganti 3. Panitera Pengganti 4. Panitera Pengganti 5. Panitera Pengganti 6. Panitera Pengganti 7. Panitera Pengganti 8. Panitera Pengganti 9. Panitera Pengganti 10. Panitera Pengganti 11. Panitera Pengganti 12. Panitera Pengganti 13. Panitera Pengganti 14. Panitera Pengganti 15. Panitera Pengganti 16. Panitera Pengganti 17. Panitera Pengganti 18. Panitera Pengganti 19. Panitera Pengganti 20. Panitera Pengganti 21. Panitera Pengganti 22. Panitera Pengganti 23. Panitera Pengganti 24. Panitera Pengganti 25. Panitera Pengganti

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



		26.Subarkah, S.H.,M.H. 27.Sri Taslihiyah, S.H. 28.Sri Gusliawatni, S.H. 29.Sarni, S.H.,M.H. 30.Yusuf Supriatna, S.H. 31.Yunita Ellyana, S.H. 32.Syafrinaini, S.H.,M.H. 33.Wijatmoko, S.H. 34.Yustitin, S.H. 35.Syaripudin, S.H. 36.Edi Sarwono, S.H.,M.H. 37.Sri Budi Utami, S.H.,M.H.	26. Panitera Pengganti 27. Panitera Pengganti 28. Panitera Pengganti 29. Panitera Pengganti 30. Panitera Pengganti 31. Panitera Pengganti 32. Panitera Pengganti 33. Panitera Pengganti 34. Panitera Pengganti 35. Panitera Pengganti 36. Panmud Pidana 37. Panmud Hukum
2	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita / Jurusita Pengganti	Erman Arifin, S.H.	Jurusita
3	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Perdata	Sutan Andaran, S.H.,M.H.	Jurusita
4	Pelatihan Kepemimpinan Pegawai (PKP)	1. Eri Tanti Yulianti, S.H. 2. Nova Rizky, S.E.,M.H.	1. Kasub Kepegawaian 2. Kasub TU & Keu
5	Pelatihan Singkat dan Lokakarya	Abu Hanifah, S.H.,M.H.	Hakim
6	Latsar CPNS Secara Blended Learning Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	1. Rahmi Fatah, SH 2. Izmi Aziizah, A.Md	1. Analis Perkara Peradilan 2. Pengelola Perkara
7	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pajak	Jarot Widiyatmono, S.H.,M.H.	Hakim
8	Pelatihan Online Penyusunan SPIP	Wiwiek Widorinie, S.E.,M.M.	Kepala Bagian Umum
9	Pelatihan Online Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Wiwiek Widorinie, S.E.,M.M.	Kepala Bagian Umum
10	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim	Hendra Utama Sutardodo, S.H.,M.H.	Hakim



4. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus memiliki jumlah Sumber Daya Manusia berjumlah **151** (seratus lima puluh satu) terdiri dari:

No	Jabatan	Jumlah SDM
1.	Ketua	1 Orang
2.	Wakil Ketua	1 Orang
3.	Hakim	26 Orang
4.	Hakim Ad Hoc	3 Orang
5.	Panitera	1 Orang
6.	Panitera Muda Perdata	1 Orang
7.	Panitera Muda Pidana	1 Orang
8.	Panitera Muda Hukum	1 Orang
9.	Panitera Muda Khusus Perikanan	1 Orang
10.	Panitera Pengganti	27 Orang
11.	Jurusita	3 Orang
12.	Jurusita Pengganti	10 Orang
13.	Sekretaris	1 Orang
14.	Kepala Bagian Umum	1 Orang
15.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	1 Orang
16.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	1 Orang
18.	Pelaksana	12 Orang
19.	Honorer DIPA	37 Orang
20.	Tenaga Sukarela	24 Orang

a. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Golongan	Jenis Pangkat	Jumlah	Keterangan
1.	IV/e	Pembina Utama	-	-
2.	IV/d	Pembina Utama Madya	16	-
3.	IV/c	Pembina Utama Muda	9	-
4.	IV /b	Pembina Tk.I	3	-
5.	IV/a	Pembina	11	-
6.	III/d	Penata Tk. I	24	-
7.	III/c	Penata	10	-
8.	III/b	Penata Muda Tk. I	2	-
9.	III/a	Penata Muda	2	-
10.	II/d	Pengatur Tk. I	1	-
11.	II/c	Pengatur	6	-
12.	II/b	Pengatur Muda Tk. I	1	-
13.	II/a	Pengatur Muda	1	-
14.	I/d	Juru Tk. I	-	-
15.	I/c	Juru	3	-

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



16	I/b	Juru Muda Tk. I	-	-
17.	I/a	Juru Muda	-	-

b. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata III	-	
2.	Strata II	43 Orang	
3.	Strata I	33 Orang	
4.	Diploma III	3 Orang	
5.	SMA	9 Orang	
6	SMP	3 Orang	
7.	SD	1 Orang	

1. MUTASI HAKIM / PEGAWAI (MASUK)

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Aloysius Priharnoti Bayuaji, S.H., M.H.	Hakim PN Semarang	Hakim PN Jakarta Utara
2	Mahmuriadin, S.H., M.H.	Hakim PN Tangerang	Hakim PN Jakarta Utara
3	Suratno, S.H.	Hakim PN Makassar	Hakim PN Jakarta Utara
4	Deny Riswanto, S.H., M.H.	Ketua PN Trenggalek	Hakim PN Jakarta Utara
5	Dian Erdianto, S.H., M.H.	Ketua PN Purbalingga	Hakim PN Jakarta Utara
6	Gede Sunarjana, S.H., M.H.	Hakim PN Lumajang	Hakim PN Jakarta Utara
7	Suharis, S.H., M.M.	Panitera PN Sidoarjo	Panitera PN Jakarta Utara

II. MUTASI HAKIM / PEGAWAI (KELUAR)

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Taufan Mandala, S.H., M.Hum.	Hakim PN Jakarta Utara	Hakim PN Surabaya
2	Tiares Sirait, S.H., M.H.	Hakim PN Jakarta Utara	Hakim PN Medan
3	Djuyamto, S.H.	Hakim PN Jakarta Utara	Hakim PN Jakarta Selatan
4	Agus Darawnata, S.H.	Hakim PN Jakarta Utara	Hakim PN Surakarta
5	Muhammad Ihsan, S.H.	Panitera Pengganti PN Jakarta Utara	Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat

III. PROMOSI HAKIM / PEGAWAI

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Abdul Wahib, S.H., M.H.	Hakim PN Jakarta Utara	Hakim Tinggi PT Palangkaraya
2	Resya, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PN Jakarta Utara	Panitera Muda Pidana PN Pandeglang

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



3	H. Winarno, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Jakarta Utara	Ketua PN Sidoarjo
4	Agung Purbantoro, S.H., M.H.	Hakim PN Jakarta Utara	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo

IV. PENSIUN HAKIM / PEGAWAI

No	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1.	YANWITRA, S.H., M.H.	Panitera	01 Februari 2022
2.	HARAN TARIGAN, S.H.	Hakim	01 Maret 2022
3.	WAHMUADI, S.H.	Panitera Pengganti	01 Maret 2022
4.	IMAM SUWANDI	Pengadministrasi Register Perkara	01 eptember 2022

V. DIKLAT SUMBER DAYA MANUSIA

No	Jenis Diklat	SDM Yang Mengikuti Diklat	Jabatan
1	Pelatihan <i>Online</i> Literasi Digital di Pengadilan bagi CPNS dari Tempat Tugas Tahun 2022	Rachmat Saputra, A.Md.	Pengadiministrasi Register Perkara
2	Pelatihan <i>Online</i> Literasi Digital di Pengadilan bagi CPNS dari Tempat Tugas Tahun 2022	CORNELIUS SIDABUTAR, A.Md.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana
3	Pelatihan <i>Online</i> Literasi Digital di Pengadilan bagi CPNS dari Tempat Tugas Tahun 2022	ZAHRATUL HUSNA, S.E.	Verifikator Keuangan
4	Latsar CPNS <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	LATANSA BELA DINNA, A.Md.	Pengelola Perkara
5	Latsar CPNS <i>Blended Learning</i> Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Tahun 2022	IMA FATIMAH, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
6.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bagi Hakim Peradilan Umum	DENY RISWANTO, S.H., M.H.	Hakim Madya Muda
7	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahun 2022	DENY RISWANTO, S.H., M.H.	Hakim Madya Muda
8.	Pelatihan Online Audit For Non-Auditor Angkatan 1 s.d. 4 dari	DENY RISWANTO, S.H., M.H.	Hakim Madya Muda

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



	Tempat Tugas Tahun 2022		
9.	<i>E-Learning</i> Bendahara Penerima Angkatan V Tahun 2022	CORNELIUS SIDABUTAR, A.Md.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana
10	Pelatihan Online Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Angkatan 4 dari Tempat Tugas Tahun 2022	DENY RISWANTO, S.H., M.H.	Hakim Madya Muda

5. PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

Sumber daya manusia yaitu salah satu faktor yang penting dan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan penentu perkembangan instansi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan dalam sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuannya.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memiliki jumlah Sumber Daya Manusia yang berjumlah 110 orang terdiri dari:

I. Komposisi Sumberdaya Manusia Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan

A. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

NO	JENIS PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	IV/e	Pembina Utama	0	0%
2	IV/d	Pembina Utama Madya	12	11%
3	IV/c	Pembina Utama Muda	13	12%
4	IV/b	Pembina Tingkat I	3	3%
5	IV/a	Pembina	15	14%
6	III/d	Penata Tingkat I	23	22%
7	III/c	Penata	14	13%
8	III/b	Penata Muda Tingkat I	11	10%
9	III/a	Penata Muda	8	8%
10	II/c	Pengatur	7	7%
JUMLAH			106	100%

B. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	PASCASARJANA	45	42%
2	STRATA I	47	44%
3	DIPLOMA III	5	8%
4	SLTA	9	5%
JUMLAH		106	100%



II. MUTASI

a. Mutasi Hakim / Pegawai (*Masuk*)

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	AIMAFNI ARLI, S.H., M.H	HAKIM PN MEDAN	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
2	RIYONO, S.H., M.H.	KETUA PN SALATIGA	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
3	AGUS HAMZAH, S.H., M.H.	KETUA PN SUBANG	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
4	H. SUWARSA HIDAYAT, S.H., M.HUM.	HAKIM PN BEKASI	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
5	SAID HUSEIN, SH., MH	HAKIM PN PALEMBANG	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
6	BAMBANG JOKO WINARNO, SH., MH	HAKIM PN MEDAN	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
7	TEGUH BERNOWO, S.H., M.H.	SEKRETARIS PT AMBON	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
8	CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.	KETUA PN NGANJUK	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
9	DONY DORTMUND, S.H., M.H.	KETUA PN PARIAMAN	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
10	HONGKUN OTOH, SH., MH	WAKIL PN SIDOARJO	HAKIM PN JAKARTA TIMUR
11	MARLIYUS MS. SH., MH	WAKIL PN MEDAN	HAKIM PN JAKARTA TIMUR

b. Mutasi Hakim / Pegawai (*Keluar*)

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	SUTIKNA, SH.,MH	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM PN SURAKARTA
2	MUARIF, SH	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM PN SEMARANG



III. PROMOSI

1. Promosi Hakim / Pegawai

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	RUDI SUPARMONO, SH.,MH	WAKIL PN JAKARTA TIMUR	KETUA PN SURABAYA
2	LINGGA SETIAWAN, SH., MH	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	WAKIL KETUA PN TANJUNG KARANG
3	ARHAM NAWIR, SH.,MH	PANITERA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	PANMUD PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PN DENPASAR
4	VICTOR TOGI RUMAHORBO, S.H., M.H.	WAKIL PN JAKARTA TIMUR	KETUA PN MEDAN
5	TITO SUHUD, SH., MH	KETUA PN JAKARTA TIMUR	HAKIM TINGGI PT DENPADAR
6	ANAK AGUNG AYU CHOMALEA DEWI, SH	JURUSITA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	PANITERA PENGGANTI PN SINGARAJA
7	HENRYAN LEKSOWIBOWO, SH., MH	JURUSITA PENGGANTI PN JAKARTA TIMUR	PANITERA PENGGANTI PN PURWAKARTA
8	RIANA BR POHAN, SH., MH	HAKIM PN JAKARTA TIMUR	HAKIM TINGGI PT MEDAN
9	SYAHMISAR, SH., MH	PANITERA MUDA PERDATA PN JAKARTA TIMUR	PANITERA PN PURWOREJO

IV. PENSIUN

1. Pensiun Hakim / Pegawai

NO	NAMA	JABATAN	TMT PENSIUN
1	AHMAD HAKIR, SH.,MH	SEKRETARIS	01 AGUSTUS 2022
2	DASWATI, SH.,MH	PANITERA PENGGANTI	01 AGUSTUS 2022
3	HALOMOAN ERVIN FRANS SIHALOHO, SH, MH	HAKIM	01 SEPTEMBER 2022
4	SUMINARMI, SH	PANITERA PENGGANTI	01 OKTOBER 2022
5	DARMA SETRI	PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA	01 AGUSTUS 2022
6	HJ. SULISTIANINGSIH, SH	PANITERA PENGGANTI	01 APRIL 2022
7	DIDIK IKA KARANA	JURUSITA	01 APRIL 2022

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



V. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

a. Data Diklat Sumber Daya Manusia

NO	JENIS DIKLAT	SDM YANG MENGIKUTI DIKLAT	JABATAN
1	PELATIHAN SINGKAT PANITERA PENGGANTI 4 PERADILAN SELURUH INDONESIA I	<ol style="list-style-type: none"> BAMBANG SIRAJUDDIN, S.H., M.H. AGUS SARDJIANTO, S.KOM., S.H., M.H. BENEDICTUS HAPSORO SURYA WIJAYA, S.H., M.H. BUTET MARIANI RUTUA ELISABETH, S.H., M.H. AINI YATURROHMAH, S.H. ASIH MUHSIROH, S.H. 	<ol style="list-style-type: none"> PANITERA MUDA PIDANA PANITERA MUDA PERDATA PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI
2	PELATIHAN SINGKAT PANITERA PENGGANTI 4 PERADILAN SELURUH INDONESIA II	<ol style="list-style-type: none"> ERNI, S.H. FITRI WAHYUNI ARIGAYO, S.H., M.H. 	<ol style="list-style-type: none"> PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI
3	PELATIHAN SINGKAT PANITERA PENGGANTI 4 PERADILAN SELURUH INDONESIA III	<ol style="list-style-type: none"> MARLIN SIMANJUNTAK, S.H., M.H. HERMINA MASTARIDA, S.H., M.H. IKA MARDIKANINGSIH, S.H. KASMAWATI, S.H., M.H. HELENI FAERIATI, S.H. LUKMAN HAKIM, S.H. IRMA ROSMAWATI, S.H. 	<ol style="list-style-type: none"> PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI PANITERA PENGGANTI
4	PELATIHAN DAN PEMBELAJARAN TERKAIT KONSEP DASAR CLOUD COMPUTING	SUCI INDAH DIANNISA EKTA, A.MD	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN
5	PELATIHAN TEKNIS YUDISIAL JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI PERADILAN UMUM SELURUH INDONESIA	WICAKSONO YULI ANGGORO, SH	JURUSITA
	PELATIHAN TEKNIS YUDISIAL EKSEKUSI PERDATA BAGI PANITERA MUDA PERDATA DAN	SYAHMISAR, S.H., M.H.	PANITERA MUDA PERDATA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



NO	JENIS DIKLAT	SDM YANG MENGIKUTI DIKLAT	JABATAN
	JURUSITA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG, JAKARTA, BANTEN DAN YOGYAKARTA TAHUN 2022 PELATIHAN TEKNIS YUDISIAL EKSEKUSI PERDATA BAGI PANITERA MUDA PERDATA DAN JURUSITA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG, JAKARTA, BANTEN DAN YOGYAKARTA TAHUN 2022		
6	LATSAR CPNS SECARA BLENDED LEARNING KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2022	1. MUHAMMAD KAFRI PRATAMA, S.H. 2. SYEH ARIES FAUZAN, SH 3. FAJAR RAMADHAN, S.H. 4. INDAH MAYANGSARI, A.MD. 5. REZKY AMALIAH, A.MD 6. BELLA RUSANIA TISAN LIE, A.MD.	1. ANALIS PERKARA PERADILAN 2. ANALIS PERKARA PERADILAN 3. ANALIS PERKARA PERADILAN 4. PENGELOLA PERKARA 5. PENGELOLA PERKARA 6. PENGELOLA PERKARA
7	PELATIHAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)	1. NOVIAN SAPUTRA, S.H., M.HUM. 2. NYOMAN SUHARTA, S.H. 3. WIYONO, S.H.	1. HAKIM 2. HAKIM 3. HAKIM
8	PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM	BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., M.H.	HAKIM
9	PELATIHAN SERTIFIKASI HAKIM PERSAINGAN USAHA BAGI HAKIM PERADILAN UMUM SELURUH INDONESIA	BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., M.H.	HAKIM

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



NO	JENIS DIKLAT	SDM YANG MENGIKUTI DIKLAT	JABATAN
	PELATIHAN SINGKAT PANITERA PENGGANTI 4 PERADILAN SELURUH INDONESIA I	1. BAMBANG SIRAJUDDIN, S.H., M.H. 2. AGUS SARDJIANTO, S.KOM., S.H., M.H. 3. BENEDICTUS HAPSORO SURYA WIJAYA, S.H., M.H. 4. BUTET MARIANI RUTUA ELISABETH, S.H., M.H. 5. AINI YATURROHMAH, S.H. 6. ASIH MUHSIROH, S.H.	1. PANITERA MUDA PIDANA 2. PANITERA MUDA PERDATA 3. PANITERA PENGGANTI 4. PANITERA PENGGANTI 5. PANITERA PENGGANTI 6. PANITERA PENGGANTI
10	PELATIHAN SINGKAT PANITERA PENGGANTI 4 PERADILAN SELURUH INDONESIA II	1. ERNI, S.H. 2. FITRI WAHYUNI ARIGAYO, S.H., M.H.	1. PANITERA PENGGANTI 2. PANITERA PENGGANTI



PENGADILAN TINGGI
DKI JAKARTA

LAMPIRAN 3 PENGELOLA KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI SE - WILAYAH HUKUM
DKI JAKARTA



**PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A
KHUSUS**

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun 2022 ini disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tujuan memberikan informasi mengenai rincian pertanggungjawaban keuangan yang memadai.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2/097471/2022, Badan Urusan Administrasi Sebagai berikut:

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

- a. Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai mendapat Anggaran sebesar Rp.26.089.176.000,- (dua puluh enam milyar delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Realisasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut :

No	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Gaji Pokok PNS	7.616.214.000	7.606.484.560	9.729.440	99.87
2	Pembulatan gaji PNS	103.000	99.613	3.387	96.71
3	Tunjangan Suami/ Istri PNS	583906.000	578.870.468	5.035.532	99.14
4	Tunjangan Anak PNS	184.213.000	183.513.504	699.496	99.62
5	Tunjangan Struktural PNS	67.250.000	64.750.000	2.500.000	99.28
6	Tunjangan Fungsional PNS	10.339.510.000	10.337.010.000	2.500.000	99.98
7	Tunjangan PPh PNS	1.585.106.000	1.561.544.408	23.561.592	98.51
8	Tunjangan Beras PNS	405.176.000	404.176.020	999.980	99.75
9	Uang Makan PNS	1.220.423.000	1.195.905.000	24.518.000	97.99
10	Tunjangan Umum PNS	40.825.000	40.825.000	0	100
11	Tunjangan Hakim Ad Hoc	4.046.450.000	4.046.450.000	0	100

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



JUMLAH	26.089.176.000	26.019.628.573	69.547.427	99.73
---------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------

- b. Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, mendapat anggaran sebesar Rp.17.689.518.000,- (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah). Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebagai berikut :

No	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Kebutuhan sehari-hari Perkantoran	6.966.188.000	6.761.727.600	204.460.440	97.06
2	Langganan Daya dan Jasa	2.519.581.000	2.399.296.652	120.284.348	95.23
3	Pemeliharaan Kantor	6.194.242.000	5.387.175.001	807.066.999	86.97
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	323.935.000	308.574.000	15.361.000	95.26
5	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah	14.200.000	11.838.500	2.361.500	83.37
6	Rapat Koordinasi Internal	57.900.000	12.469.000	45.431.000	21,54
7	Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama	133.240.000	86.529.100	46.710.900	64,94
8	Konsultasi ke KPPN/ Kanwil/ KPKNL	21.000.000	17.550.000	3.450.000	83,57
9	Penanganan Pandemi Covid-19	19.592.000	15.501.650	4.090.350	79.12
	JUMLAH	17.689.518.000	16.325.911.503	1.363.606.497	92.29

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Mendapat anggaran sebesar Rp.357.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Belanja Modal Peralatan Mesin	357.000.000	356.206.300	793.700	99,78
	JUMLAH	357.000.000	356.206.300	793.700	99,78

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



Dari Program-program tersebut berikut rekapitulasi Realisasi Nomor DIPA: 005.01.2/097471/2022 Badan Urusan Administrasi :

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	43.786.694.000	42.353.530.076	1.433.163.924	96.73
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	357.000.000	356.206.300	793.700	99,78
JUMLAH		44.143.694.000	42.709.736.376	1.433.957.624	96.75

III. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Nomor DIPA 005.03.2/099063/2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Definitif sebesar Rp.1.204.658.000,- (Satu milyar dua ratus empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Koordinasi	34.000.000	13.237.500	20.762.500	38.93
2	Perkara Hukum Perseorangan	1.101.258.000	1.073.616.100	27.641.000	97.49
3	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	64.800.000	64.800.000	0	100
4	Perkara Hukum Perseorangan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	4.600.000	1.700.000	2.900.000	36.96
JUMLAH		1.204.658.000	1.153.353.600	51.304.400	95.74

IV. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	DIPA	PAGU	REALISASI	%
1	DIPA 097471 BUA	44.143.694.000	42.709.736.376	96.75
2	DIPA 099063 BADILUM	1.204.658.000	1.153.353.600	95.74



**PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS 1A
KHUSUS**

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2022 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 01 Kode Satker 400214 Badan Urusan Administrasi, sebagai berikut:

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :

A. Untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai mendapat Anggaran sebesar **Rp.20.583.366.000,- (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**. Realisasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

No	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil	6.858.872.000	6.784.231.560	74.640.440	98.91
2	Pembulatan Gaji Pegawai Negeri Sipil	87.000	86.629	371	99.57
3	Tunjangan Suami/Istri	537.569.000	535.249.002	2.319.998	99.57
4	Tunjangan Anak Pegawai Negeri Sipil	163.896.000	163.245.300	650.700	99.60
5	Tunjangan Struktural	65.028.000	64.750.000	278.000	99.57
6	Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil	9.902.355.000	9.826.585.000	75.770.000	99.23
7	Tunjangan PPh Pegawai Negeri Sipil	1.622.158.000	1.606.444.316	15.713.684	99.03
8	Tunjangan Beras Pegawai Negeri Sipil	356.959.000	354.640.740	2.318.260	99.35
9	Uang Makan Pegawai Negeri Sipil	1.045.799.000	1.028.019.000	17.780.000	98.30
10	Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil	30.643.000	30.510.000	133.000	99.57
11	Tunjangan Hakim Ad Hoc	-	-	-	-
JUMLAH		20.583.366.000	20.393.761.547	189.604.453	99.08

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



Untuk Belanja Non Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran mendapat anggaran sebesar **Rp. 36.250.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**. Realisasi Anggaran Belanja Non Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebagai berikut:

N O	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	8.000.000	8.000.000	0	100
2	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24.050.000	24.050.000	0	100
3	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4.200.000	3.751.700	448.300	89.33
JUMLAH		36.250.000	35.801.700	448.300	98.76

Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran mendapat anggaran sebesar **Rp.4.026.662.000,- (Empat Miliar Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)**. Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebagai berikut:

No	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Belanja Keperluan Perkantoran	1.641.832.000	1.636.648.518	5.183.482	99.68
2	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.000.000	1.000.000	0	100
3	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	58.920.000	58.920.000	0	100
4	Belanja Barang Operasional Lainnya	133.485.000	132.223.320	1.261.680	99.05
5	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	240.000.000	239.840.320	159.680	99.93
6	Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19	48.720.000	48.719.500	500	100
7	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	1.500.000	1.500.000	0	100
8	Belanja Langganan Listrik	570.466.000	570.432.008	33.992	99.99
9	Belanja Langganan Telepon	1.620.000	1.256.078	363.922	77.54

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



10	Belanja Sewa	676.673.000	676.662.750	10.250	99.97
11	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	384.012.000	383.998.514	13.486	99.99
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	265.354.000	264.694.525	659.475	99.97
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.080.000	2.530.000	550.000	82.14
JUMLAH		4.026.662.000	4.018.425.533	8.236.467	99.79

II. Program Peningkatan Sarana dan Pra-sarana mendapat anggaran sebesar **Rp.181.500.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

No	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.500.000	151.302.000	198.000	99.87
2	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	30.000.000	29.970.000	30.000	99.9
JUMLAH		181.500.000	181.272.000	228.000	99.87

Dari program-program tersebut berikut rekap Realisasi Nomor DIPA 400214 Badan Urusan Administrasi:

No	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	24.646.278.000	24.447.988.780	198.289.220	99.19
2	Program Peningkatan Sarana Pra-sarana	181.500.000	181.272.000	228.000	99.87
JUMLAH		24.827.778.000	24.629.260.780	198.517.220	99.20

III. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Nomor DIPA 03 Kode Satker 400215 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Definitif sebesar **Rp. 852.280.000,- (Delapan Ratus Juta Lima Puluh Dua Ratus Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut :

No	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara	20.000.000	11,040,000	8,960,000	55.20
2	Dukungan Penyelesaian	1,500,000	1.500.000	0	100

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



	Perkara				
3	Pendaftaran Berkas Perkara	437,500,000	437,497,200	2,800	100
4	Penetapan hari sidang	55,770,000	55,768,000	2,000	100
5	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	21,914,000	21,914,000	0	100
6	Pemeriksaan di sidang pengadilan	123,294,000	123,274,182	19,818	99.98
7	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	13,884,000	13.884.000	0	100
8	Minutasi/Upaya hukum	55,000,000	54,998,950	1,050	100
9	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	24,334,000	24,334,000	0	100
10	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	27,084,000	27,084,000	0	100
11	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	72,000,000	72,000,000	0	100
	JUMLAH	852.280.000	843.294.332	8.985.668	98.95

IV. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	DIPA	PAGU	REALISASI	%
1	DIPA 400214 BUA	24.827.778.000	24.629.260.780	99.20
2	DIPA 400215 BADILUM	852.280.000	843.294.332	98.95

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



PENGELOLA KEUANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS IA KHUSUS

A. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2022 mendapatkan Pagu DIPA Rp. 42.495.143.000. (empat puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari Badan Urusan Administrasi dan sebesar Rp. 895.508.000 (delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut

1. Program Dukungan Manajemen (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi)

A. Layanan Dukungan Manajemen Internal

1. Layanan Umum

Untuk Layanan Umum mendapat anggaran sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Realisasi Anggaran Layanan Umum sebagai berikut:

Kode	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1066.EBA.962	Layanan Umum				
A	<i>Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah</i>				
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8.000.000	7.780.000	220.000	97.25 %
B	<i>Dukungan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba</i>				
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	24.500.000	23.665.200	444.800	98.18 %
Jumlah		32.500.000	31.835.200	664.800	97.95 %

2. Layanan Perkantoran

A. Gaji dan Tunjangan

Kode	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
001	Gaji dan Tunjangan				
A	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>				
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5.472.751.000	5.134.421.460	359.143.379	97.91 %

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	65.000	64.454	338.329.540	93.82 %
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	390.625.000	389.981.142	546	99.16 %
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	111.263.000	110.649.036	643.858	99.84 %
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	58.590.000	58.590.000	613.964	99.45 %
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8.116.865.000	8.116.275.000	0	100 %
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1.238.866.000	1.238.668.869	590.000	99.99 %
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	255.241.000	255.135.660	197.131	99.98 %
511129	Belanja Uang Makan PNS	779.278.000	760.950.000	105.340	99.96 %
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	32.455.000	32.120.000	18.328.000	97.65 %
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	744.750.000	744.750.000	335.000	98.97 %
Jumlah		Rp. 17.200.749.000	Rp. 16.841.605.621	Rp. 359.143.379	97.91 %

B. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran mendapat anggaran sebesar **Rp. 6,133,894,000,-** (*enam miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*). Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebagai berikut:

Kode	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
A	<i>Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran</i>				

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2.764.825.000	2.764.558.901	266.099	99.99 %
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	214.997.000	214.978.484	18,516	99.99 %
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	187.744.000	187.736.640	7,360	100 %
B	<i>Langganan Daya Dan Jasa</i>				
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	213.000.000	212.900.168	99.832	99.95 %
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.000.000	3.952.160	47.840	98.80 %
522111	Belanja Langganan Listrik	650.000.000	633.837.758	16.162.242	97.51 %
522112	Belanja Langganan Telepon	3.000.000	2.784.078	215.922	92.80 %
522113	Belanja Langganan Air	18.520.000	16.381.146	2.138.854	88.45 %
C	<i>Pemeliharaan Kantor</i>				
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	721.057.000	720.777.555	279.445	99.96 %
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	287.591.000	285.160.802	2.430.198	99.15 %
D	<i>PEMBAYARAN TERKAIT OPERASIONAL KANTOR</i>				
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	86.200.000	79.690,000	6.510.000	92.45 %
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	64.380.000	64.380.000	0	100 %
E	<i>Koordinasi/Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding</i>				

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000	15.000.000	0	100 %
F	<i>Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan</i>				
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	500.000	500.000	0	100 %
522191	Belanja Jasa Lainnya	400.000	400.000	0	100 %
G	<i>Penanganan Covid-19</i>				
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	15.500.000	15.365.337	134.663	99.13 %
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	7.000.000	7.000.000	0	100 %
H	<i>Hak Keuangan Fasilitas Dan Hakim</i>				
522141	Belanja Sewa	690.180.000	690.180.000	0	100 %
I	<i>Kegiatan Pindah Gedung Kantor</i>				
522141	Belanja Sewa	190.000.000	190.000.000	0	100 %
Jumlah		6.133.894.000	6.105.583.029	28.310.971	99.54 %

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Untuk layanan sarana dan prasarana internal mendapat anggaran sebesar **Rp. 19,128,000,000,-** (*sembilan belas miliar seratus dua puluh delapan juta rupiah.*). Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Kode	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1071.EB B.951	Layanan Sarana Internal				
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				
A	<i>Pengadaan Alat Pengolah Data</i>				

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.000.000	90.340.000	660.000	99.27 %
053	<i>Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran</i>				
A	Pengadaan Sarana Disabilitas				
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	49.117.500	882.500	98.24 %
B	<i>Pengadaan Fasilitas Dukungan Sistem Peradilan Pidana Anak</i>				
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000	38.961.000	39.000	99.90 %
C	Fasilitas Perkantoran				
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.851.000.000	4.850.305.000	695.000	99.99 %
D	Fasilitas Pendukung Perkantoran				
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.000.000	160.000.000	0	100 %
1071.EB B.971	Layanan Prasarana Internal				
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan				
A	Pembangunan Gedung Lanjutan				
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.937.000.000	13.932.517.732	4.482.268	99.97 %
Jumlah		19.128.000.000	19.121.241.232	6.758.768	99.96 %

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



Dari Program-program tersebut berikut rekap Realisasi Nomor DIPA : 005.01.2.400220/2022
Badan Urusan Administrasi :

No	Jenis Program	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Program Dukungan Manajemen	42.495.143.000	42.100.265.082	394.877.918	99.07 %

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran DIPA tahun 2022 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat Pagu sebesar **Rp. 847.323.000,-** (*delapan ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), untuk realisasi anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Sebagai berikut :

Kode	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				
1049.AEA	Koordinasi				
1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara				
051	Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara				
521211	Belanja Bahan	13.250.000	11.150.000	2.100.000	84.15 %
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000	1.500.000	3.750.000	28.57 %
052	Dukungan Penyelesaian Perkara				
052.A	Perjalanan Hakim Perikanan				
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10,000,000	10,000,000	0	100.00 %
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.560.000	2.260.800	299.200	88.31 %
052.B	Kimwasmat				
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	1,500,000	0
Pendaftaran Berkas Perkara					
521211	Belanja Bahan	51.000	0	51.000	0.00 %
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	615.883.000	615.835.874	47.126	99.99 %
Penetapan Hari Sidang					

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000	0	50.000	0
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjang Penahanan					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.000.000	1.879.420	120.580	93.97 %
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000	0	50.000	0.00 %
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan					
521211	Belanja Bahan	5.626.000	5.578.000	48.000	99.15 %
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	700.000	677.450	22.550	96.78 %
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.900.000	75.880.000	20.000	99.97 %
Minutasi Upaya Hukum					
521211	Belanja Bahan	50.000	0	50.000	0
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.500.000	2.465.830	34.170	98.63 %
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.000.000	41.675.000	325.000	99.23 %
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.000.000	5.000.000	0	100 %
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.538.000	36.538.000	0	100 %
1049.QBA	<i>Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</i>				
1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum				
522131	Belanja Jasa Konsultan	72.000.000	72.000.000	0	100 %
Perkara Peradilan umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah DKI Jakarta					
Biaya Perkara					
521211	Belanja Bahan	625.000	120.000	505.000	19.20 %
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	625.000	450.000	175.000	72.00 %
522151	Belanja Jasa Profesi	700.000	0	700.000	0.00 %
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	150.000	600.000	20.00 %

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



Biaya Eksekusi					
521211	Belanja Bahan	1.150.000	0	1.150.000	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	0	750.000	0
Jumlah		895.508.000	880.952.054	14.555.946	98.37 %

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	DIPA 400220 Badan Urusan Administrasi	42.495.143.000	42.100.265.082	394.877.918	99.07 %
2	DIPA 400221 Badan Peradilan Umum	895.508.000	880.952.054	14.555.946	98.37 %
Jumlah		44,379,815,000	44,253,975,447	125,839,553	99,71



**PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS 1A
KHUSUS**

A. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus Tahun Anggaran 2022 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.097492/2021 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp.16.725.179.000,- (enam belas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta serratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan realisasi sebesar **Rp.16.435.758.251,- (enam belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 98,27%**, realisasi Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Gaji Pokok PNS	6.005.057.000	5.958.757.080	46.299.920	99,23%
2	Pembulatan gaji PNS	238.000	84.392	153.608	35,46%
3	Tunjangan Suami/Istri PNS	497.545.000	431.036.400	66.438.940	86,65%
4	Tunjangan Anak PNS	150.298.000	130.287.324	20.010.676	86,69%
5	Tunjangan Struktural PNS	61.880.000	58.675.000	3.205.000	94,82%
6	Tunjangan Fungsional PNS	7.556.180.000	7.481.180.000	75.000.000	99,01%
7	Tunjangan PPh PNS	1.182.730.000	1.141.732.535	40.997.465	96,53%
8	Tunjangan Beras PNS	324.697.000	299.311.860	25.385.140	92,18%
9	Uang Makan PNS	902.524.000	898.234.000	4.290.000	99,52%
10	Tunjangan Umum PNS	44.030.000	36.390.000	7.640.000	82,65%
JUMLAH		16.725.179.000	16.435.758.251	289.420.749	98,27%



2. Untuk Belanja Non Operasional Perkantoran mendapat anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), **dengan realisasi sebesar Rp.7.141.000,- (tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 89,26%**, realisasi Anggaran Belanja Non Operasional Perkantoran sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8.000.000	7.141.000	859.000	89,26 %
JUMLAH		8.000.000	7.141.000	859.000	89,26 %

3. Untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran mendapat anggaran sebesar Rp. 5.130.325.000,- (lima milyar serratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), **dengan realisasi sebesar Rp. 5.107.723.314 (lima milyar seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah) atau sebesar 99,56%**, Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebagai berikut :

NO	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Keperluan Perkantoran	2.119.256.000	2.119.195.700	60.300	100 %
2	Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya	45.028.000	45.027.790	210	100 %
3	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi/ATK	95.529.000	95.436.048	92.952	99,90 %
4	Belanja Keperluan Perkantoran (Langganan Video Conference, Langganan Internet, Langganan Paket Data Si MISTER)	235.600.000	235.388.873	211.127	99,91 %
5	Pengiriman Surat Dinas	2.000.000	684.000	1.316.000	34,20 %

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



6	Langganan Listrik	611.000.000	602.568.948	8.431.052	98,62 %
7	Langganan Telpon	4.000.000	1.447.982	2.552.018	36,20 %
8	Langganan Air	2.170.000	1.791.955	378.045	82,58 %
9	Sewa Hosting	24.000.000	24.000.000	0	100 %
10	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	776.083.000	776.014.860	68.140	99,99 %
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	358.258.000	357.289.957	968.043	99,73 %
12	Honor Operasional Satuan Kerja	71.160.000	71.160.000	0	100 %
13	Pakaian Dinas Satpam, Supir dan Pramubakti	78.300.000	78.299.201	799	100 %
14	Pelantikan dan Sumpah Jabatan	2.001.000	2.000.000	1.000	99,95 %
15	Koordinasi ke Pusat/ Tingkat Banding/Tingkat Pertama	7.500.000	7.500.000	0	100 %
16	Konsultasi ke KPPN/ Kanwil DJPb/KPKNL/ BANK	6.000.000	5.850.000	150.000	97,50 %
17	Penanganan Covid-19	47.950.000	47.948.000	2.000	100 %
18	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim (Sewa Rumah Dinas)	644.490.000	636.120.000	8.370.000	98,70 %
JUMLAH		5.130.325.000	5.107.723.314	22.601.686	99,56 %

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana mendapat anggaran sebesar Rp 266.500.000- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), **dengan realisasi sebesar Rp. 266.500.000 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 100%**, Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	PC Kepaniteraan	256.500.000	256.500.000	0	100 %
2	Printer	10.000.000	10.000.000	0	100 %
JUMLAH		266.500.000	266.500.000	0	100 %

Dari Program-program tersebut berikut rekap Realisasi Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2022 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA-005.01.2.097492/2022, Badan Urusan Administrasi tanggal 23 November 2022 :

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	16.725.179.000	16.435.758.251	289.420.749	98,27 %
2	Belanja Barang Non Operasional Perkantoran	8.000.000	7.141.000	859.000	89,26 %
3	Belanja Barang Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	5.130.325.000	5.107.723.314	22.601.686	99,56 %
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Untuk Belanja Modal	266.500.000	266.500.000	0	100 %
JUMLAH		22.130.004.000	21.817.122.565	312.881.435	98,59%

- B.** Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Nomor DIPA 005.03.2.099065/2022 tanggal 23 November 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Badan Peradilan Umum mendapat Pagu Definitif sebesar Rp 560.815.000,- (lima ratus enam puluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), **dengan realisasi sebesar Rp. 537.416.085,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 95,83%**, Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



NO	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara	18.000.000	18.000.000	0	100 %
2	Dukungan Penyelesaian Perkara (Hakim Pengawas dan Pengamat)	1.500.000	1.500.000	0	100 %
3	Penjilidan Perkara Pidana	7.010.000	5.250.000	1.760.000	74,89 %
4	ATK Perkara Pidana	253.490.000	239.089.635	14.400.365	94,32 %
5	Penetapan hari sidang dan pengiriman hari sidang pertama	10.000.000	10.000.000	0	100 %
6	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	19.690.000	19.678.950	100.000	99,92 %
7	Pemeriksaan di sidang pengadilan	127.300.000	127.200.000	0	100%
8	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	14.820.000	14.770.000	50.000	99,66 %
9	Minutasi/Upaya hukum (penjilidan berkas minutasi)	7.025.000	7.000.000	25.000	99,64 %
10	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama (Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota)	16.780.000	14.560.000	2.220.000	86,77 %

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



11	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama (Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota)	4.920.000	4.827.500	92.500	98,12 %
12	Pos Bantuan Hukum	72.000.000	72.000.000	0	100 %
13	Biaya Perkara	5.050.000	3.540.000	1.510.000	70,10 %
14	Biaya Eksekusi	3.230.000	0	3.230.000	0,00%
JUMLAH		560.815.000	537.416.085	23.398.915	95.83 %

1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran sampai dengan Desember 2021

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	DIPA DIPA-005.01.2.097492/2022 BUA	22.130.004.000	21.817.122.565	98,59 %
2	DIPA 005.03.2.099065/2022 BADILUM	560.815.000	537.416.085	95,83 %



PENGADILAN TINGGI
DKI JAKARTA

LAMPIRAN 4 SARANA DAN PRA SARANA

PENGADILAN NEGERI SE - WILAYAH HUKUM
DKI JAKARTA



SARANA DAN PRA SARANA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A
KHUSUS

1. Pemeliharaan

Pengelolaan dimaksud adalah dalam rangka menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada saat ini. Posisi keadaan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus khususnya bidang Sarana sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas

Terdapat 26 (dua puluh enam) kendaraan dinas yaitu 8 (delapan) kendaraan roda empat dan 18 (delapan belas) kendaraan roda dua dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
JENIS KENDARAAN RODA EMPAT						
1.	MOBIL PENUMPANG SEDAN COROLLA ALTIS	2008	□			
2.	MOBIL PENUMPANG MINIBUS INNOVA E	2006	□			
3.	MOBIL PENUMPANG MINIBUS INNOVA E STD	2013	□			
4.	MOBIL PENUMPANG SEDAN NEW VIOS 1.5 MIT	2013	□			
5.	MOBIL PENUMPANG MINIBUS KIJANG LSX	1998	□			
6.	MOBIL PENUMPANG MINIBUS KIJANG KF83	2013	□			
7.	MOBIL PENUMPANG MINIBUS KIJANG KF 80	2003	□			
8.	MOBIL PENUMPANG MINIBUS KIJANG KF52	1995			□	

JENIS KENDARAAN RODA DUA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



1.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA NF 125 TRF	2008	□	
2.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA NF 125 TRF	2008	□	
3.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA NF 125 TRF	2003		□
4.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA GLP III	2001	□	
5.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA GLP III	2001	□	
6.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA GL MAX II	2003		□
7.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA GL MAX II	2003		□
8.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA GLMAX	2003		□
9.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA NF 125 TRF	2003		□
10.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA NF 125 D	2006	□	
11.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA NF 125 TRF	2007	□	
12.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA GL 200D	2006	□	
13.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA NF 125 TRF	2003		□
14.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA NF 125 TRF	2008	□	
15.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA GL 200D	2008	□	
16.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA GL 200D	2008	□	
17.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA GL 200D	2009	□	
18.	SEPEDA MOTOR SOLO HONDA GLP III	2013	□	



b. Keadaan Ruang dan Meubelair

No.	Sarana/Pra Sarana Gedung	Jumlah	Keterangan
BASEMENT			
1.	R. STP	1	
2.	R. GWT	1	
3.	R. POMPA	1	
4.	R. FOTOCOPY	1	
5.	R. GUDANG	2	
6.	R. MUSHOLA	1	
7.	R. SECURITY	1	
8.	R. JAKSA	1	
9.	TOILET PRIA	1	
10.	R. JANITOR	1	
11.	TOILET WANITA	1	
12.	R. TAHANAN WANITA	1	
13.	R. TAHANAN PRIA	1	
14.	R. TAHANAN TIPIKOR	1	
15.	R. PERS	1	
16.	R. POSBAKUM	1	
17.	R. KPK	1	
18.	R. TEKNISI	1	
19.	R. CHEMICAL	1	
20.	R. KANTIN	2	
LANTAI I			
21.	R. CCTV /KAMDAL	1	
22.	R. MENYUSUI	1	
23.	BANK BTN	1	
24.	R. CONTROL	1	
25.	R. PTSP	1	
26.	R. BACK OFFICE	1	
27.	R. PELAYANAN	1	
28.	R. SIDANG UTAMA	4	
29.	R.PANTRY	1	
30.	TOILET WANITA	2	
31.	TOILET PRIA	2	
33.	R. TUNGGU PELAYANAN UMUM	2	
34.	R. BENDAHARA PENGELUARAN	1	
35.	R. GUDANG ATK	1	
36.	R. TAMU	1	
37.	R. KASUB BAG. TU DAN KEUANGAN	1	
38.	TOILET DIFABLE	1	
39.	R. JANITOR	1	
40.	R. GUDANG LISTRIK	1	
41.	R. PANEL P2	2	
42.	R. TRAFO	1	
43.	R. GENSET	1	
LANTAI 2			
44.	R. TUNGGU	2	
45.	R. MEDIASI	1	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



46.	TOILET PRIA	2	
47.	R. VERIFIKASI	1	
48.	TOILET WANITA	2	
49.	R. SIDANG BESAR	3	
50.	R. GUDANG	1	
51.	R. PANTRY	1	
52.	R. KPK	1	
53.	R. KAUKUS	1	
LANTAI 3			
54.	R. TUNGGU	2	
55.	R. MEDIASI	1	
56.	TOILET PRIA	3	
57.	R. SIDANG KECIL	12	
58.	TOILET WANITA	3	
59.	R. PANTRY	1	
60.	R. JAKSA	1	
LANTAI 4			
61.	R. KPN	1	
62.	R. ISTIRAHAT KPN	1	
63.	TOILET KPN	1	
64.	R. RAPAT KPN	1	
65.	STAF KPN	1	
66.	R. TUNGGU TAMU KPN	1	
67.	R. HAKIM	20	
68.	R. JANITOR	3	
69.	TOILET WANITA	2	
70.	R. PANEL	2	
71.	TOILET PRIA	2	
72.	R. WKPN	1	
73.	R. TAMU	1	
74.	R. STAF WKPN	1	
75.	R. ISTIRAHAT WKPN	1	
76.	TOILET WKPN	1	
77.	R. KAUKUS	2	
78.	R. AANMANING	1	
79.	R. MEDIASI	1	
80.	R. PANITERA PENGGANTI	1	
81.	R. RAPAT PANITERA	1	
82.	R. PANITERA	1	
83.	R. STAF PANITERA	1	
84.	R. TUNGGU TAMU PANITERA	1	
85.	R. ISTIRAHAT PANITERA	1	
86.	TOILET PANITERA	1	
87.	R. KA. BAG. UMUM	1	
88.	TOILET KA. BAG. UMUM	1	
LANTAI 5			
89.	R. KEPANITERAAN PERDATA	1	
90.	R. KASIR PERDATA	1	
91.	R. PANMUD PERDATA	1	
92.	R. EKSEKUSI	1	
93.	R. ARSIP PERDATA AKTIF	1	
94.	R. ARSIP PERDATA	1	
95.	R. ARSIP EKSEKUSI	1	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



96.	R. ARSIP PMH I	1	
97.	R. ARSIP PMH II	1	
98.	R. HAKIM AD HOC PHI	2	
99.	R. PANTRY	1	
100.	TOILET WANITA	1	
101.	TOILET PRIA	1	
102.	R. ADHOC TIPIKOR	1	
103.	R. SEKRETARIS	1	
104.	R. TUNGGU TAMU SEKRETARIS	1	
105.	R. ISTIRAHAT SEKRETARIS	1	
106.	R. STAF SEKRETARIS	1	
107.	R. RAPAT SEKRETARIS	1	
108.	R. KEPEGAWAIAN	1	
109.	R. KA. BAG KEPEGAWAIAN	1	
110.	R. ARSIP KEUANGAN	1	
111.	R. ARSIP KEPEGAWAIAN	1	
112.	R. AANMANING		
113.	R. PERPUSTAKAAN	1	
LANTAI 6			
114.	R. KEPANITERAAN NIAGA	1	
115.	R. ARSIP NIAGA	1	
116.	R. PANMUD NIAGA	1	
117.	R. KEPANITERAAN HUKUM	1	
118.	R. PANMUD HUKUM	1	
119.	R. ARSIP HUKUM AKTIF	1	
120.	MUSHOLA	1	
121.	TOILET PRIA	2	
122.	TOILET WANITA	2	
123.	R. KEPANITERAAN PHI	1	
124.	R. PANMUD PHI	1	
125.	R. ARSIP PHI AKTIF	1	
126.	R. PANTRY	1	
127.	R. KEPANITERAAN TIPIKOR	1	
128.	R. PANMUD TIPIKOR	1	
129.	R. ARSIP TIPIKOR	1	
130.	R. KEPANITERAAN PIDANA	1	
131.	R. PANMUD PIDANA	1	
132.	R. ARSIP PIDANA	1	
LANTAI 7			
133.	R. ARSIP NIAGA	1	
134.	R. TUNGGU ANAK	1	
135.	R. TUNGGU SAKSI	1	
136.	R. SIDANG ANAK	1	
137.	R. SUB BAGIAN PTIP	1	
138.	R. SERVER	1	
139.	R. AUDITORIUM	1	
140.	R. PANTRY	1	
141.	TOILET WANITA	2	
142.	TOILET PRIA	2	
143.	R. DHARMAYUKTI	1	
144.	R. GUDANG INVENTARIS	1	
145.	R. POLIKLINIK	1	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



146.	R. ARSIP PHI	1	
147.	R. ARSIP PERDATA DAN TIPIKOR	1	
LANTAI 8			
148.	R. ARSIP	3	
149.	R. PANTRY	1	
150.	TOILET WANITA	1	
151.	TOILET PRIA	1	
152.	R. CONTROL LIFT	1	
153.	R. TEKNISI GONDOLA	1	
154.	R. TEKNISI	1	
SARANA DAN PRA SARANA TAHUN 2022			
155.	KENDARAAN DINAS RODA DUA	16	
156.	KENDARAAN DINAS RODA EMPAT	6	
157.	P.C UNIT	102	
158.	LAPTOP	125	
159.	INFOKUS	6	
160.	PABX	0	
161.	AC	12	
162.	FAXIMILE	1	
163.	GENSET	2	
164.	GONDOLA	8	
165.	TROLLY	16	
166.	LEMARI BESI	244	
167.	LEMARI KAYU	299	
168.	RAK BESI	695	
169.	RAK KAYU	23	
170.	FILLING CABINET BESI	2	
171.	FILLING CABINET KAYU	0	
172.	BRANKAS	2	
173.	CCTV	77	
174.	PAPAN VISUAL	26	
175.	WHITE BOARD	3	
176.	X- RAY	1	
177.	MESIN ABSENSI	4	
178.	HAND METAL DETECTOR	4	
179.	MONITOR PANEL	6	
180.	FOCUSING SCREEN / PROJECTOR	3	
181.	WALKTHROUGH /PROJECTOR	2	
182.	TELEVISI	23	
183.	WIRELESS	16	
184.	UPS	2	
185.	LCD MONITOR	1	
186.	AUDIO CONVERTER	1	
187.	SPLITTER	6	
188.	UPS 1 KVA FOR REMOTE STATION	2	
189.	HAIR DRYER	40	
190.	TV MONITOR	1	
191.	FINGER PRINT CAMERA	3	
192.	TABLET	3	
193.	PRINTER	47	
194.	SCANNER	6	
195.	SERVER	1	
196.	ROUTER	2	

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



197.	MODEM	1
198	ACCESS POINT	0

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilaksanakan sesuai dengan data yang ada antara lain berupa:

a. Perpanjangan STNK dan Ganti Plat Kendaraan Dinas

No	NOMOR POLISI	JENIS	PAJAK	YANG MEMEGANG	ST NK	BP KB	GANTI PLAT	TERAKHIR PAJAK
			TAHUNAN					DIBAYAR
1	B1050HQ	Mobil	24-Mei-23	Operasional	Ada	Ada	24-Mei-23	20-Mei-22
2	B8230WU	Mobil	11-Nov-23	Operasional	Ada	Ada	11-Nov-26	04-Nov-22
3	B1339PQN	Mobil	04-Maret-23	Operasional	Ada	Ada	04-Maret-24	25-Feb-22
4	B8551WU	Mobil	18-Des-23	Operasional	Ada	Ada	18-Des-26	04-Nov-22
5	B7935EQ	Mobil	24-Sep-23	Operasional	Ada	Ada	24-Sep-23	16-Sep-22
6	B2060BQ	Mobil	22-Juni-23	Operasional	Ada	Ada	22-Juni-24	13-Juni-22
7	B2552PQ	Mobil	03-Juli-23	Operasional	Ada	Ada	03-Juli-23	13-Juni-22
8	B2609HQ	Mobil	15-Des-23	Operasional	Ada	Ada	15-Des-26	04-Nov-22
9	B6241PKQ	Motor	27-Okt-23	Operasional	Ada	Ada	27-Okt-23	16-Sep-22
10	B6240PKQ	Motor	27-Okt-23	Operasional	Ada	Ada	27-Okt-24	16-Sep-22
11	B6473PJQ	Motor	14-Agu-23	Operasional	Ada	Ada	14-Agu-23	16-Sep-22
12	B4631MQ	Motor	21-Juni-23	Operasional	Ada	Ada	21-Juni-26	13-Juni-22
13	B4630MQ	Motor	21-Juni-23	Operasional	Ada	Ada	21-Juni-26	13-Juni-22
14	B3442KQ	Motor	13-Nov-23	Operasional	Ada	Ada	13-Nov-26	04-Nov-22
15	B3446KQ	Motor	13-Nov-23	Operasional	Ada	Ada	13-Nov-23	04-Nov-22
16	B3450KQ	Motor	13-Nov-23	Operasional	Ada	Ada	13-Nov-26	04-Nov-22
17	B6474PJQ	Motor	14-Agu-23	Operasional	Ada	Ada	14-Agu-23	16-Sep-22
18	B6052PEQ	Motor	27-Nov-23	Operasional	Ada	Ada	27-Nov-26	04-Nov-22
19	B6800PGQ	Motor	17-Sep-23	Operasional	Ada	Ada	17-Sep-27	16-Sep-22
20	B6050PEQ	Motor	27-Nov-23	Operasional	Ada	Ada	27-Nov-27	04-Nov-22
21	B6242PKQ	Motor	27-Okt-23	Operasional	Ada	Ada	27-Okt-23	16-Sep-22
22	B6243PKQ	Motor	27-Okt-23	Operasional	Ada	Ada	27-Okt-26	16-Sep-22
23	B6239PKQ	Motor	27-Okt-23	Operasional	Ada	Ada	27-Okt-23	16-Sep-22
24	B6266PKQ	Motor	04-Nov-23	Operasional	Ada	Ada	04-Nov-23	04-Nov-22
25	B6267PKQ	Motor	04-Nov-23	Operasional	Ada	Ada	04-Nov-23	04-Nov-22
26	B 4869 PQ	Motor	18-Juni-23	Operasional	Ada	Ada	18-Juni-26	13-Juni-22

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas :

No	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Jenis Kendaraan (Merek/ No. Polisi)	Perihal Pemeliharaan
1	16-01-2022	Operasional	B 6267 PKQ	Service Motor
2	07-01-2022	Operasional	B 6240PKQ	Service Motor
3	29-03-2022	Operasional	B 3446 KQ	Penggantian Ban Motor Operasional
4	27-10-2022	Operasional	B 1050 HQ	Service
5	07-12-2022	Operasional	B 6241 PKQ	Service Motor
6	12-12-2022	Operasional	B 2060 BQ	Service

c. Pemeliharaan Alat Pengolah Data

No	TANGGAL PERMOHONAN	PEMOHON	BMN	PEMELIHARAAN	KET
1	25-01-2022	UMUM	Printer Hp 127	Ganti Pemanas dan Film	Sudah Diganti
2	27-01-2022	Aldino	Laptop Accer Swift	Ganti Hardisk	Sudah Diganti
3	28-02-2022	TITI	P.c Lenovo	Ganti SSD dan Back Up Data	Sudah dilaksanakan
4	04-03-2022	Asmawan	Printer Hp 400	Service Pemanas dan Celenoit	Sudah dilaksanakan
5	03-04-2022	Alif	Laptop Thosiba	Ganti Baterai	Sudah diganti
6	08-05-2022	Alif	p.c All in one	Upgrade Ram	Sudah diperbaiki
7	22-06-2022	Alif	Printer Hp Laser Jet	Ganti Pemanas	Sudah diganti
8	13-08-2022	Dwi Iwandaru	P.c Dell	Ganti Hardisk 320	Sudah diganti
9	23-08-2022	Hamim	P.c Dell	Copy Bios, Ganti VGA, Instal Ulang, Back Up Data	Sudah diganti

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



10	10-10-2022	Rina Rosanawati	Note Book Assus	Service Fan Prosesor Instal Back Up	Sudah di Perbaiki
11	18-10-2022	Dwi Iwandar	Laptop Dell	Ganti SSD instal, Back Up	Sudah diganti
12	25-01-2022	UMUM	Printer Hp 127	Ganti Pemanas dan Film	Sudah Diganti
13	27-01-2022	Aldino	Laptop Accer Swift	Ganti Hardisk	Sudah Diganti
14	28-02-2022	TITI	P.c Lenovo	Ganti SSD dan Back Up Data	Sudah dilaksanakan
15	04-03-2022	Asmawan	Printer Hp 400	Service Pemanas dan Celenoit	Sudah dilaksanakan

d. Pemeliharaan Gedung

No	Uraian	Supplier	Nomor Kontrak	Tgl Kontrak	Tgl Selesai	Nilai Kontrak
1	Pengadaan Jasa Konstruksi Perbaikan Siteplan Dan Dak Lt.7 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	PT. SEKAR ALAS	W10-U1/11/PL.01/I/2022.DAK.7	02-02-22	22-02-22	144.314.940
2	Pengadaan Jasa Konstruksi Climbing Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus	PT. SEKAR ALAS	W10-U1/11/PL.01/V/2022.CLIMBING	27-05-22	02-06-22	61.567.704
3	Pengadaan Jasa Konstruksi Relokasi Ruang Mediasi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus	PT. LANGKAH TEPAT BERSAMA	W10-U1/11/PL.01/V/2022.MEDASI	27-05-22	02-06-22	107.313.690
4	Pengadaan Jasa Konstruksi Perbaikan Sarana dan Ruangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus	PT. LANGKAH TEPAT BERSAMA	W10-U1/11/PL.01/IX/2022.RENOVASI	13-09-22	26-09-22	196.359.000
5	Pengadaan Jasa Konstruksi Perbaikan Dinding Marmer Sisi Utara Pada Pengadilan	CV. RIDHO KARYA MANDIRI	W10-U1/11/PL.01/IX/2022.MARMER	19-09-22	18-10-22	197.924.100

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



	Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus					
6	Pengadaan Jasa Perbaikan Instalasi Air Kotor DaN Air Hujan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus	PT. MADALASURYA WIRAPUTRA	W10-U1/11/PL.01/X/2022. POMPA	13-10-22	24-10-22	78.747.840
7	Pengadaan Jasa Perbaikan Dinding Luar Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus	PT. BAYU DANAR MUTIARA	W10-U1/11/PL.01/X/2022. DINDING	13-10-22	11-11-22	167.667.000
8	Pengadaan Jasa Konstruksi Perbaikan Dinding Granit Sisi Selatan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus	CV. RIDHO KARYA MANDIRI	W10-U1/11/PL.01/X/2022. GRANIT SELATAN	13-10-22	02-11-22	197.924.100
9	Pengadaan Renovasi Sipil Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pengadaan Renovasi Sipil Pada Pengadilan Negeri Jakarta	PT. LANGKAH TEPAT BERSAMA	W10-U1/11/PL.01/XI/2022.SIPIL	01-11-22	14-11-22	197.532.270
10	Pengadaan Perbaikan Plafon Ruang PTSP Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus	CV. RIDHO KARYA MANDIRI	W10-U1/11/PL.01/XI/2022 .PLAFON	07-11-22	18-11-22	197.231.460
11	Pengadaan Jasa Pembersihan Kristalisasi Lantai & Dinding Granit Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus Tahun Anggaran 2022	PT. CAHAYA MEGA MANDIRI	W10-U1/11/PL.01/XI/2022.POL ES	15-11-22	28-11-22	154.378.800
12	Pengadaan Perbaikan DAK Lantai 6 Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus	PT. MADALASURYA WIRAPUTRA	W10-U1/11/PL.01/XI/2022.DAK. LT.6	30-11-22	13-12-22	197.370.210
13	Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Plumbing & ME Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus	PT. SEKAR ALAS	W10-U1/11/PL.01/XI/2022 .MEP	30-11-22	13-12-22	179.986.500

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



2. Pengadaan

a. DIPA 01 (097471)

No	Supplier	Tgl. Kontrak	Nomor Kontrak	Uraian Kontrak	Tgl Mulai	Tgl Akhir	Nilai Kontrak
1	PT. SEKAR ALAS	02-02-22	W10-U1/11/PL.01/II/2022.DAK.7	Pengadaan Jasa Konstruksi Perbaikan Siteplan Dan Dak Lt.7 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	02-02-22	22-02-22	144.314.940
2	PT. SEKAR ALAS	22-02-22	W10-U1/11/PL.01/II/2021.POMPA	Pengadaan Jasa Perawatan Perbaikan Pompa Fire Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	22-02-22	14-03-22	192.399.900
3	PT. MANDALASURYA WIRAPUTRA	21-04-22	W10-U1/11/PL.01/IV/2021.STP	Pengadaan Jasa Perbaikan Sistem Pompa STP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	21-04-22	27-04-22	99.123.000
4	PT. SEKAR ALAS	27-05-22	W10-U1/11/PL.01/V/2022.CLIMBING	Pengadaan Jasa Konstruksi Climbing Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	27-05-22	02-06-22	61.567.704
5	PT TURBO MITRA PERKASA	14-04-22	W10.U1/01/PL.04/IV/2022.APD	Pengadaan Alat Pengolah Data (PC Komputer) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2022	14-04-22	30-05-22	307.000.000
6	PT. LANGKAH TEPAT BERSAMA	27-05-22	W10-U1/11/PL.01/V/2022.MEDIASI	Pengadaan Jasa Konstruksi Relokasi Ruang Mediasi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	27-05-22	02-06-22	107.313.690
7	PT. SEKAR ALAS	24-06-22	W10-U1/11/PL.01/VI/2022.ROOFTANK	Pengadaan Jasa Perbaikan Roof Tank dan Pompa Transfer Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	24-06-22	30-06-22	123.321.000

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



8	CV. SHR COSTUME TAILOR & TEXTILE	16-08-22	W10.U1/11/P L.03/VIII/2022.BAJU	Pengadaan Pakaian Dinas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2022	16-08-22	14-09-22	145.854.000
9	PT. LANGKAH TEPAT BERSAMA	13-09-22	W10-U1/11/ PL.01/IX/2022.RENOVASI	Pengadaan Jasa Konstruksi Perbaikan Sarana dan Ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	13-09-22	26-09-22	196.359.000
10	PT. LANGKAH TEPAT BERSAMA	14-09-22	W10-U1/1/ PL.01/IX/2022.DIFABEL	Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Jalur (Fasilitas) Difabel Lantai 1 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	14-09-22	20-09-22	29.947.800
11	CV. RIDHO KARYA MANDIRI	19-09-22	W10-U1/11/ PL.01/IX/2022.MARMER	Pengadaan Jasa Konstruksi Perbaikan Dinding Marmer Sisi Utara Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	19-09-22	18-10-22	197.924.100
12	PT. MADALASURYA WIRAPUTRA	13-10-22	W10-U1/11/ PL.01/X/2022.POMPA	Pengadaan Jasa Perbaikan Instalasi Air Kotor Dan Air Hujan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	13-10-22	24-10-22	78.747.840
13	PT. BAYU DANAR MUTIARA	13-10-22	W10-U1/11/ PL.01/X/2022.DINDING	Pengadaan Jasa Perbaikan Dinding Luar Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	13-10-22	11-11-22	167.667.000
14	CV. RIDHO KARYA MANDIRI	13-10-22	W10-U1/11/ PL.01/X/2022.GRANIT SELATAN	Pengadaan Jasa Konstruksi Perbaikan Dinding Granit Sisi Selatan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	13-10-22	02-11-22	197.924.100

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



15	PT. SEKAR ALAS	02-11-22	W10-U1/11/PL.01/XI/2022.PIPA AC	Pengadaan Perbaikan dan Penggantian Isolasi Pipa AC Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	02-11-22	15-11-22	197.369.100
16	PT. LANGKAH TEPAT BERSAMA	01-11-22	W10-U1/11/PL.01/XI/2022.SIPI L	Pengadaan Renovasi Sipil pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	01-11-22	14-11-22	197.532.270
17	CV. RIDHO KARYA MANDIRI	07-11-22	W10-U1/11/PL.01/XI/2022.PLAFON	Pengadaan Perbaikan Plafon Ruang PTSP Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	07-11-22	18-11-22	197.231.460
18	PT. CAHAYA MEGA MANDIRI	15-11-22	W10-U1/11/PL.01/XI/2022.POL ES	Pengadaan Jasa Pembersihan Kristalisasi Lantai & Dinding Granit Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2022	15-11-22	28-11-22	154.378.800
19	PT. MADALASURYA WIRAPUTRA	30-11-22	W10-U1/11/PL.01/XI/2022.DAK K.LT.6	Pengadaan Perbaikan DAK Lantai 6 Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	30-11-22	13-12-22	197.370.210
20	PT. SEKAR ALAS	30-11-22	W10-U1/11/PL.01/XI/2022.MEP	Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Plumbing & ME Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	30-11-22	13-12-22	179.986.500
21	PT GASOIL CISONUSANTARA	08-12-22	W10-U1/11/PL.01/XII/2022.SOLAR	Pengadaan Solar Genset Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus	08-12-22	12-12-22	92.500.000

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



b. DIPA 03 (099063)

No	Supplier	Tgl. Kontrak	Nomor Kontrak	Uraian Kontrak	Tgl Mulai	Tgl Akhir	Nilai Kontrak
1	PT. BHAKTI JAWA CITRAM ULIA	25-03-22	W10-U1/11/PL.03 /III/2022.AT K03	Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2022	25-03-22	31-03-22	79.151.600
2	PT. BHAKTI JAWA CITRAM ULIA	28-06-22	W10-U1/11/PL.03 /VI/2022.AT K03	Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2022	28-06-22	04-07-22	70.078.740
3	PT. BHAKTI JAWA CITRAM ULIA	02-12-22	W10-U1/11/PL.03 /XII/2022.A TK03	Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2022	02-12-22	08-12-22	159.036.360



SARANA DAN PRA SARANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS 1A KHUSUS

Pengelolaan dimaksud adalah dalam rangka menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada saat ini. Posisi keadaan BMN Pengadilan Negeri Jakarta Barat khususnya bidang sarana sebagai berikut:

• Tanah dan Bangunan Gedung Kantor

No	Jenis Barang	Luas Tanah/ Bangunan	Status	Tahun Perolehan
1	Tanah Untuk Kantor Pemerintah	3.499	Hak Pakai	1971
2	Bangunan Kantor	5.671	IMB	2011

• Tanah dan Bangunan Untuk Rumah Dinas

No	Jenis Barang	Luas Tanah/ Bangunan	Status	Tahun Perolehan
1	Tanah Untuk Rumah Dinas	865	Hak Pakai	1986
2	Bangunan Rumah Dinas Gol I No. 9	200	IMB	2008
3	Bangunan Rumah Dinas Gol I No. 10	200	IMB	2008
4	Bangunan Rumah Dinas Gol I No. 11	200	IMB	2008

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat terletak di jalan Letnan Jendral S. Parman Kav. 71, Slipi Palmerah, Jakarta Barat dengan luas tanah 3.499 m². Status tanah Hak Pakai dengan pemegang hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI Nomor 79/Pakai yang di atasnya dibangun gedung kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat seluas 5.671 m² terdiri dari 6 (enam) lantai.

1.1. Bangunan gedung

1.1.1. Lantai 1 terdiri dari:

- Ruang Sidang;
- Ruang Inzage
- Pojok e-Court
- Pojok Tara (Tunanetra)
- Bank BTN
- Ruang PTSP;
- Ruang Laktasi



- Ruang Mediasi
- Ruang Tunggu Jaksa
- Ruang Tunggu Anak
- Toilet Pria, Wanita dan Toilet Difabel Samping Ruang Sidang

1.1.2. Lantai 2 terdiri dari:

- Ruang Kerja Ketua;
- Ruang Kerja Wakil Ketua;
- Ruang Kerja Panitera;
- Ruang Kerja Sekretaris;
- Ruang Command Center
- Ruang Sidang;
- Ruang Kerja Kepaniteraan Muda Pidana;
- Ruang Kerja Kepaniteraan Muda Perdata;
- Ruang Kerja Delegasi;
- Ruang Kerja Eksekusi;
- Ruang Kerja Hakim;
- Ruang Dharmayukti Karini;
- Ruang Tunggu Tamu Terbuka;
- Toilet Pria dan Wanita;

1.1.3 Lantai 3 terdiri dari:

- Ruang Kerja Kepaniteraan Muda Hukum;
- Ruang Arsip;
- Toilet Pria dan Wanita.

1.1.4 Lantai 4 terdiri dari:

- Ruang Kerja Kepala Bagian Umum;
- Ruang Kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
- Ruang Kerja Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana;
- Ruang Kerja Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan;
- Ruang Kerja Panitera Pengganti
- Toilet Pria dan Wanita.

1.1.5 Lantai 5 terdiri dari:

- Ruang Kerja Panitera Pengganti;
- Ruang Perpustakaan;
- Masjid
- Toilet Pria dan Wanita

1.1.6 Basement

- Ruang Tahanan;

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



- Ruang Tilang;
- Gudang;
- Ruang Posbakum;
- Kantin;
- Smoking Area;
- Mushola
- Toilet Pria dan Wanita

Keadaan Inventaris Kantor

No	Uraian	Satuan	Jumlah
	Peralatan dan Mesin		1325
1	Stationary Generating Set	Unit	1
2	Station Wagon	Unit	5
3	Sepeda Motor	Unit	18
4	Alat Pengukur Temperatur	Buah	1
5	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	3
6	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1
7	Lemari Besi/Metal	Buah	14
8	Lemari Kayu	Buah	13
9	Rak Besi	Buah	39
10	Rak Kayu	Buah	2
11	Filing Cabinet Besi	Buah	11
12	Brandkas	Buah	1
13	Buffet	Buah	7
14	Roll Opek	Buah	1
15	Laci Box	Buah	5
16	CCTV - Camera Control Television System	Buah	120
17	Papan Visual/Papan Nama	Buah	10
18	Mesin Absensi	Buah	1
19	Hand Metal Detector	Buah	22
20	Alat Kantor Lainnya	Buah	1
21	Meja Kerja Kayu	Buah	148
22	Kursi Besi/Metal	Buah	278

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



23	Kursi Kayu	Buah	12
24	Sice	Buah	5
25	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	1
26	Bangku Panjang Kayu	Buah	5
27	Meja Rapat	Buah	5
28	Meja Resepsionis	Buah	1
29	A.C. Split	Buah	8
30	Mixer	Buah	1
31	Televisi	Buah	5
32	Loudspeaker	Buah	25
33	Microphone	Buah	44
34	Lambang Garuda Pancasila	Buah	10
35	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	3
36	Tiang Bendera	Buah	14
37	Lambang Instansi	Buah	1
38	Meja Potong	Buah	6
39	Kabel	Buah	1
40	Bracket Standing Peralatan	Buah	10
41	Audio Mixing Console	Buah	3
42	Audio Mixing Stationer	Buah	1
43	Audio Amplifier	Buah	1
44	Microphone/Boom Stand	Buah	2
45	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	18
46	Video Processor	Buah	8
47	Video Conference	Buah	9
48	LCD Monitor	Buah	8
49	Camera Conference	Buah	4
50	Pesawat Telephone	Buah	2
51	Handy Talky (HT)	Buah	20
52	Network Monitoring System	Buah	1

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



53	Alat Komunikasi Lainnya	Buah	1
54	Voltage Regulator	Buah	1
55	Kursi Dorong	Buah	72
56	Cusa Cover	Buah	4
57	Stabilizer	Buah	1
58	TV Monitor	Buah	21
59	Liquid Dispenser	Buah	2
60	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	7
61	Under Vehicle Mirror Set	Buah	1
62	Walk Through Metal Detector	Buah	5
63	Metal Detector	Buah	10
64	Mini Komputer	Buah	11
65	Internet	Buah	1
66	Komputer Jaringan Lainnya	Set	1
67	P.C Unit	Buah	97
68	Laptop	Buah	19
69	Notebook	Buah	26
70	Hard Disk	Buah	4
71	Data Patch Panel	Buah	2
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	53
73	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5
74	External/ Portable Hardisk	Buah	6
75	Server	Buah	5
76	Router	Buah	2
77	Hub	Buah	13
78	Rak Server	Buah	1
79	Switch Rak	Buah	10
80	Acces Point	Buah	1
81	KVM Keyboard Video Monitor	Buah	1

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



82	Elektronik/Electric Lainnya	Unit	3
83	X-Ray Inspection Machine	Buah	1
84	Air Conditioning (AC)	Buah	2

Pemeliharaan/Perawatan Sarana Prasarana Penunjang

Pelaksanaan Tupoksi.

Sedangkan Pemeliharaan/Perawatan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan Tupoksi dilaksanakan pemeliharaan/perawatan sarana prasarana penunjang sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	VOLUME	JADWAL
1.	Pemeliharaan/perawatan kendaraan roda 4 (empat)	5 unit	Setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
2.	Pemeliharaan/perawatan kendaraan roda 2 (dua)	18 unit	Setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
3.	Pemeliharaan/perawatan Personal Komputer (PC)	97 unit	Setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
4.	Pemeliharaan/perawatan Laptop	45 unit	Setiap 6 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
5.	Pemeliharaan/Perawatan AC Split	10 unit	Setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
6.	Pemeliharaan/perawatan AC Sentral	14 unit	Setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
7.	Pemeliharaan/perawatan Mesin Air	9 unit	Setiap 3 bulan dan sesuai dengan kebutuhan
8.	Pemeliharaan/perawat Genzet	1 unit	Setiap bulan dan sesuai dengan kebutuhan
9.	Pemeliharaan/perawatan Lift	2 unit	Dilaksanakan 2 kali setiap bulan dan sesuai kebutuhan
10.	Pemeliharaan/perawatan mesin air	4 unit	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
12.	Pemeliharaan/perawatan Jaringan Internet dan Telephone	2 unit	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
13.	Pemeliharaan/perawatan Instalasi Listrik	1 unit	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
15.	Pemeliharaan/Perawatan CCTV	120 unit	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
16.	Pemeliharaan/Perawatan Alat Rumah Tangga	1 paket	Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan



SARANA DAN PRA SARANA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS 1A
KHUSUS

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Sedan Altis	2017	√	-	-	Hibah
2.	Sedan Altis	2012	√	-	-	BMN
3.	Sedan Vios	2006	√	-	-	BMN
4.	Kijang Super KF 52	1996	√	-	-	BMN
5.	Toyota Kijang STD KF 80	2003	√	-	-	BMN
6.	Kijang Innova	2008	√	-	-	BMN
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	GL Pro	1999		-	√	BMN
2.	GL 160 D	2009	√	-	-	BMN
3.	GL 160 D	2009	√	-	-	BMN
4.	GL 160 D	2009	√	-	-	BMN
5.	GL 160 D	2009	√	-	-	BMN
6.	Supra Pit NF 125 SF	2007	√	-	-	BMN
7.	Kharisma NF 125 D	2003	√	-	-	BMN
8.	Kharisma NF 125 D	2003	√	-	-	BMN
9.	Supra Pit NF 125 SF	2008	√	-	-	BMN
10.	Vario NC 110 D	2009	√	-	-	BMN

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Ketua	1	-
2.	Ruang Wakil Ketua	1	-
3.	Ruang Hakim	6	-
4.	Ruang Panitera	1	-
5.	Ruang Sekretaris	1	-
6.	Ruang Sidang Umum	8	Ruang Sidang Utama, Ruang Sidang Biasa & Ruang Sidang Anak
7.	Ruang Kepaniteraan	3	Ruang Kepaniteraan Pidana, Ruang Kepaniteraan Perdata & Ruang Kepaniteraan Hukum
8.	Ruang Kabag Umum	1	-
9.	Ruang Kasubag TU dan Keuangan	1	-
10.	Ruang Kasubag Kepegawaian	1	-
11.	Ruang Kasubag IT	1	-
12.	Ruang Jurusita	1	-
13.	Ruang Panitera Pengganti	1	-
14.	Ruang Perpustakaan	1	-
15.	Ruang Mediasi	2	Ruang Mediasi 1 & 2
16.	Ruang Rapat	2	Ruang APM & Ruang Humas
17.	Ruang Dharmayuktikarini	1	-
18.	Ruang Arsip	7	4 Arsip Perdata, 2 Arsip Pidana,

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



			1 Arsip TU & Keuangan
19.	Ruang Jaksa	1	-
20.	Ruang Pos Bakum	1	-
21.	Ruang Laktasi	1	-
22.	Ruang Gudang	2	Gudang Dipa 01 & 03

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer / P.C Unit	101	BMN
2.	Infokus	3	BMN
3.	PABX	1	BMN
4.	Mesin Tik	24	BMN
5.	Mesin Fotokopy	2	BMN
6.	AC	16	BMN
7.	Faximile	0	-
8.	Genset	0	-
9.	Lemari Besi	25	BMN
10.	Lemari Kayu	33	BMN
11.	Filing Cabinet Besi	29	BMN
12.	Brandkas	2	BMN
13.	Roll Opec	10	BMN
14.	Tabung Pemadam Api	18	BMN
15.	CCTV	9	BMN
16.	Papan Visual Nama	21	BMN
17.	White Board	21	BMN
18.	Alat Detektor X-Ray	1	BMN
19.	Peta	1	BMN
20.	Alat Penghancur Kertas	3	BMN
21.	Meja Kerja Kayu	305	BMN
22.	Kursi Besi	255	BMN
23.	Kursi Kayu	175	BMN
24.	Sice	8	BMN
25.	Bangku Panjang Kayu	67	BMN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



26.	Meja Rapat	1	BMN
27.	Meja Komputer	2	BMN
28.	Meja repesisionis	3	BMN
29.	Sketsel	23	BMN
30.	Kipas Angin	36	BMN
31.	Exhause Fan	1	BMN
32.	Televisi	16	BMN
33.	Sound System	3	BMN
34.	Microphone	22	BMN
35.	Lambang Garuda Pancasila	12	BMN
36.	Gambar Presiden / Wakil Presiden	4	BMN
37.	Palu Sidang	11	BMN
38.	Handy Cam	1	BMN
39.	Mic Werles (TOA)	4	BMN
40.	Camera Digital	1	BMN
41.	Handy Talky (HT)	6	BMN
42.	Kursi Dorong	1	BMN
43.	Printer	75	BMN
44.	Server	3	BMN
45.	Router	1	BMN
46.	Laptop	69	BMN
47.	Camera & Video Teleconference	9	BMN
48.	Rak Besi	68	BMN
49.	AC Window	2	BMN



**SARANA DAN PRA SARANA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS 1A
KHUSUS**

1. Pemeliharaan

Pengadilan Negeri / Perikanan Jakarta Utara memiliki tanah dan bangunan sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Luas		Tahun Perolehan
		Tanah	Bangunan	
1.	Tanah Untuk kantor Pemerintah	4.125 M2	-	1979
2.	Bangunan Untuk Kantor Pemeintah	-	2.379 M2	1984

Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat sementara di Jalan Gajah Mada No. 17 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat (Ex Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), dengan luas halaman sebesar 4.125 m2 dan luas bangunan 2.379 m2.

Dibawah ini tabel ketersediaan ruangan pada gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara kelas IA Khusus.

No	Nama Ruangan	Jumlah
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Panitera	1
4	Ruang Sekretaris	1
5	Ruang Hakim	6
6	Ruang Kepaniteraan Perdata	1
7	Ruang Kepaniteraan Pidana	1
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1
9	Ruang PTIP	1
10	Ruang Juru Sita	1
11	Ruang Kepala Bagian Umum	1
12	Ruang Tata Usaha & Umum	1
13	Ruang Kepegawaian & Ortala	1
14	Ruang Sidang	8

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



15	Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1
16	Ruang Mediasi	1
17	Ruang Sidang Anak	1
18	Ruang Sidang Laktasi	1
19	Ruang Diversi	1
20	Ruang Perpustakaan	1
21	Ruang Tamu Terbuka	1
22	Ruang Rapat	1
23	Ruang Panitera Pengganti	4
24	Ruang Server	1
25	Toilet	9
26	Smoking Area	1
27	Ruang Tunggu Jaksa	1
28	Ruang Wartawan	1
29	Ruang Tahanan	1
30	Ruang Tilang	1
31	Ruang Posbakum	1
32	Ruang Pos Security	1
33	Ruang Arsip	1

Pengadilan Negeri Jakarta Utara memiliki aset sebagai berikut:

1. Kendaraan Roda 4 (empat) terdiri dari: 5 (Lima) unit

No	Jenis Kendaraan	No. Polisi	Tahun Perolehan	Penanggung Jawab / Pemakai
1.	Toyota New Vios 1.5 GMT	B 8559 WU	2009	Sekretaris
2.	Toyota Corola Altis	B 1035 HQ	2008	Wakil Ketua Pengadilan Negeri
3.	Toyota Kijang KF 5	B 2099 JQ	1995	Operasional Umum
4.	Toyota Kijang STD KF 70 SHR	B 2141 PQ	2002	Operasional Umum
5.	Toyota Kijang Innova Tipe V	B 1339 PQN	2009	Panitera
6.	Toyota New Kijang Innova Tipe E std	B 1064 UQN	2011	Ketua Pengadilan Negeri

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



Kendaraan Roda 2 (dua) : 15 (Empat Belas) Unit

No	Jenis Kendaraan	No. BPKB/ STNK	No. Polisi	Tahun Perolehan	Penanggung Jawab / Kondisi
1	Honda Kirana ND 125	8402330	B 6274 UQQ	2004	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
2	Honda Kirana ND 125	8401884	B 6273 UQQ	2004	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
3	Honda Kharisma ND 125	7137316 / 0981700	B 5612 HQ	2003	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
4	Honda Kharisma ND 125	7137745	B 5608 HQ	2003	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
5	Honda Mega Pro GL 160 D	5236901 / AF 2716454	B 6297 UQQ	2008	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
6	Honda Mega Pro GL 160 D	H-01480121 / 1407445	B 6356 UQQ	2009	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
7	Honda Mega Pro GL 160 D	H-01480133 / 1407449	B 6355 UQQ	2009	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
8	Honda Mega Pro GL 160 D	7077619 / 1191946	B 6299 UQQ	2009	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
9	Honda Mega Pro GL 160 D	H-01480125 / 1407443	B 6357 UQQ	2009	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
10	Honda Mega Pro GL 160 D	H-01480126 /	B 6353 UQQ	2009	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
11	Honda Supra X 125 D	H-01480124 / 1407447	B 6352 UQQ	2009	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
12	Honda Supra X 125 D	H-01480122 / 03414524	B 6351 UQQ	2009	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
13	Honda Supra X 125 D	H-01480123 / 03414523	B 6350 UQQ	2009	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
14	Honda Supra X 125 D	H-01480132 / 1407446	B 6354 UQQ	2009	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat
15	Honda Supra 125 New	I-11879129 / 14195724	B 6493 UQQ	2012	Bagian Tata Usaha / Rusak Berat

1. Inventaris Kantor

No	Jenis Barang Inventaris	Jumlah
1	Mesin Ketik Manual	10 Unit
2	Mesin Ketik Elektronik	5 Unit
3	Mesin Foto Copy Folio	2 Unit
4	Rissograf	1 Unit
5	Lemari Besi / Metal	21 Unit
6	Lemari Kayu	46 Unit
7	Rak Besi	88 Unit
8	Rak Kayu	19 Unit
9	Filling Cabinet Besi	40 Unit
10	Brandkas	3 Unit
11	Roll Opek	15 Unit
12	Tabung Pemadam Api	3 Unit
13	CCTV	6 Unit

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



14	Papan Visual / Papan Nama	12 Unit
15	White Board	8 Unit
16	Alat Detector Barang Terlarang / X-Ray	2 Unit
17	Alat Penghancur Kertas	1 Unit
18	Mesin Absensi	2 Unit
19	Hard Metal Detector	2 Unit
20	LCD Projector / Infocus	14 Unit
21	Meja Kerja Besi / Metal	7 Unit
22	Meja Kerja Kayu	246 Unit
23	Kursi Besi / Metal	340 Unit
24	Kursi Kayu	121 Unit
25	Sice	18 Unit
26	Bangku Panjang Besi	6 Unit
27	Bangku Panjang Kayu	78 Unit
28	Meja Komputer	2 Unit
29	Sketsel	1 Unit
30	Pot Bunga	4 Unit
31	Jam Elektronik	31 Unit
32	A.C Split	47 Unit
33	Kipas Angin	21 Unit
34	Televisi	10 Unit
35	Loudspeaker	2 Unit
36	Sound System	7 Unit
37	Alat Hiasan	4 Unit
38	Lambang Garuda Pancasila	9 Unit
39	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	3 Unit
40	Pataka	15 Unit
41	Kaca Hias	5 Unit
42	Dispenser	2 Unit
43	Mimbar / Podium	1 Unit
44	Palu Sidang	7 Unit
45	Lambang Instansi	12 Unit
46	Camera Digital	1 Unit
47	P.C. Unit	56 Unit
48	Laptop	34 Unit
49	Printer	26 Unit
50	Scanner	8 Unit
51	Jet Pump	1 Unit
52	Tv Monitor	4 Unit
53	Instalasi Komunikasi Elektronik (Hibah Australia)	4 Unit
54	Mini Komputer (Hibah Australia)	4 Unit
55	Video Conference (Hibah Australia)	4 Unit
56	Peralatan Studio Video dan Film Lainnya (Hibah Australia)	4 Unit
57	Microphone (Hibah Australia)	4 Unit
58	Lisensi (Hibah Australia)	4 Unit
59	Bracket Standing Peralatan (Hibah Australia)	4 Unit
60	Hard disk (Hibah Australia)	4 Unit



Pengadilan Negeri / Perikanan Jakarta Utara juga memiliki Server 2 Unit Lengkap pada Ruang IT yang digunakan untuk memobilisasi teknologi informasi yang ada pada Pengadilan Negeri / Perikanan Jakarta Utara.

Selain itu dalam hal penyampaian informasi berbasis teknologi, Pengadilan Negeri / Perikanan Jakarta Utara telah menggunakan fasilitas surat elektronik / Email dalam pengiriman data data berbasis teknologi informasi. Alamat Email yang dimiliki Pengadilan Negeri / Perikanan Jakarta Utara adalah sebagai berikut pengadilannegerijakartautara@gmail.com

2. Administrasi Umum

1. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar telah dilaksanakan sesuai standar pengelolaan surat instansi.
2. Pengelolaan administrasi inventaris barang milik negara dilaksanakan berdasarkan pedoman penatausahaan barang milik negara dilingkungan mahkamah agung dan pengadilan di semua peradilan.
3. Pengelolaan perpustakaan juga sudah sesuai dengan standar pengelolaan perpustakaan instansi.
4. Pengadaan ATK dan barang jasa lainnya, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur KEPPRES 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Pengiriman laporan inventaris berbasis SIMAK BMN dilaksanakan setiap semester setiap pengadilan DKI Jakarta yang ditunjang oleh Mahkamah Agung sebagai koordinator wilayah untuk semua peradilan di DKI Jakarta.

Sebagaimana surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.529A-1/SEK/KU.01/12/2015 tanggal 23 Desember 2015, Hal : Ijin Menempati Gedung Lama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama masa Rehab/Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 180/KMA/SK/XII/2015 tentang Pemindahan Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat.



SARANA DAN PRA SARANA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS 1A KHUSUS

1. Gedung

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno No.1, Penggilingan Jakarta Timur mulai dibangun tahun 2008 di atas tanah seluas 6.458 m². Gedung terdiri dari 5 lantai dengan 1 basement dimana luas keseluruhan mencapai ± 7864 m². Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus adalah Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus yang ditempati sekarang ini diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012, oleh Bapak H. A. Arifin Tumpa, SH. MH. Selaku Ketua Mahkamah Agung.

Status tanah Hak Pakai dengan pemegang hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia: 10082/T/9 yang di atasnya dibangun gedung kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus seluas 1.802 m² terdiri dari 1 (satu) bangunan dengan 5 (lima) lantai. Dengan detail sebagai berikut:

NO	NAMA	JUMLAH RUANG	KONDISI
1	Ruang Ketua	1 ruang	Baik
2	Ruang Wakil	1 ruang	Baik
3	Ruang Panitera	1 ruang	Baik
4	Ruang Sekretaris	1 ruang	Baik
5	Ruang Hakim	9 ruang	Baik
7	Ruang Kabag Umum	1 ruang	Baik
8	Ruang Jurusita	1 ruang	Baik
9	Ruang Sidang Utama	1 ruang	Baik
10	Ruang Sidang Besar	3 ruang	Baik
11	Ruang Sidang Sedang	4 ruang	Baik
12	Ruang Sidang Anak	1 ruang	Baik
13	Ruang Tunggu	8 ruang	Baik
14	Ruang Panitera Pengganti	1 ruang	Baik
15	Ruang Kepaniteraan Perdata	1 ruang	Baik
16	Ruang Kepaniteraan Pidana	1 ruang	Baik
17	Ruang Kepaniteraan Hukum	1 ruang	Baik
18	Ruang Subbag Kepegawaian	1 ruang	Baik
19	Ruang Subbag TU & Keu	1 ruang	Baik
	Ruang Subbag PTIP	1 ruang	Baik
20	Ruang Tahanan	3 ruang	Baik
21	Ruang Arsip	1 ruang	Baik
22	Ruang Jaksa	1 ruang	Baik
23	Ruang Perpustakaan	1 ruang	Baik
24	Ruang Ibadah/Mushola	2 ruang	Baik
25	Ruang Tunggu Anak	1 ruang	Baik
26	Ruang Toilet	13 ruang	Baik
27	Ruang Toilet Difabel	1 ruang	Baik

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



28	Ruang kantin	1 ruang	Baik
29	Ruang Pelayanan Terpadu	2 ruang	Baik
30	Ruang Informasi	1 ruang	Baik
31	Ruang Satpam	3 ruang	Baik
32	Ruang Bank	1 ruang	Baik

Berikut Foto Gedung Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari masa ke masa:



2. Data Pemeliharaan dan Perawatan Sarana

a. Renovasi

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus tidak ada renovasi Gedung.

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

1. Kendaraan Roda Dua

NO	MERK	NO.POL	TH. PEROLEHAN
1	Honda Tiger 2000	B 6380 TQA	2008
2	Yamaha	B 6086 TQB	2011
3	Yamaha Mio Soul	B 6087 TQA	2011
4	Yamaha Mio Soul	B 6085 TQB	2011
5	Honda Kharisma	B 6820 AQ	2003
6	Honda GLP III	B 6290 JQ	1999
7	Honda Kharisma	B 6767 JQ	2003
8	Honda Mega GL 160	B 6343 TQA	2007
9	Yamaha L2S	B 3510 JQ	1981



c. Kendaraan Roda Empat

NO	MERK	NO.POL	TH. PEROLEHAN
1	Grand Livina	B 1392 TQN	2011
2	Toyota New Vios	B 8636 WU	2009
3	Toyota Kijang Inova	B 1375 PQN	2009
4	Toyota Kijang	B 2098 JQ	1995
5	Toyota Kijang	B 2142 PQ	2002

d. Sarana barang lainnya sesuai daftar Inventaris di bawah ini :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		KEADAAN		
				B	RR	RB
1	Mesin Ketik Manual	22	Buah	-	-	22
2	Mesin Photo copy	1	Buah	1	-	-
3	Lemari Besi	27	Buah	18	2	7
4	Lemari Kayu	125	Buah	50	25	50
5	Rak Kayu	95	Buah	25	15	55
6	Filling Kabinet Besi	36	Buah	20	11	5
7	Brankas	2	Buah	2	-	-
8	Alat Pemadam Kebakaran	7	Buah	1	-	6
9	White Board	14	Buah	10	3	1
10	Alat Detektor	1	Buah	1	-	-
11	Peta	1	Buah	1	-	-
12	Kursi Kerja Kayu	165	Buah	-	43	122
13	Kursi Besi./ Metal	221	Buah	-	21	200
14	Kursi Kayu	135	Buah	91	21	23
15	Sice	28	Buah	8	-	20
16	Bangku Panjang Kayu	129	Buah	100	29	-
17	Meja Rapat	4	Buah	4	-	-
18	Meja Komputer	19	Buah	17	2	-
19	Meja Resepsionis	4	Buah	4	-	-
20	Kursi Fiber / Plastik	6	Buah	1	3	2
21	AC	25	Buah	8	7	10
22	Kipas Angin	42	Buah	3	9	30

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



23	Printer	44	Buah	20	6	20
24	Komputer / PC Unit	51	Buah	52	8	10
25	Laptop	26	Buah	20	2	4
26	CCTV	32	Buah	32	-	-

Keterangan : B = Baik
RR = Rusak Ringan
RB = Rusak Berat

3. Pengadaan :

Belanja Modal Dari DIPA tahun 2022 untuk pengadaan sarana dan prasana gedung kantor berjumlah Rp 266.500.000- (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Belanja Modal PC Keaniteraan yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	PC Keaniteraan	256.500.000	256.500.000	0	100 %
2	Printer	10.000.000	10.000.000	0	100 %
JUMLAH		266.500.000	266.500.000	0	100 %

4. Pengelolaan Administrasi Umum / Persuratan

Pengelolaan persuratan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus dilakukan melalui aplikasi e-surat yaitu sebanyak **10551** surat masuk, dan **10248** surat keluar pada tahun 2022.

No	Tanggal Register	Nomor Register	Status	Program	Status	Alamat	Waktu
1	14/01/2022	00000001	Selesai	PERANGKAP KASUS	Selesai	Widyadarmas (Ses. Lanj. Pk. 1A) (Ses. Lanj. Pk. 1A)	4 Hari
2	14/01/2022	00000002	Selesai	PERANGKAP KASUS	Selesai	Widyadarmas (Ses. Lanj. Pk. 1A) (Ses. Lanj. Pk. 1A)	4 Hari
3	14/01/2022	00000003	Selesai	PERANGKAP KASUS	Selesai	Widyadarmas (Ses. Lanj. Pk. 1A) (Ses. Lanj. Pk. 1A)	4 Hari
4	14/01/2022	00000004	Selesai	PERANGKAP KASUS	Selesai	Widyadarmas (Ses. Lanj. Pk. 1A) (Ses. Lanj. Pk. 1A)	4 Hari
5	14/01/2022	00000005	Selesai	PERANGKAP KASUS	Selesai	Widyadarmas (Ses. Lanj. Pk. 1A) (Ses. Lanj. Pk. 1A)	4 Hari
6	14/01/2022	00000006	Selesai	PERANGKAP KASUS	Selesai	Widyadarmas (Ses. Lanj. Pk. 1A) (Ses. Lanj. Pk. 1A)	4 Hari
7	14/01/2022	00000007	Selesai	PERANGKAP KASUS	Selesai	Widyadarmas (Ses. Lanj. Pk. 1A) (Ses. Lanj. Pk. 1A)	4 Hari
8	14/01/2022	00000008	Selesai	PERANGKAP KASUS	Selesai	Widyadarmas (Ses. Lanj. Pk. 1A) (Ses. Lanj. Pk. 1A)	4 Hari
9	14/01/2022	00000009	Selesai	PERANGKAP KASUS	Selesai	Widyadarmas (Ses. Lanj. Pk. 1A) (Ses. Lanj. Pk. 1A)	4 Hari
10	14/01/2022	00000010	Selesai	PERANGKAP KASUS	Selesai	Widyadarmas (Ses. Lanj. Pk. 1A) (Ses. Lanj. Pk. 1A)	4 Hari

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR

Register Surat Perkara

No	No Register	Revisi Surat	Surat Register	Tipe Register	Status	Waktu	#
1	0000000	WPU-0000000000-00000000	Surat Perintah Pengambilan	Surat Perintah Pengambilan	Finalisasi	21 Mei	1
2	0000000	WPU-0000000000-00000000	Surat Perintah	PERKARA PERALIHAN, CAK, KWH	Finalisasi	21 Mei	1
3	0000000	WPU-0000000000-00000000	Surat Perintah	PERKARA PERALIHAN, CAK, KWH	Finalisasi	21 Mei	1
4	0000000	WPU-0000000000-00000000	Surat Perintah	Perbaikan Register	Finalisasi	21 Mei	1
5	0000000	WPU-0000000000-00000000	Surat Perintah	Perbaikan Register	Finalisasi	21 Mei	1
6	0000000	WPU-0000000000-00000000	Surat Perintah	Surat Perintah	Finalisasi	21 Mei	1
7	0000000	WPU-0000000000-00000000	Surat Perintah	PERALIHAN PERALIHAN	Finalisasi	21 Mei	1
8	0000000	WPU-0000000000-00000000	Surat Perintah	PERALIHAN PERALIHAN	Finalisasi	21 Mei	1
9	0000000	WPU-0000000000-00000000	Surat Perintah	PERALIHAN PERALIHAN	Finalisasi	21 Mei	1
10	0000000	WPU-0000000000-00000000	Surat Perintah	PERALIHAN PERALIHAN	Finalisasi	21 Mei	1



PENGADILAN TINGGI
DKI JAKARTA

LAMPIRAN 5 PENGELOLAAN TI

PENGADILAN NEGERI SE - WILAYAH HUKUM
DKI JAKARTA



PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS 1A

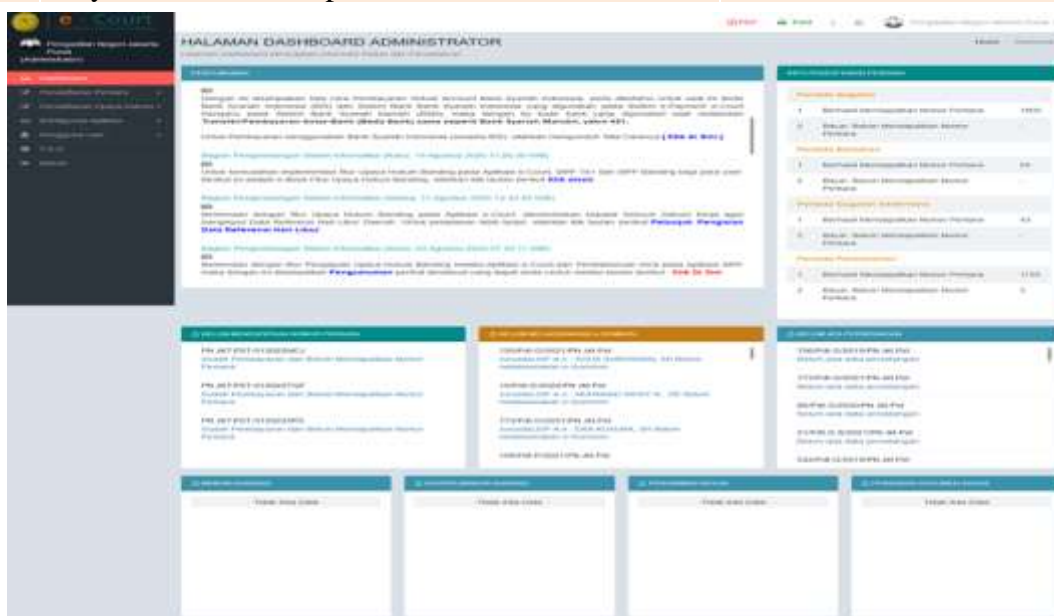
A.

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. IMPLEMENTASI E-COURT.

Mahkamah Agung berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan dikeluarkannya aplikasi e-court. Aplikasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung yang nyata. Aplikasi e-court secara garis besar terbagi atas 3 unggulan yaitu, **e-filing** (pengisian data-data pendaftaran perkara), **e-payment** (pembayaran panjar perkara), dan **e-summons** (pemanggilan para pihak melalui alamat domisili). e-court dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta aplikasi layanan perkara lainnya yang bersifat elektronik. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus telah menerapkan penggunaan Aplikasi E-court dan Jumlah Perkara yang masuk pada Tahun 2022 melalui Aplikasi E-court sebanyak:

PERDATA GUGATAN		
1	Berhasil mendapatkan Nomor Perkara	726
2	Bayar, Belum mendapatkan Nomor Perkara	-
PERDATA BANTAHAN		
1	Berhasil mendapatkan Nomor Perkara	20
2	Bayar. Belum mendapatkan Nomor Perkara	-
PERDATA GUGATAN SEDERHANA		
1	Berhasil mendapatkan Nomor Perkara	17
2	Bayar. Belum mendapatkan Nomor Perkara	-
PERDATA PERMOHONAN		
1	Berhasil mendapatkan Nomor Perkara	613
2	Bayar. Belum mendapatkan Nomor Perkara	-



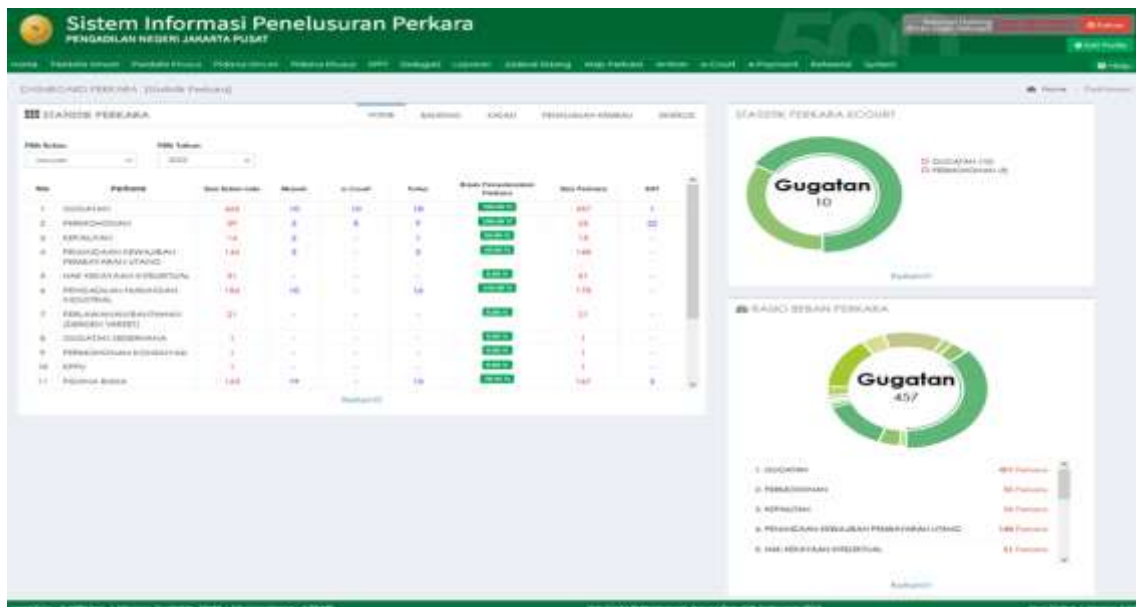


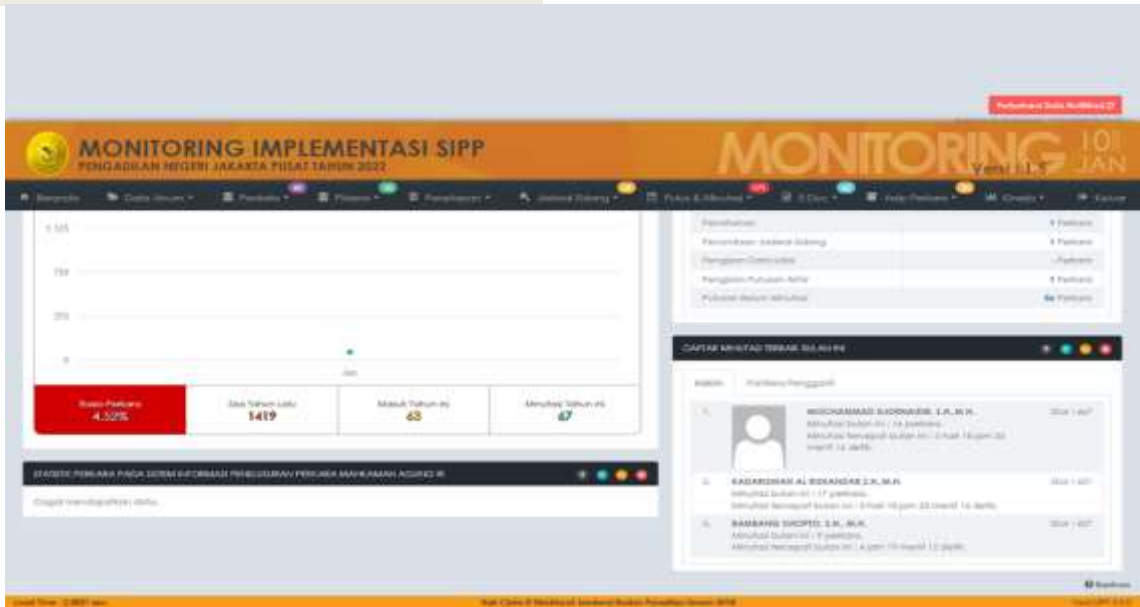
Untuk mempermudah akses dan pemahaman sistem e-court, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sudah menyediakan fasilitas **Pojok e-court** yang berguna untuk para pencari keadilan apabila ada berkas dokumen yang belum di *upload* bisa memanfaatkan area tersebut untuk mengakses sistem e-court, begitu juga sekaligus sebagai pembelajaran bagi para pencari keadilan untuk mendaftarkan akun dan belajar proses sistem e-court **yang di pandu oleh petugas *helpdesk ecourt* yang tersedia di Loker Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).**

2. IMPLEMENTASI SIPP

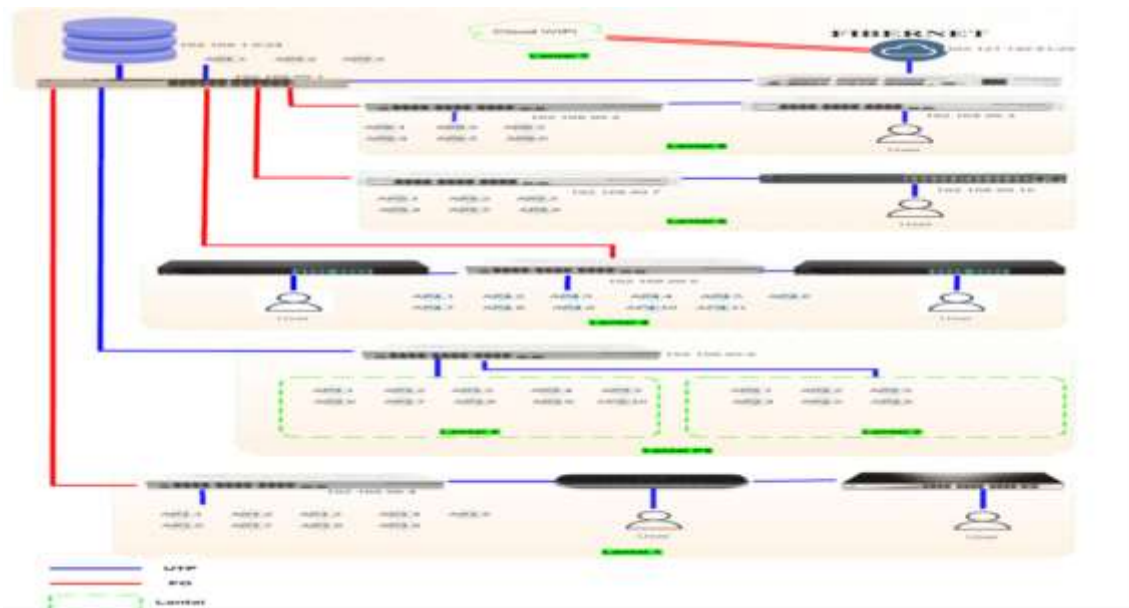
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja Hakim di seluruh wilayah. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal Pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk memperbaharui informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus pada tahun 2022 dapat digambarkan:





3. TOPOLOGI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS





PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS 1A KHUSUS

A. Pengelolaan Teknologi Informasi.

1. Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Semenjak diberlakukannya PERMA 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengadilan Pilot Project yang didaulat melaksanakan PERMA 3 Tahun 2018 tersebut telah melaksanakannya dengan baik, terlebih hal ini didukung pula oleh seluruh unsur Pimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Dengan adanya PERMA 1 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyempurnakan PERMA 3 Tahun 2018, maka sebagai pilot project Pengadilan Negeri Jakarta Barat melaksanakan Peraturan tersebut mulai tanggal 19 Agustus 2022, adapun peraturan pendukung lainnya seperti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik menjadi acuan pelaksanaan teknis administrasi Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada awalnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dilaksanakan sosialisasi internal dilingkungan aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan sosialisai external ke Para advokat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta Penanganan perkara melalui elektronik tersebut telah dilaksanakan hingga 26 Desember 2022 sebagai berikut:

Berhasil mendapat Nomor Perkara

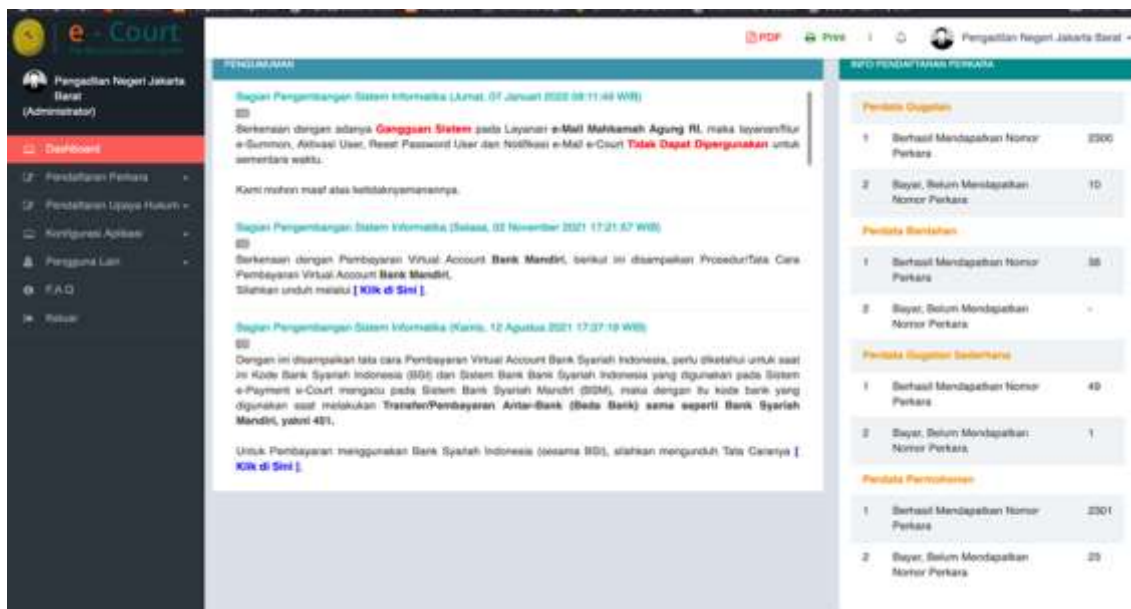
1. Perkara Gugatan	: 3454 Perkara
2. Perkara Gugatan Sederhana	: 67 Perkara
3. Perkara Bantahan	: 61 Perkara
4. Permohonan	: 3827 Perkara

Perkara Litigasi

1. Perkara Gugatan	: 183 Perkara
2. Perkara Gugatan Sederhana	: 0 Perkara
3. Perkara Bantahan	: 6 Perkara
4. Permohonan	: 2 Perkara

Dalam mendukung pelaksanaan Perma 1 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dibentuk unit pelayanan berupa meja e-court/Pojok e-court dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

: W10-U2/183/KP.02.1/10/2021 tentang Penunjukan Tim Penanganan Pelaksanaan e-court Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga telah menggunakan alat pengolah data dan komunikasi pendukung e-court berupa 2 (dua) unit PC All In One yang berada di meja pojok e-court.



B. Implementasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaimana tahun-tahun sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini ditandai dengan seluruh aparaturnya yang terkait pada Aplikasi SIPP telah menginput sesuai kewenangan masing-masing, hal ini untuk meminimalisir kesalahan input arsip digital kedalam bank data SIPP pada aplikasi direktori putusan sebagai keterbukaan informasi publik sebagaimana SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah termutakhirkan dengan versi terbaru sebagaimana arahan dari Tim Pengembang (Development Team) Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sampai dengan laporan pelaksanaan kegiatan ini disusun, SIPP tersebut telah menggunakan versi 5.0.0;

Adapun jumlah rasio penyelesaian perkara melalui aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Barat per tanggal 26 Desember 2022 yaitu sebesar 78,74% dan pencapaian nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) per tanggal 26 Desember adalah 825,81 poin;

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



C. Perangkat / Hardware dan Software / Server

Dalam pengelolaan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat didukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak serta adanya manajemen koneksi pada jaringan seperti berikut:

Perangkat Keras/Hardware

FUJITSU Server PRIMERGY TX1330 M4	
Chipset	Intel® C246
Mainboard type	D3673
Product Type	Mono Socket Tower Server
Processor	Intel® Xeon® E-2200 processor family, Intel® Xeon® E-2100 processor family, Intel® Pentium® processor, Intel® Core™ i3 processor
Memory	4 GB - 128 GB, DIMM (DDR4)
Memory protection	ECC
Storage drive bays	3.5-inch or 2.5-inch hot-plug SAS/SATA Max. 4x 3.5-inch or 8x 2.5-inch Max. 12x 3.5-inch or 24x 2.5-inch
I/O controller onboard	Intel® C246, 2 ports used for accessible drives Optionally integrated RAID 0/1 or RAID 5/6 controller for SAS base units (occupies one PCIe slot)., All hardware storage controller options are described under Components Intel® i210 onboard 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet Integrated Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB attached memory incl. graphics controller), IPMI 2.0 compatible
Active power (max. configuration)	231 W



Fujitsu PRIMERGY TX1330	
Category	Servers
Main Specifications	
Mainboard / Chipset Type	Intel C236
Mainboard / Processor Socket	LGA1151 Socket
Networking / Data Link Protocol	Ethernet;Fast Ethernet;Gigabit Ethernet;
Processor / Clock Speed	3 GHz
Processor / Number of Cores	Quad-Core
Processor / Processor Number	E3-1220V6
Processor / Type	Xeon
RAM / Data Integrity Check	ECC
Cache Memory	
Cache Per Processor	8 MB
Expansion / Connectivity	
Bays	4 (total) / 4 (free) x hot-swap 3.5" 3 (total) / 2 (free) x external 5.25"
Interfaces	5 x USB 2.0 (4 rear, 1 internal) 5 x USB 3.0 (2 front, 2 rear, 1 internal) 1 x VGA 1 x serial 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x management - RJ-45
Slots	1 (total) / 0 (free) x CPU 4 (total) / 3 (free) x DIMM 288-pin 1 (total) / 1 (free) x PCIe 3.0 x4 - full-height (x1 mode) 1 (total) / 1 (free) x PCIe 3.0 x4 - full-height 2 (total) / 2 (free) x PCIe 3.0 x8 - full-height
Networking	
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet Controller	Intel I210
Ethernet Ports	2 x Gigabit Ethernet
Processor / Chipset	
Chipset Type	Intel C236
CPU	Intel Xeon E3-1220V6 / 3 GHz
Max Turbo Speed	3.5 GHz
Number of Cores	Quad-Core
Processor Main Features	Intel Turbo Boost Technology 2
RAM	
Effective Memory Speed	2400 MHz
Installed Size	8 GB
Rated Memory Speed	2400 MHz
Slots	4
Power	300 Watt

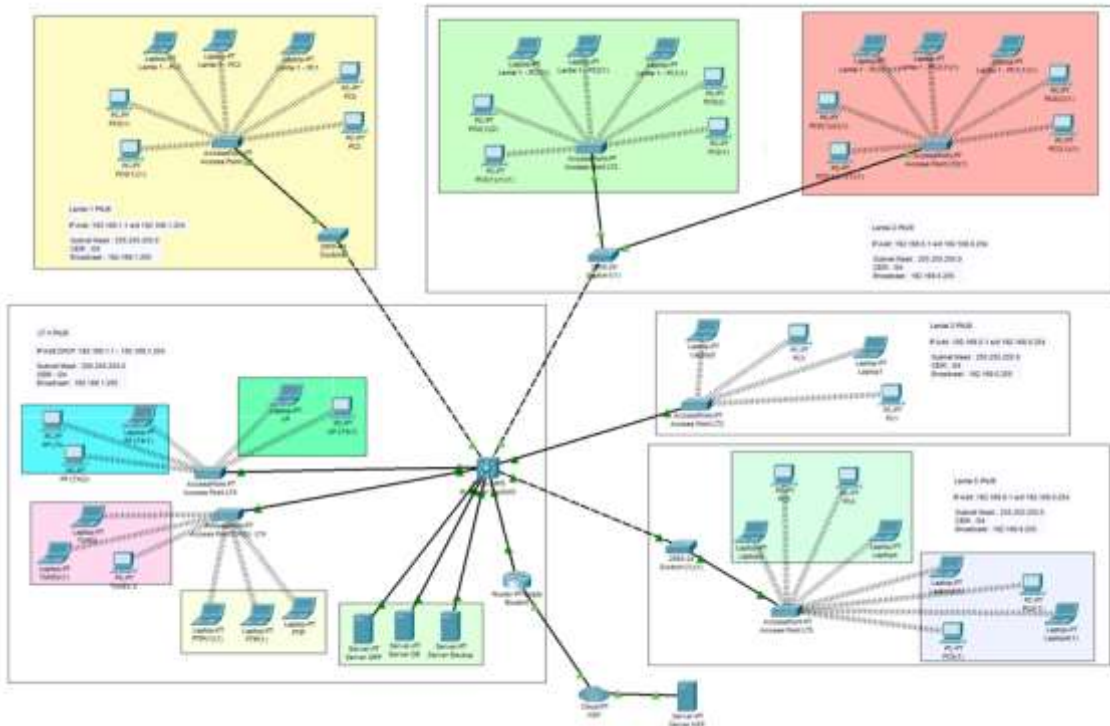
D. Perangkat Lunak/Software

1. Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
2. Aplikasi Antrian PTSP
3. Aplikasi Persuratan
4. SIKEP Mahkamah Agung



5. Aplikasi Tilang Online
6. Aplikasi Indeks Harian Kepuasan Masyarakat PTSP
7. Aplikasi Monitoring BMN Kendaraan Dinas
8. Website.

E. Topologi Jaringan



INTERNET	: HSP NET
SERVER	: 1. FUJITSU PRIMERGY TX 1330 M3 2. FUJITSU PRIMERGY TX 1330 M4 3. IBM X3500 M4
ROUTER	: LINKSYS LRT 224
MAIN SWITCH	: LINKSYS LGS 552 52 PORT
SWITCH	: LINKSYS LGS318P 18-Port Gigabit PoE+ Smart Switch
ACCES POINT	: LINKSYS LAPN600 Wireless-N600 Dual Band Access Point with PoE.



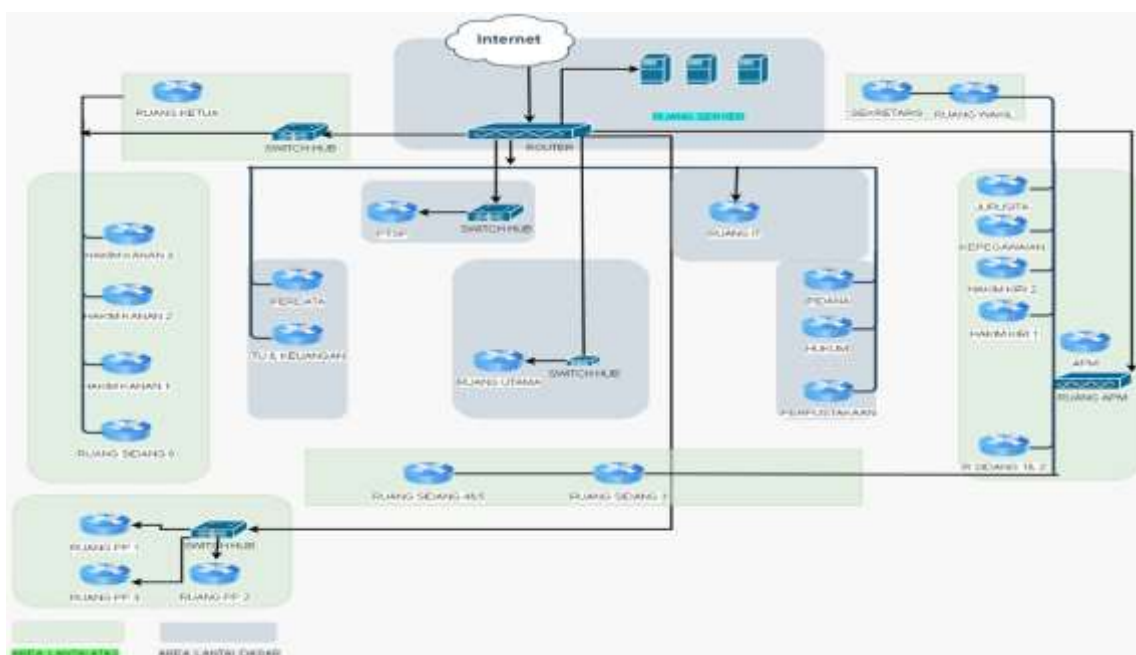
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS

A. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung berbasis teknologi dan keterbukaan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih terus berinovasi dalam Teknologi Informasi (TI), selain untuk meningkatkan dalam hal pekerjaan untuk mencapai hasil yang maksimal, efisien dan efektif dan juga untuk terpenuhinya kebutuhan para pencari keadilan dengan cepat, transparan, akuntabel dan adil. Hal ini diperkuat dengan adanya sarana dan prasarana mulai dari perangkat lunak seperti:

- a. Perangkat Lunak : Website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sistem Penelusuran Perkara (SIPP), Direktori Putusan, SIKEP, e -Court, e-Raterang, KOMDANAS, Aplikasi Ajungan Mandiri, Aplikasi Antrian Online, SIMPONI dan SIMARI(Aplikasi yang berhubungan dengan PNPB), SAKIP, SIASN dan e-KINERJA (Aplikasi yang berhubungan dengan Kepegawaian), e-TAMU (Buku Tamu/Pengunjung Digital), SAKTI, SMART DJA, e-BAPPENAS PP-39 (Aplikasi yang berhubungan dengan Keuangan), dan aplikasi lainnya.
- b. Perangkat Keras : CCTV, LCD / Projektor / Infocus, Focusing Screen / Layar LCD Projector, Televisi, UPS, Personal Computer / PC, Laptop, Printer, Scanner, Server, Router (Mikrotik), Modem, Note Book, PC Unit.

TOPOLOGI JARINGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN



1. IMPLEMENTASI E – COURT DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Mahkamah Agung kembali berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan dikeluarkannya aplikasi e-Court. Aplikasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung yang nyata. Aplikasi e-court secara garis besar terbagi atas 3 unggulan yaitu, **e- Filling** (pengisian data–data pendaftaran perkara), **e- Payment** (pembayaran panjar perkara), **e-Summons** (pemanggilan para pihak melalui alamat domisili). e- court dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta aplikasi layanan perkara lainnya yang bersifat elektronik.

Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerapkan penggunaan Aplikasi e-Court dan Jumlah Perkara yang masuk melalui Aplikasi e-Court sebanyak:

The screenshot displays the 'HALAMAN DASHBOARD ADMINISTRATOR' for the e-Court system. It features a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Daftar Perdata Umum', and 'Pengguna Lain'. The main content area includes several system update notices (e.g., 'Bagian Pengembangan Sistem Informatika (Selasa, 20 Desember 2022 22:15:01 WIB)') and a 'WFO-PENGETIKAWA PERMAK' section with a table of case statistics.

Kategori	1	2	3
Perdata Gugatan	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	3610	
	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara	7	
	Jumlah Perkara Litigasi	668	
Perdata Bantahan	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	58	
	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara	1	
	Jumlah Perkara Litigasi	10	
Perdata Gugatan Berkecukupan	Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara	176	
	Bayar, Belum Mendapatkan Nomor Perkara	1	
	Jumlah Perkara Litigasi	-	

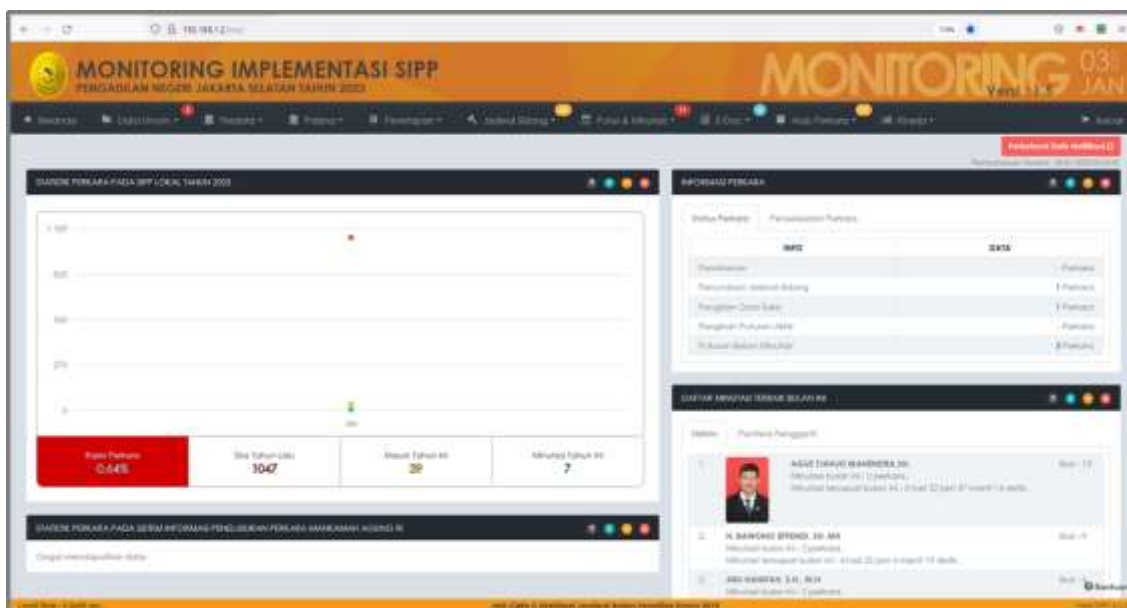
Electronic Court (e-Court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Beracara dari negeri kangguru (Australia), e-Court menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya e-Court ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital.



2. IMPLEMENTASI SIPP DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Versi 1.5

SIPP adalah Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan dan sebagai bentuk transparansi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

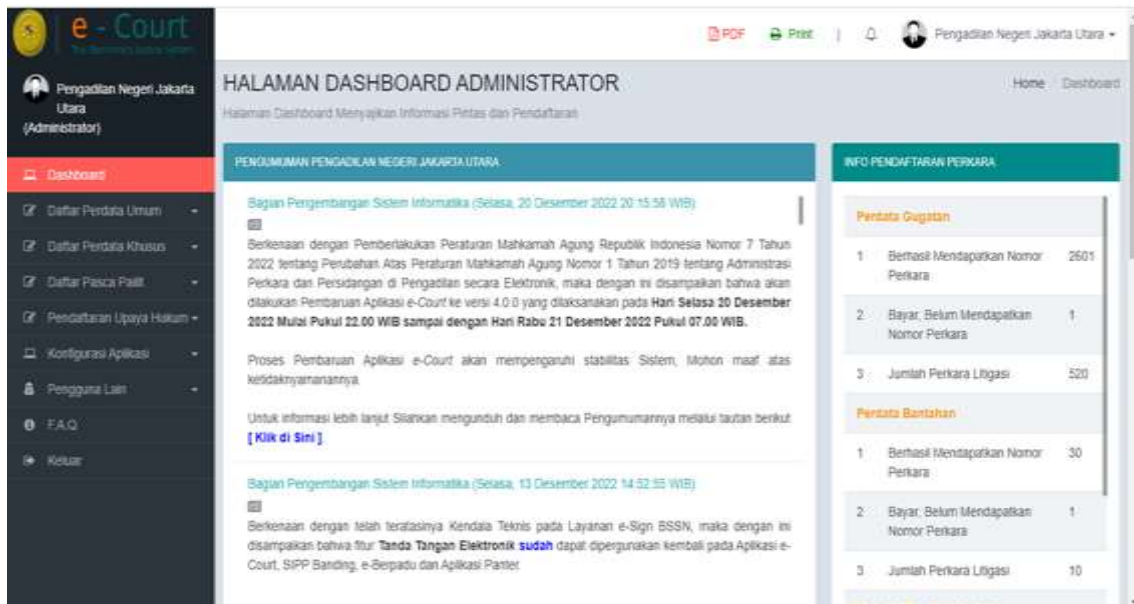
Upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terus-menerus dilakukan melalui peningkatan ketepatan waktu pengisian SIPP. Selain itu dengan adanya MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dapat membantu dalam memonitoring pengisian SIPP tersebut, dan dengan adanya monitoring tersebut di harapkan dapat membantu untuk peningkatan dan ketepatan dalam pengisian SIPP di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS 1A KHUSUS

1. Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah menerapkan Surat Edaran dari Dirjen Badan Peradilan Umum No. 4 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Pendaftaran perkara perdata melalui e-Court. Aplikasi *e-court* (*e-Filling, e-Summon, e-Litigasi*) selain bagi para Advokat yang sudah terdaftar, juga dapat digunakan oleh masyarakat pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara perdata harus melalui meja ecourt yang tersedia.





Aplikasi e-Court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2019. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2019 yaitu Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2019 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di Dunia Peradilan Indonesia (Justice Reform) yang mensinergikan peran Teknologi Informasi (IT) dengan Hukum Acara.

E-Court adalah Aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail.

2. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan serta yang terpenting adalah sebagai media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengimplementasikan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan saat ini telah terinstall versi 5.1.0 sehingga dengan format SIPP versi 5.1.0. masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses pengadilan melalui Website, dimana terdapat fitur – fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi on-line, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana Umum | Pidana Khusus | IPR | Delegasi | Laporan | Jadwal Sidang | Anjak Perkara | Anjakan | e-Court | e-Payment | Peleas | Seleksi | System

STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

Key Indikator Perkara: Pembahasan Perkara, Status Perkara, Status Penahanan, Status Jumlah Kuangan Perkara

Jumlah: 2023

No	Perkara	Isa Bulan Lalu	Masuk	Pulus	Rasio Penyelesaian Perkara	Siwa	Banding	Kasasi	Peningkatan Kemasi	Selesai	Orasi
1	Gugatan	186	3	2	66.47 %	287	-	-	-	-	-
2	Penahanan	34	2	4	20.00 %	32	-	-	-	-	-
3	Kepailitan	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
4	Penambahan Keahlian Pembahasan Undang	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
5	Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
6	Pengadilan Hubungan Industrial	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
7	Perkawinan/Samanan (Jalan Waras)	6	-	-	0.00 %	6	-	-	-	-	-
8	Gugatan Selektoral	6	-	-	0.00 %	6	-	-	-	-	-
9	Penahanan Karahiyat	66	-	-	0.00 %	66	-	-	-	-	-
10	IPRA	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
11	Pidana Eksekusi	254	3	2	66.47 %	279	3	-	-	-	-
12	Pidana Singkat	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
13	Pidana Capiat	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
14	Perkara Labuan/Utasi	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-	-	-
15	Pidana Anak	-	6	-	0.00 %	6	-	-	-	-	-

Load Time: 0.2783 Sec. | Memory Available: 129M | Memori Usage: 4.41 MB | Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023 | User Online: 1 | Versi: 4.1.1

bagi masyarakat yang ingin mengetahui proses tahapan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat mengakses ke alamat <https://sipp.pn-jakartautara.go.id/>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Revisi: Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

DATA SELURUH PERKARA

Fembahasan Data: Kamis, 05 Jan 2023 06:00:19 WIB, Total: 213.573 Perkara

Kategori Perkara: Cari | Pencarian Detail

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	6/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Ut.	04 Jan 2023	Percecaraan	Pengugat: Daarmawan Tergugat: Daarmawan	Peradilan	1 Hari	[Detail]
2	7/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Ut.	04 Jan 2023	Percecaraan	Pengugat: Daarmawan Tergugat: Daarmawan	Peradilan	1 Hari	[Detail]
3	8/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Ut.	04 Jan 2023	Perbuatan Melawan Hukum	Pengugat: I. GUNDIR TEDDY SANDIAYA 2.EMALIA SANDIAYA Tergugat: NARAN	Peradilan	1 Hari	[Detail]
4	9/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Ut.	04 Jan 2023	Wanprestasi	Pengugat: Mardiana Dito Tergugat: Rajona karan Djaya	Peradilan	1 Hari	[Detail]
5	10/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Ut.	04 Jan 2023	Wanprestasi	Pengugat: I. Rizki Grintung Wicaksono Tergugat: Rizki Grintung Wicaksono	Peradilan	1 Hari	[Detail]

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023 | Lokal View 5.1.3

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (Court of Excellence). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.



Demi mendukung cita-cita Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas IA Khusus terus berbenah dalam mendukung kemajuan teknologi informasi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

Dalam hal mengimplementasikan SIPP di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah tersedia sarana pendukung yaitu:

No	Nama Barang	Jumlah
1	CCTV	6 buah
2	Lcd Projector/infocus	2 buah
3	Meja Komputer	2 buah
4	Uninterruptible Power Supply (ups)	3 buah
5	Komputer Jaringan Lainnya	18 buah
6	PC Unit	47 buah
7	Laptop	31 buah
8	Note Book	4 buah
9	Printer (peralatan Personal Komputer)	11 buah
10	Scanner (peralatan Personal Komputer)	3 buah
11	Rak Server	2 buah
12	Switch	22 buah
13	Server	3 buah

Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2022 telah melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengupdate versi SIPP terbaru yaitu SIPP Versi 5.1.0

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



2. Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara (www.pn-jakartautara.go.id) telah berubah dan mengikuti standar dari Mahkamah Agung RI dan memudahkan masyarakat untuk mencari informasi.
3. Pengadaan PC (Personal Komputer) sebanyak 6 unit guna menunjang kinerja para Panitera Pengganti dalam Penggunaan Aplikasi SIPP di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS 1A KHUSUS

1. IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR KELAS IA KHUSUS

Paska Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem *e-court* sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan.

Pada tanggal 6 Agustus 2019, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan peraturan tersebut nantinya proses peradilan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Litigasi.

Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019, dengan aplikasi e-Litigasi merupakan kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara.

Pada sistem e-court sebelumnya, sistem elektronik atau online hanya dilakukan pada administrasi negara atau pendaftaran. Selain itu, sistem elektronik juga tidak hanya diberlakukan pada pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara dan biaya pemanggilan tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik, e-Litigasi juga memperluas cakupan pengguna data peradilan secara elektronik.

Pemberlakuan e-Litigasi untuk persidangan di tingkat pertama juga diikuti dengan pemanfaatan e-court untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-Litigasi pada tingkat pertama. Untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus telah menerbitkan **Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus Nomor W10-U5/123/OT.02/9/2021** Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus disusul dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA

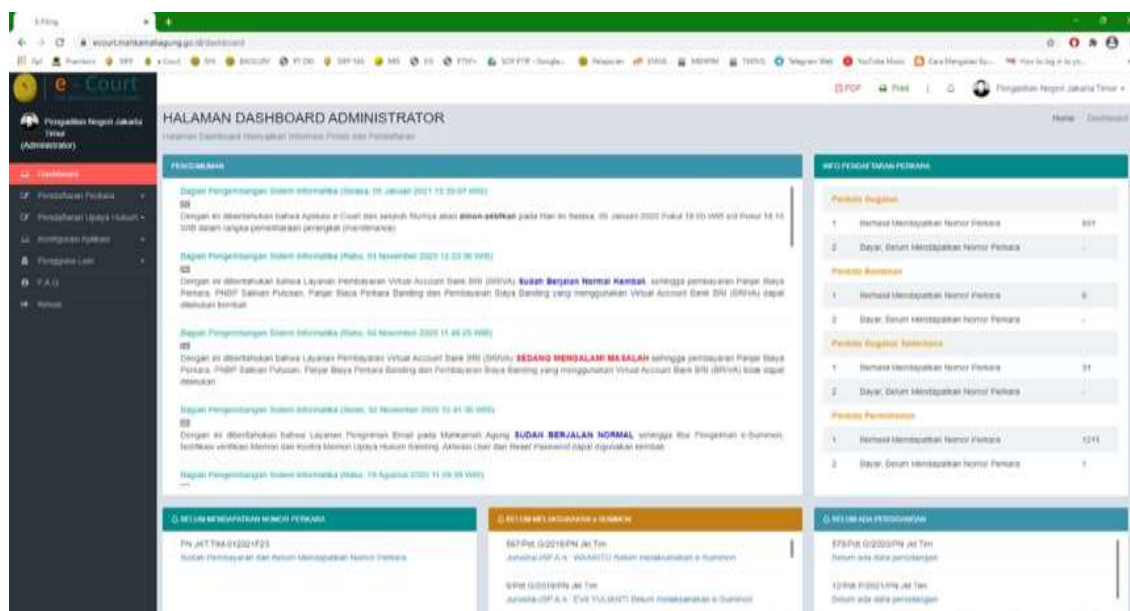
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



Khusus Nomor W10-U5/124/OT.2/9/2021 Tentang Panitia Pelaksana Sosialisasi E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebagai berikut:

NO	PERKARA	JUMLAH
1	Perdata Gugatan	739
2	Perdata Bantahan	27
3	Perdata Gugatan Sederhana	40
4	Perdata Permohonan	1029
Jumlah		2022



2. IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di setiap satuan kerja. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Dalam tahun 2022 SIPP mengalami 3 (tiga) kali pembaharuan versi dari 4.2.0, 5.0.0 dan 5.1.0.

Dengan format SIPP versi dari 4.2.0, terdapat fitur – fitur baru yaitu:

4.2.0 Umum: Penambahan Fitur Pasca Pailit untuk Pengadilan Niaga.



- 4.2.0 Umum: Optimalisasi Proses Perkara PKPU.
- 4.2.0 Umum: Pendaftaran Perkara Perdata Khusus Melalui e-Court.
- 4.2.0 Optimalisasi Register Upaya Hukum (Manual & Auto).
- 4.2.0 Optimalisasi Sinkronisasi Data Tingkat Pertama ke Tingkat Banding Perihal Upaya Hukum.
- 4.2.0 Umum: Fitur Verifikasi Data Kurator Yang Menangani Perkara.
- 4.2.0 Umum: Fitur penggabungan pendaftaran perkara KPPU.
- 4.2.0 Umum: Biaya Pendaftaran Berdasarkan Nilai Utang Perkara Kepailitan dan KPPU.
- 4.2.0 Umum: Validasi biaya untuk perkara PHI jika nilai sengkat di bawah 150 jt tidak ada biaya.
- 4.2.0 Umum: Penambahan Register Eksekusi Tanpa Keberatan Putusan KPPU & BPSK.
- 4.2.0 Penambahan Fitur Pemeriksaan Tambahan Pada Proses Upaya Hukum.
- 4.2.0 Penambahan Fitur Penunjukan JS/JSP pada upaya hukum.
- 4.2.0 Umum: Penambahan Fitur Pengisian Data Penyidik & Bapas.
- 4.2.0 Militer: Penambahan Register Perbedaan Pendapat pada Dimiltama.



No	Urut	Revisi	Deskripsi
1	4.2.0	1	Umum: Penambahan Ek & Ekspansi Basi untuk Pengaturan Waktu
2	4.2.0	1	Umum: Penambahan Proses Beracara PKPU
3	4.2.0	1	Umum: Penambahan Register Perintah Putusan Banding & Draft
4	4.2.0	1	Penambahan Register Eksekusi Tanpa Keberatan & BPSK
5	4.2.0	1	Optimalisasi Sinkronisasi Data Tingkat Pertama ke Tingkat Banding Perihal Upaya Hukum
6	4.2.0	1	Umum: Fitur penggabungan pendaftaran perkara KPPU
7	4.2.0	1	Umum: Validasi biaya untuk perkara PHI jika nilai sengkat di bawah 150 jt tidak ada biaya
8	4.2.0	1	Umum: Penambahan Register Eksekusi Tanpa Keberatan Putusan KPPU & BPSK
9	4.2.0	1	Umum: Validasi biaya untuk perkara PHI jika nilai sengkat di bawah 150 jt tidak ada biaya
10	4.2.0	1	Umum: Penambahan Register Eksekusi Tanpa Keberatan Putusan KPPU & BPSK
11	4.2.0	1	Penambahan Fitur Pemeriksaan Tambahan Pada Proses Upaya Hukum
12	4.2.0	1	Penambahan Fitur Penunjukan JS/JSP pada upaya hukum
13	4.2.0	1	Umum: Penambahan Fitur Pengisian Data Penyidik & Bapas
14	4.2.0	1	Militer: Penambahan Register Perbedaan Pendapat pada Dimiltama



Dengan format SIPP versi dari 5.0.0, terdapat fitur – fitur baru yaitu:

- 5.0.0 Umum/Agama/Militer: Penambahan Fitur Pendaftaran Online Perkara Pidana (eBerpadu).
- 5.0.0 Umum: Penambahan Pilihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada edit Data Umum.
- 5.0.0 Umum: Perbaikan Error asal_berkas pada tambah Diversi.
- 5.0.0 PK: Tidak bisa menambahkan Hakim Pemeriksa Bukti baru.
- 5.0.0 Eksekusi HT: Status Cabut tidak tampil.
- 5.0.0 Umum: Perkara Niaga tidak bisa PK.
- 5.0.0 Agama: Penambahan Fitur Perkara Jinayat Anak.
- 5.0.0 Agama: Penambahan Fitur Diversi Tk Penyidik/Penuntut.
- 5.0.0 Umum: Perbaikan Diversi Tidak Berhasil (Jenis Kesepakatan Diversi

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



tidak dimunculkan).

5.0.0 Perbaikan Eksekusi (Bisa Mengajukan Lebih dari 1 kali permohonan).

5.0.0 Perbaikan Dashboard Perkara (Statistik Perkara).

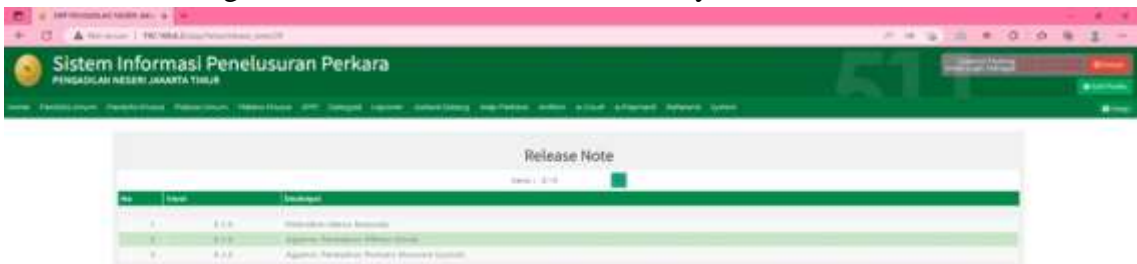


Dengan format SIPP versi dari 5.0.0, terdapat fitur – fitur baru yaitu:

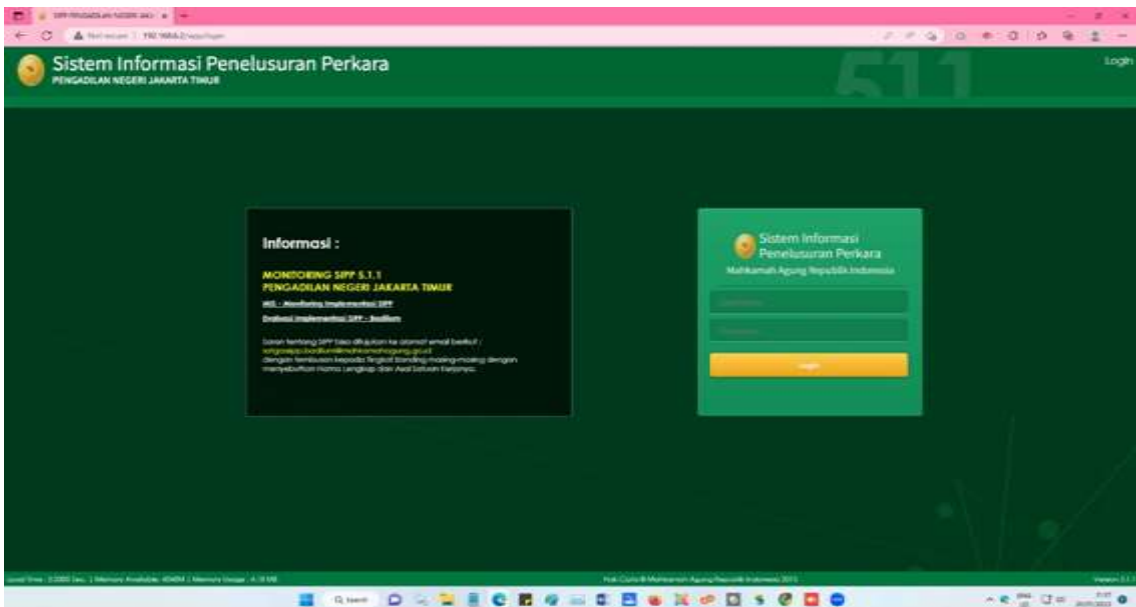
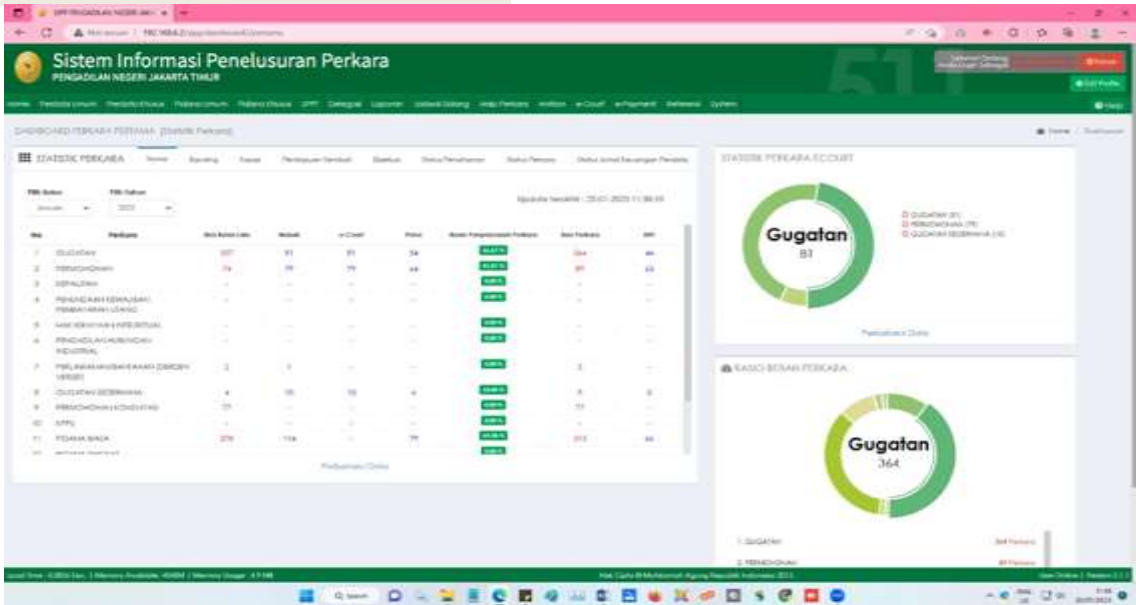
5.1.0 Perbaikan Menu Berpadu

5.1.0 Agama: Perbaikan Pilihan Ghoib

5.1.0 Agama: Perbaikan Perkara Ekonomi Syariah



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



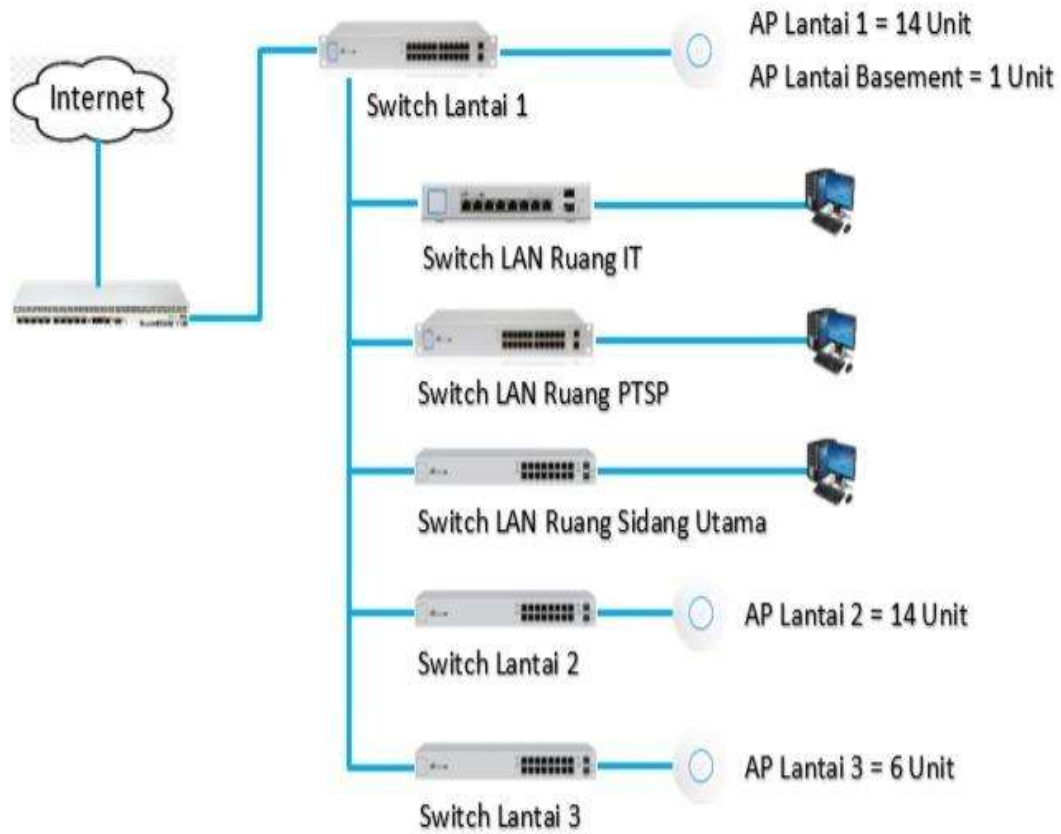
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan memakai Monitoring Informasi SIPP (MIS). Periode Desember tahun 2022 berdasarkan Monitoring Informasi SIPP (MIS) Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus memiliki nilai Evaluasi Implementasi SIPP : **887,00**

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	RINERUS	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	PERESOLUSI	TOTAL
1.	1000	di-Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	148.17	918.90	100.00	166.72	888.82
2.	1000	di-Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	145.25	910.00	107.00	100.00	862.25
3.	1000	di-Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	143.38	407.34	107.81	108.87	867.40
4.	1000	di-Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	145.04	409.90	107.64	100.00	862.58
5.	1000	di-Khusus	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	120.71	444.80	100.00	100.00	815.51



3. TOPOLOGI JARINGAN

TOPOLOGY



4. PERANGKAT HARDWARE / SOFTWARE / SERVER

Server

NO	BARANG	TYPE
1	SERVER	Fujitsu Primergy RX1330 M1
2	SERVER	Hp Proliant ML150 G6
3	SERVER	Fujitsu Primergy TX1330M4

Switch

NO	BARANG	TYPE
1	SWITCH GIGABIT 16 PORT	Allied Telesis
2	SWITCH GIGABIT 8 PORT	Allied Telesis
3	SWITCH GIGABIT 8 PORT	TP-Link
4	SWITCH GIGABIT 8 PORT	TP-Link
5	SWITCH 100 MBPS 8 PORT	3 Com
6	SWITCH MANAGED GIGABIT 16 Port	HP

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



Router

NO	BARANG	TYPE
1	ROUTER MIKROTIK	RB 1200
2	ROUTER MIKROTIK	Rb 1100 AHX2

Accespoint

NO	BARANG	TYPE
1	ACCES POINT	TP LINK
2	ACCES POINT	TP LINK
3	ACCES POINT	TP LINK
4	ACCES POINT	TP LINK
5	ACCES POINT	TP LINK
6	ACCES POINT	TENDA
7	ACCES POINT	TENDA
8	ACCES POINT	TENDA
9	ACCES POINT	ASUS
10	ACCES POINT	ASUS
11	ACCES POINT	ASUS
12	ACCES POINT	CISCO

Notebook

NO	BARANG	TYPE
1	NOTEBOOK FUJITSU	-
2	NOTEBOOK FUJITSU	-
3	NOTEBOOK ASUS	N43a1-V2G-VX264G
4	DELL	VOSTRO P75G
5	DELL	VOSTRO P75G
6	LENOVO	V330-14IKB
7	LENOVO	V330-14IKB
8	LENOVO	V330-14IKB
9	LENOVO	V330-14IKB
11	LENOVO	V330-14IKB
11	LENOVO	V330-14IKB
12	LENOVO	V330-14IKB
13	LENOVO	V330-14IKB
14	LENOVO	V330-14IKB
15	LENOVO	V130-14IKB
16	LENOVO	V130-14IKB
17	LENOVO	V130-14IKB
18	LENOVO	V130-14IKB
19	LENOVO	V130-14IKB
20	LENOVO	V130-14IKB
21	LENOVO	V130-14IKB
22	LENOVO	V130-14IKB
23	LENOVO	V130-14IKB
24	LENOVO	V130-14IKB
25	LENOVO	V130-14IKB
26	LENOVO	V130-14IKB

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN



PC All in One

NO	BARANG	TYPE
1	PC Unit	HP Pavilion Omni 120
2	PC Unit	HP Pavilion Omni 120
3	PC Unit	HP Pavilion Omni 120
4	PC Unit	HP Pavilion Omni 120
5	PC Unit	HP Pavilion Omni 120
6	PC Unit	HP Pavilion Omni 120
7	PC Unit	HP Pavilion Omni 120
8	PC Unit	HP Pavilion Omni 120
9	PC Unit	HP Pavilion Omni 120
10	PC Unit	HP Pavilion Omni 120
11	PC Unit	HP Pavilion Omni 120
12	PC Unit	HP Pavilion Omni 220
13	PC Unit	HP Pavilion Omni 220
14	PC Unit	HP Pavilion Omni 220
15	PC Unit	HP Pavilion Omni 220
16	PC Unit	HP Pavilion Omni 220
17	PC Unit	HP Pavilion Omni 220
18	PC Unit	HP Pavilion Omni 220
19	PC Unit	HP Pavilion Omni 220
20	PC Unit	HP Pavilion Omni 220
21	PC Unit	HP Pavilion Omni 220
22	PC Unit	HP Pavilion Omni 3264
23	PC Unit	HP Pavilion Omni 3264
24	PC Unit	HP Pavilion Omni 3264
25	PC Unit	HP Pavilion Omni 3264
26	PC Unit	HP Pavilion Omni 3264
27	PC Unit	HP AIO 200 G3
28	PC Unit	HP AIO 200 G3
29	PC Unit	HP AIO 200 G3
30	PC Unit	HP AIO 200 G3
31	PC Unit	HP AIO 200 G3
32	PC Unit	HP AIO 200 G3
33	PC Unit	HP AIO 200 G3
34	PC Unit	HP AIO 200 G3
35	PC Unit	HP AIO 200 G3
36	PC Unit	HP AIO 200 G3
37	PC Unit	HP AIO 200 G3
38	PC Unit	HP AIO 200 G3
39	PC Unit	HP AIO 200 G3
40	PC Unit	HP AIO 200 G3
41	PC Unit	HP AIO 200 G3
42	PC Unit	HP AIO 200 G3
43	PC Unit	HP AIO 200 G3
44	PC Unit	HP AIO 200 G3
45	PC Unit	HP AIO 200 G3
46	PC Unit	HP AIO 200 G3
47	PC Unit	HP AIO 200 G3
48	PC Unit	HP AIO 200 G3
49	PC Unit	HP AIO 200 G3
50	PC Unit	HP AIO 200 G3

